



**KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM  
PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
(MONEY LAUNDERING)**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh**

**MATHITHA RANTI HAPSARI P.**

**NIM : B.4.A. 000251**

**Dibawah Bimbingan :**

**PROF. DR. H. BARDA NAWAWI ARIEF, SH**

**IDANG KAJIAN HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2003/2004**



UNIVERSITAS DIPONEGORO

**KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-  
UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY  
LAUNDERING*)**

Dipersiapkan dan Disusun oleh :

**MATHITHA RANTI HAPSARI P.**  
**NIM : B.4.A. 000251**

Telah dipertahankan di Depan Dosen Penguji  
Pada Tanggal :

Tesis ini Telah Diterima Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Derajat Magister  
Bidang Ilmu Hukum

Dosen Pembimbing Tesis

Semarang, 2004  
Universitas Diponegoro  
Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

**Prof. Dr. H. BARDA NAWAWI ARIEF, SH**  
**NIP : 130 350 915**

**Prof. Dr. H. BARDA NAWAWI ARIEF, SH**  
**NIP : 130 350 915**

**BIDANG KAJIAN HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2003/2004**



**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-  
UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY  
LAUNDERING)**

Oleh :

**MATHITHA RANTI HAPSARI P.**  
NIM : B.4.A. 000251

**Kupersembahkan :**

Kehadapan Ayahanda dan Ibunda  
Suami Tercinta  
Ananda Tersayang

**BIDANG KAJIAN HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2003/2004**

iii

<b>UPT-PUSTAK-UNDIP</b>	
Nn. Daft:	3565/T/MIH/cj
Tgl.	4/3 05

## KATA PENGANTAR

Ucapan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis yang berjudul : **“KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*)”** ini disusun untuk memenuhi syarat – syarat guna menyelesaikan Program Studi S2 (Magister) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, penulis akan mengalami berbagai kesulitan dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penulisan tesis ini, terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. DR. H. Barda Nawawi Arief, SH, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan sekaligus selaku pembimbing penulisan tesis ini;
2. Seluruh tenaga pengajar dan staf pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang
3. Suami tercinta yang dengan penuh kasih sayang memberikan dorongan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini, juga ananda tersayang yang telah memberikan motivasi bagi penulis;
4. Rekan-rekan seperjuangan yang telah bersama-sama menuntut ilmu di Program Magister Ilmu Hukum Angkatan 200 kelas Sistem Peradilan Pidana Pagi;

5. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Tentunya tesis ini masih jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan di sana sini, oleh karena itu terhadap kekurangan-kekurangan yang ada, penulis menerima saran dan kritik demi perbaikan dan kesempurnaan tesis ini.

Meskipun demikian penulis sangat berharap semoga tesis ini berguna bagi ilmu pengetahuan, khususnya Bidang Kajian Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.

Semarang, Februari 2004

Penulis,

**MATHITHA RANTI HAPSARI P.**

## ABSTRAK

Pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana dalam UU TPPU dan bagaimana sinkronisasi kebijakan formulasi hukum pidana dalam UU TPPU Indonesia dengan UU TPPU di negara Asean dalam upaya menanggulangi kejahatan transnasional.

Pendekatan utama terhadap masalah ini adalah pendekatan yuridis normatif, ditunjang dengan pendekatan yuridis empiris, yuridis-komparatif dan yuridis-historis. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan penguraian secara analisis dan preskriptif.

Berdasarkan analisis diketahui bahwa masih terdapat kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana dalam UU TPPU yang menyangkut masalah asal-asul harta kekayaan yang dicuci, meskipun dalam UU TPPU Amandemen diperluas menjadi 25 tindak pidana. Dengan adanya pembatasan tersebut dapat timbul masalah jika terjadi tindak pidana lainnya selain 25 tindak pidana tersebut. Mengenai pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana khususnya mengenai sistem dan strategi pemidanaan dalam UU TPPU mengandung kelemahan antara lain perumusan jenis pidana pokok yang berlaku kaku dan imperatif, tidak ada turunan atau pedoman penerapan pidana minimal khusus dan tidak ada aturan khusus untuk korporasi yang tidak membayar denda, dan pertanggungjawaban korporasi dalam UU TPPU masih sangat terbatas dan tidak konsisten dengan perumusan yang ada dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi dan Undang-undang Korupsi, serta sistem dan strategi pemidanaan kurang diorientasikan sebagai *transnational organized crime*, karena masih bersifat *individual* dan kurang bersifat *institutional*.

Dilihat dari kerja sama Asean dalam menghadapi TPPU, maka perumusan *predicate offence* di berbagai negara Asean yang limitatif tetapi "berbeda jenis tindak pidananya" itu dapat menimbulkan masalah. Hanya di Myanmar perumusan *predicate offence* terlihat lebih fleksibel. Kebijakan memperluas subjek tindak pidana pada korporasi dalam UU TPPU di Asean sudah sesuai dengan standar internasional, hanya di Myanmar lebih ditujukan pada subjek berupa "orang", tidak ada "korporasi". Mengenai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, di Indonesia didirikan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan bagi negara-negara lain juga mendirikan semacam PPATK, AUSTRAC tahun 1989 di Australia, FINCEN (*Financial Crime Intelligence Network*) di Amerika Serikat, AMLO (*Anti Money Laundering Office*) di Thailand, Unit Perisikan Kewenangan di Malaysia, *Suspicious Transaction Reports Office (STRO)* Singapura, dan *The Office of Anti Money Laundering* di Filipina.

Kata Kunci : Kebijakan, Hukum Pidana, Pencucian Uang

## ABSTRACT

The basic problem which are discussed in this thesis are how the weakness of criminal formulation policy in TPPU law and how synchrization of criminal law formulation policy in asia's TPPU law with TPPU law in Southeast Asia as an effort to solve the transnational al.

The first approachment to this problem is yuridic – normative approachment which is rted by yuridic – emprpe approachment, yuridic – comparative and yuridic – historic. The which has been gained, it's analyzed qualitatively by analysis and prescriptive analyzing.

Based on the analysis, it's known that the weakness in TPPU law include about the origin dicate effence causes the problem if there is a criminal case beside of 25 criminal cases. the system and strategic of condemnation have some weakness such as, a kinds of main rmulation which are rigid and imperative, that is, use a single system ( only fine law ) for ration and cumulative system ( prison and fine ) for person and there is no rule or guidance the application of special minimize law and there is no special rule for corporation which y fine. In the responsibility case, corporation are still limited and not consistent with the tion which are existed in law of economic criminal case and the law of corruption.

There is no synchronization of law formulation policy between Indonesia's TPPU law Southeast Asia especially about the problem of predicate offence. In TPPU law of esia, Myanmar, Philipine and Malaysia, all of them give a limited formulation but it's ent in kinds of its criminal case and it can be a problem. About a number of predicate ce in Indonesia, Philipine, Malaysia and also many other countries aren't definite its tion unless in Myanmar. Its number or values are difinited by CCB. In Indonesia and also ny Southeast Asia countries, the subject of criminal case are similar, that is corporation, s in Myanmar it's more closely to subject "person" not to "corporation". About another al case which are related with money laundering criminal cases, in Myanmar, there is a hat the bank or Financial Institution doesn't allow the investigating officer transfer the y and delete the note without permission by CCB.

kata kunci : Policy, Criminal Case, Money Laundering

## DAFTAR ISI

	Halaman
MAN JUDUL .....	i
MAN PENGESAHAN .....	ii
MAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
PENGANTAR.....	iv
RAK .....	vi
RACK .....	vii
AR ISI .....	viii
: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Kerangka Pemikiran .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	19
E. Metode Penelitian .....	19
F. Metode Penelitian .....	20
1. Metode Pendekatan.....	20
2. Jenis dan Sumber Data.....	22
3. Metode Pengumpulan Data.....	23
4. Analisis dan Penyajian Data.....	23
G. Sistematika Penulisan .....	23
II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Mekanisme Pencucian uang .....	25
1. Pengertian Pencucian uang.....	25
2. Mekanisme Pencucian Uang.....	27
B. Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana dan Sanksi Pidana ....	37
1. Tindak Pidana .....	37
2. Pertanggungjawaban Pidana.....	48
3. Sanksi Pidana.....	58



C. Kebijakan Formulatif Hukum Pidana.....	68
II : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
A. Kelemahan Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam UU TPPU	82
B. Sinkronisasi Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam UU TPPU Indonesia Dengan UU TPPU Di Negara Asean Dalam Upaya Menanggulangi Kejahatan Transnasional.....	132
V : PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	182
1. Kesimpulan Umum.....	182
2. Kesimpulan Khusus.....	183
B. Saran .....	188

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia, yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan kukuh kekuatan moral dan etikanya.

Kelangsungan dan berhasilnya pembangunan sangat bergantung pada situasi, kondisi keamanan, stabilitas dan keadaan negara yang konsisten. Oleh karena itu perlu usaha untuk memelihara dan mengembangkan stabilitas nasional yang sehat, dinamis di bidang politik, ekonomi, serta sosial. Stabilitas di bidang politik akan nampak dengan tegak tumbuhnya kehidupan konstitusional secara demokratis berdasarkan hukum dan selanjutnya meningkatkan usaha memelihara ketertiban serta kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat.

Pembangunan Nasional yang merupakan proses modernisasi membawa dampak positif dan negatif. Banyak peristiwa yang menarik perhatian dewasa ini adalah masalah kejahatan transnasional seperti penyucian uang hasil dari kejahatan yang berkembang begitu luas, misalnya hasil kejahatan dari perdagangan gelap narkoba, penyelundupan, dan korupsi, bahkan kejahatan

perdagangan senjata api, perdagangan obat terlarang seperti psikotropika, hasil penggelapan atau penghindaran pajak dan sebagainya.

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan, dewasa ini bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang atau *money laundering*. Hal ini dikarenakan bank merupakan sektor yang banyak menawarkan jasa-jasa dan instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal-usul suatu dana. Dengan adanya globalisasi perbankan, maka melalui sistem perbankan dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Melalui mekanisme ini maka dana hasil kejahatan bergerak dari satu negara ke negara lain yang belum mempunyai sistem hukum yang cukup kuat untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang atau bahkan bergerak ke negara yang menerapkan ketentuan rahasia bank secara sangat ketat.

Kejahatan "*money laundering*" atau pencucian uang atau pemutihan uang bertujuan untuk melindungi atau menutupi suatu aktivitas kriminal yang menjadi sumber dari dana atau uang yang akan "dibersihkan". Aktivitas kriminal dimaksud misalnya perdagangan gelap narkoba (*drug trafficking*) atau penggelapan pajak (*illegal tax avoidance* atau *Tax Evasion*).<sup>1</sup> Dengan demikian pemicu dari kejahatan pencucian uang sebenarnya adalah suatu tindak pidana atau aktivitas kriminal. Kegiatan ini memungkinkan para pelaku kejahatan untuk

---

<sup>1</sup>*Money Laundering : A Banker's Guide To Avoiding Problems, occ.treas.gov/launder/origh.htm.*

menyembunyikan asal-usul sebenarnya dari suatu dana atau uang hasil kejahatan yang dilakukan. Melalui kegiatan ini pula para pelaku akhirnya dapat menikmati dan menggunakan hasil kegiatan yang sah/legal.

Berdasarkan statistik IMF, hasil kejahatan yang di"cuci" melalui bank-bank diperkirakan hampir mencapai nilai USD 1.500 miliar per tahun.<sup>2</sup> Sementara itu menurut Associated Press, kegiatan pencucian uang hasil perdagangan obat bius, prostitusi, korupsi dan kejahatan lainnya sebagian besar diproses melalui perbankan untuk kemudian dikonversikan menjadi dana legal dan diperkirakan kegiatan ini mampu menyerap nilai USD 600 miliar per tahun. Ini berarti sama dengan 5 % GDP diseluruh dunia.

Dalam melihat apakah suatu negara sudah mengambil langkah-langkah yang cukup, *Financial Action Task Force* suatu forum kerjasama antara negara-negara maju untuk memberantas *money laundering* menggunakan beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai kegiatan *money laundering*, yaitu:<sup>3</sup>

1. Adanya *loopholes* di dalam peraturan industri jasa keuangan, seperti terlihat pada :
  - a. Kurang memadainya pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.
  - b. Kurang memadainya peraturan tentang perizinan dan pendirian lembaga keuangan, termasuk mengenai penilaian mengenai latar belakang pengurus dan *beneficial owner*.
  - c. Kurang memadainya persyaratan identifikasi nasabah lembaga keuangan.
  - d. Ketentuan rahasia bank yang berlebihan.
  - e. Tidak adanya sistem pelaporan transaksi yang mencurigakan yang efisien.
2. Hambatan dari peraturan perundang-undangan lain, seperti :
  - a. Kurang memadainya persyaratan untuk pendaftaran perusahaan dan badan hukum

---

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> *Financial Action Task Force on Money Laundering, Report on Non-Cooperative Countries and Territories*, 14 February 2000.

- b. Tidak adanya aturan tentang identifikasi *beneficial owner* dari perusahaan
3. Hambatan di dalam kerjasama internasional baik hambatan oleh eksekutif maupun yudikatif.
4. Tidak memadainya sumber daya untuk mencegah dan mengetahui kegiatan *money laundering*, misalnya tidak adanya *financial intelligent unit*

Bagi Indonesia, pengaruh perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pengaruh globalisasi di bidang ekonomi dapat membawa dampak positif dan negatif. Di satu pihak kita yang sedang membangun membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk pembiayaan pembangunan, di lain pihak kita juga tidak dapat mengetahui secara pasti apakah dan yang masuk ke Indonesia atau ke luar Indonesia betul-betul sebagai uang atau dana yang legal.

Seorang pakar ekonomi, Anwar Nasution, mengemukakan bahwa gabungan antara kelemahan sistem sosial (termasuk sistem hukum nasional) dan keterbelakangan sistem keuangan merupakan faktor penyebab kenapa Indonesia dapat menjadi surga bagi usaha untuk memperoleh uang haram dan sekaligus untuk mencuci ataupun memutihkannya ("*money laundering*"). Proses pemutihan uang haram menjadi semakin lebih mudah dilakukan karena kombinasi antara kemajuan teknologi dan deregulasi perekonomian telah mempererat integrasi perekonomian nasional dengan perekonomian dunia. Integrasi perekonomian ini memudahkan proses keluar masuknya uang haram melalui transaksi di pasar : barang-barang dan jasa-jasa (termasuk turisme)

faktor-faktor produksi modal maupun tenaga kerja antara Indonesia dengan luar negeri.<sup>4</sup>

Bagi organisasi kejahatan, harta kekayaan sebagai hasil kejahatan ibarat darah dalam satu tubuh, dalam pengertian apabila aliran harta kekayaan melalui sistem perbankan internasional yang dilakukan diputuskan, maka organisasi kejahatan tersebut lama kelamaan akan menjadi lemah, berkurang aktivitasnya, bahkan menjadi mati. Oleh karena itu, harta kekayaan merupakan bagian yang sangat penting bagi suatu organisasi kejahatan. Untuk itu, terdapat suatu dorongan bagi organisasi kejahatan melakukan pencucian uang agar asal usul harta kekayaan yang sangat dibutuhkan tersebut sulit atau tidak dilacak oleh penegak hukum.

Perbuatan pencucian uang di samping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Sehubungan dengan hal tersebut, upaya untuk mencegah dan memberantas praktek pencucian uang telah menjadi perhatian internasional. Berbagai upaya telah ditempuh oleh masing-masing negara untuk mencegah dan memberantas praktek pencucian uang termasuk dengan cara melakukan kerja sama internasional, baik melalui forum secara bilateral maupun multilateral.

Dalam konteks kepentingan nasional ditetapkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut

---

<sup>4</sup> Anwar Nasution, *"Peranan Sistem Keuangan Dalam Pemberantasan Money Laundering"*, Makalah Seminar Tentang *Money Laundering* diselenggarakan oleh BPHN-partemen Kehakiman, 4-3-1997, hal. 1.

TPPU) merupakan penegasan bahwa pemerintah dan sektor swasta bukan merupakan bagian dari masalah, akan tetapi bagian dari penyelesaian masalah, baik di sektor ekonomi, keuangan, maupun perbankan. Pertama-tama usaha yang harus ditempuh oleh suatu negara untuk dapat mencegah dan memberantas praktek pencucian uang adalah dengan membentuk undang-undang yang melarang perbuatan pencucian uang dan menghukum dengan berat para pelaku kejahatan tersebut. Dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan tindak pidana pencucian uang dapat dicegah dan diberantas.

Menetapkan perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana yang diformulasikan dalam perundang-undangan sebagai salah satu sarana menanggulangi masalah kejahatan merupakan bagian dari salah satu kebijakan kriminal. Melaksanakan politik kriminal antara lain berarti membuat perencanaan atau menanggulangi masalah-masalah yang berhubungan dengan kejahatan. Termasuk dalam perencanaan ialah di samping merumuskan perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dikenakan di pelanggar. Dalam hal ini apa dan bagaimana kebijakan yang seharusnya ditempuh oleh para pembuat undang-undang.

Apabila mengadakan peninjauan terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia maka dapat dikemukakan tiga persoalan pokok : perbuatan pidana yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan masalah penjatuhan pidana. Sehubungan dengan itu, maka dalam melakukan pembaharuan hukum khususnya hukum pidana, perlu diketahui masalah pokok

dari hukum pidana itu sendiri. Menurut Herbert L. Packer, tiga masalah pokok hukum pidana adalah :

- (1) *What conduct should be designated as criminal;*
- (2) *What determinations must be made before a person can be found to have committed a criminal offense;*
- (3) *What should be done with persons who are found to have committed criminal offenses.*<sup>5</sup>

Dalam melakukan pembaharuan hukum pidana tentu tidak terlepas dari persoalan-persoalan pokok dalam hukum pidana dan pidana. Dalam melakukan pembaharuan terhadap ketiga persoalan pokok dalam hukum pidana tersebut, juga tidak terlepas dari Kebijakan Formulatif, Kebijakan Yudikatif/Aplikatif dan Kebijakan Eksekutif/Administratif, karena dalam ketiga tahap kebijakan itu terkandung tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan, kekuasaan yudikatif/aplikatif dalam menerapkan hukum pidana dan kekuasaan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana".<sup>6</sup>

Penanggulangan kejahatan atau tindak pidana pencucian uang dengan hukum pidana berarti membahas pembaharuan hukum pidana di bidang kejahatan pencucian uang yang difokuskan pada kebijakan perumusan perbuatan pidananya, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidananya. Dengan kata lain pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan strategis yang diformulasikan

---

<sup>5</sup> Herbert L. packer, *The Limit of the Criminal Sunction*, Stanford University Press, ifornia, 1968, hlm. 17.

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. ra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 30.



dalam suatu peraturan perundang-undangan, yang disebut pula dengan kebijakan perundang-undangan.

Walaupun terlambat dibandingkan dengan negara-negara lain, namun kebijakan melakukan kriminalisasi TPPU di Indonesia dengan keluarnya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002, sudah menunjukkan keikutsertaan Indonesia dalam upaya penanggulangan *money laundering* yang sudah lama menjadi perhatian dunia Internasional.

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan rangkain dari suatu bentuk tindak pidana/kejahatan. Tindak Pidana Pencucian Uang juga merupakan bentuk pernyataan/partisipasi, khususnya kelanjutan dari suatu tindak pidana, yaitu bentuk penyertaan setelah terjadinya tindak pidana, yang dalam istilah Jerman dikenal dengan istilah "*Nachterschaft*". Karena TPPU dijadikan delik tersendiri (*delictum sui generis*) dan sistem pidana/pemidanaanya terlepas atau tidak diintegrasikan dengan delik pokok sebelumnya maka tidak mustahil ada ketidakkonsistensian dan timbul kejanggalan-kejanggalan apabila dikaitkan dengan sistem pemidanaan untuk delik pokok/induknya.<sup>7</sup>

Jika dilihat dari sistem pemidanaannya, Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-Undang TPPU banyak yang menyimpang atau berbeda dengan aturan umum KUHP yang menjadi induknya. Adanya penyimpangan atau perbedaan itu dapat dibenarkan secara yuridis, artinya masih dapat dibenarkan dilihat dari sistem pemidanaan yang berlaku saat ini di Indonesia. Namun sangat

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Catatan Terhadap Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Makalah Seminar Nasional, Jakarta, Tanggal 28 Agustus 2002, hal. 9.

sayangkan, pengaturan pada Undang-Undang TPPU ini tidak dalam satu pola pemidanaan yang sama, tidak konsisten dan ada yang kontradiktif. Bahkan ada yang sama sekali tidak disertai dengan aturan/pedoman pemidanaan. Hal inilah yang dapat menimbulkan masalah yuridis dan kesulitan/kejanggalan dalam praktek penegakan hukum.

Dalam kesempatan ini penulis bermaksud melakukan kajian terhadap kebijakan formulasi hukum pidana dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2002 (UU TPPU) yang meliputi perumusan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana. Pemilihan pokok masalah yang demikian, didasarkan pertimbangan bahwa pada tahap legislatif/formulatif sebagai tahap yang paling strategis dalam pelaksanaan hukum pidana, karena apabila pada tahap legislatif ini terjadi kesalahan atau kelemahan maka dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pencucian uang pada tahap berikutnya yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Di samping itu penulis juga melakukan kajian terhadap sinkronisasi kebijakan formulasi hukum pidana dalam UU TPPU Indonesia dengan UU TPPU di negara Asean dalam menghadapi kejahatan transnasional. Pentingnya mengkaji pokok permasalahan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kejahatan atau TPPU (*money laundering*) merupakan kejahatan lintas negara/transnasional yang terorganisasi (*transnasional organized crime*) dan sudah lama menjadi perhatian dunia internasional.

## . Perumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana dalam UU TPPU?
2. Bagaimana sinkronisasi kebijakan formulasi hukum pidana dalam UU TPPU Indonesia dengan UU TPPU di negara Asean dalam upaya menanggulangi kejahatan transnasional?

7. Apakah  
fakta  
ya?

## . Kerangka Pemikiran

Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan (*bribery*), penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, perdagangan gelap narkoba dan psikotropika, perdagangan budak, wanita dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, dan berbagai kejahatan kerah putih. Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya.

Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut, pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut.

Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (*financial system*), terutama ke dalam sistem perbankan (*banking system*). Dengan cara demikian, asal usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana di atas, dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*).

Bagi organisasi kejahatan, harta kekayaan sebagai hasil kejahatan ibarat darah dalam satu tubuh, dalam pengertian apabila aliran harta kekayaan melalui sistem perbankan internasional yang dilakukan diputuskan, maka organisasi kejahatan tersebut lama kelamaan akan menjadi lemah, berkurang aktivitasnya, bahkan menjadi mati. Oleh karena itu, harta kekayaan merupakan bagian yang sangat penting bagi suatu organisasi kejahatan. Untuk itu, terdapat suatu dorongan bagi organisasi kejahatan melakukan pencucian uang agar asal usul harta kekayaan yang sangat dibutuhkan tersebut sulit atau tidak dilacak oleh penegak hukum.

Perbuatan pencucian uang di samping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Sehubungan dengan hal tersebut, upaya untuk mencegah dan memberantas praktek pencucian uang telah menjadi perhatian internasional. Berbagai upaya telah ditempuh oleh masing-masing negara untuk mencegah dan

memberantas praktek pencucian uang termasuk dengan cara melakukan kerja sama internasional, baik melalui forum secara bilateral maupun multilateral.

Jadi kejahatan pencucian uang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian, maka kejahatan ini termasuk pula dalam kejahatan perekonomian. Perhatian dunia internasional terhadap kejahatan ekonomi sangat wajar, mengingat dimensi, ruang lingkup dan dampak dari kejahatan ekonomi ini sangat luas dan dapat melampaui batas-batas teritorial. Diakui ada hubungan yang sangat erat dan saling ketergantungan, antara tatanan sosial dan tatanan ekonomi secara nasional maupun internasional. Sebagai masalah sosio-politik, dikemukakan dalam kongres PBB ke-7, bahwa kejahatan sebagai produk sosial disebabkan oleh beraneka ragam faktor dan di antaranya faktor ekonomilah yang memegang peranan utama.

Selanjutnya dikemukakan pula, bahwa dampak negatif dari kejahatan terhadap program-program pembangunan nasional di negara-negara yang sedang berkembang sangatlah jelas dan berbahaya. Program-program pembangunan nasional di negara-negara berkembang, banyak dirintangi oleh semakin meningkatnya kejahatan ekonomi (*ecomic crimes*), seperti penggelapan, penipuan, penyelundupan, penghindaran pajak, penyalahgunaan bantuan (milik umum dan negara), korupsi yang merajalela, penyuapan dan penyalahgunaan kekuatan-kekuatan ekonomi oleh korporasi nasional dan transnasional.<sup>8</sup>

Menghadapi bahaya dari dampak kejahatan pencucian uang seperti tersebut di atas, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana menempatkan

---

<sup>8</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 148-151.

hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan. Menetapkan perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana yang diformulasikan dalam perundang-undangan sebagai salah satu sarana menanggulangi masalah kejahatan merupakan bagian dari salah satu kebijakan kriminal. Melaksanakan politik kriminal antara lain berarti membuat perencanaan atau menanggulangi masalah-masalah yang berhubungan dengan kejahatan. Termasuk dalam perencanaan ialah di samping merumuskan perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dikenakan di pelanggaran. Dalam hal ini apa dan bagaimana kebijakan yang seharusnya ditempuh oleh para pembuat undang-undang.

Apabila mengadakan peninjauan terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia maka dapat dikemukakan tiga persoalan pokok : perbuatan pidana yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan masalah penjatuan pidana. Sehubungan dengan itu, maka dalam melakukan pembaharuan hukum khususnya hukum pidana, perlu diketahui masalah pokok dari hukum pidana itu sendiri. Menurut Herbert L. Packer, tiga masalah pokok hukum pidana adalah :

- (1) *What conduct should be designated as criminal;*
- (2) *What determinations must be made before a person can be found to have committed a criminal offense;*
- (3) *What should be done with persons who are found to have committed criminal offenses.*<sup>9</sup>

Dalam melakukan pembaharuan hukum pidana tentu tidak terlepas dari persoalan-persoalan pokok dalam hukum pidana dan pidana. Dalam melakukan pembaharuan terhadap ketiga persoalan pokok dalam hukum pidana tersebut,

---

<sup>9</sup> Herbert L. packer, *Op. Cit.*, , hlm. 17.

juga tidak terlepas dari Kebijakan Legeslatif/Formulatif, Kebijakan Yudikatif/Aplikatif dan Kebijakan Eksekutif/Administratif, karena dalam ketiga tahap kebijakan itu terkandung tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan, kekuasaan yudikatif/aplikatif dalam menerapkan hukum pidana dan kekuasaan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana".<sup>10</sup>

Penanggulangan kejahatan atau tindak pidana pencucian uang dengan hukum pidana berarti membahas pembaharuan hukum pidana di bidang kejahatan pencucian uang yang difokuskan pada kebijakan perumusan perbuatan pidananya, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidananya. Dengan kata lain pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan strategis yang diformulasikan dalam suatu peraturan perundang-undangan, yang disebut pula dengan kebijakan perundang-undangan.

Penggunaan hukum pidana sebagai satu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang kajian penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial. Dengan demikian masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan masalah kebijakan (*the*

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Op. ., hal. 30.

*problem of policy*)<sup>11</sup>. Oleh karena itu kita tidak boleh melupakan, bahwa hukum pidana atau lebih tepat sistem pidana itu merupakan bagian dari politik kriminal yaitu suatu usaha yang rasional dari masyarakat untuk melindungi kejahatan. Dan ini mencakup kegiatan pembentukan undang-undang pidana, aktivitas dari Kepolisian, Kejahatan, Pengadilan dan Aparat eksekusi, disamping usaha-usaha yang tidak menggunakan (hukum) pidana.<sup>12</sup> Menurut Marc Ancel, "Politik Kriminal ialah pengaturan atau penyusunan secara Rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat".<sup>13</sup>

Kebijakan hukum pidana dalam kerangka penanggulangan kejahatan dapat dirumuskan sebagai upaya bagaimana membuat atau membentuk peraturan hukum pidana dimasa mendatang secara efektif dan berdaya guna<sup>14</sup>. Sudarto mengartikan kebijakan hukum pidana melalui suatu badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan<sup>15</sup>

Kebijakan sanksi pidana akan dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap konkretisasi atau operasionalisasi atau fungsionalisasi hukum pidana yaitu :

1. Kebijakan Formulatif atau legislatif, yaitu tahap perumusan atau penyusunan hukum pidana.
2. Kebijakan aplikatif atau yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana.

---

<sup>11</sup> Ibid, hal 17.

<sup>12</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal 73.

<sup>13</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 198, hal 157.

<sup>14</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung 1986, 153.

<sup>15</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, Hal



Kebijakan administratif atau eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

Di antara ketiga tahap tersebut, tahap penetapan pidana merupakan tahap paling strategis. Tahap pertama ini diharapkan dapat memberi arah pada dua tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan dan pelaksanaan pidana.

Kalau uraian tahap penetapan pidana ini dibatasi pada kebijakan sanksi pidana, maka yang menjadi permasalahan adalah menetapkan jenis dan jumlah berat-ringannya pidana. Kebijakan sanksi pidana, merupakan suatu perencanaan yang terkandung di dalamnya kebijakan memilih dan menetapkan alternatif. Terkandung pula makna, bahwa pemilihan harus dilakukan berdasarkan pertimbangan yang rasional. Konsep rasionalitas di dalam politik kriminal, menurut Krl o. Christiansen adalah dengan merumuskan tujuan pembedaan yang akan dicapai.

Salah satu tujuan pembedaan yang umum, dan yang telah dirumuskan dalam Konsep KUHP nasional adalah “dapat mencegah dilakukannya tindak pidana” (dalam hal ini kejahatan pencucian uang). “Mencegah” dalam hal ini mengandung arti, mencegah agar si pembuat (pelaku) tidak melakukan tindak pidana lagi (*prevensi spesial*). Di samping itu, juga dalam arti, mencegah *orang lain, calon pembuat potensial atau masyarakat pada umumnya* tidak melakukan tindak pidana (*prevensi general*).<sup>16</sup> Dengan demikian kebijakan sanksi pidana pada kejahatan pencucian uang perlu memperhatikan hal-hal di atas, sehingga

---

<sup>16</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arie, Op. Cit., hal. 90-91.

kebijakan sanksi pidana yang ditetapkan benar-benar efektif mencapai tujuan pemidannya.

Seperti telah dikemukakan di muka bahwa masalah "*money laundering*" bukan saja merupakan masalah satu negara, tetapi sudah merupakan masalah antar negara, sehingga perlu penanganan secara serius, baik melalui kerjasama internasional maupun bilateral.

Walaupun terlambat dibandingkan dengan negara-negara lain, namun kebijakan melakukan kriminalisasi TPPU di Indonesia dengan keluarnya Undang-Undang No. 15 tahun 2002 (diundangkan pada tanggal 17 April 2002), yang selanjutnya diamandemen dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tanggal 13 Oktober 2003, sudah menunjukkan keikutsertaan Indonesia dalam upaya pencegahan *money laundering* yang sudah lama menjadi perhatian dunia internasional.<sup>17</sup>

TPPU merupakan salah satu mata rantai dari suatu bentuk tindak pidana/kejahatan. TPPU merupakan bentuk penyertaan/partisipasi, khususnya kelanjutan dari suatu tindak pidana, yaitu bentuk penyertaan setelah terjadinya

---

<sup>17</sup> Upaya internasional dalam menghadapi masalah "Money Laundering" terlihat a.l. dalam dokumen-dokumen sbb : (1) the 1988 UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, (Desember 19, 1988) (The "Vienna Convention"); (2) the Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the proceeds from Crime, November 8, 1990, (the "Council of Europe Convention"); (3) the Report of the Financial Action Task Force on Money Laundering, April 19, 1990, (the "FATF Report"); (4) the E.C. Directive on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering, (June, 10, 1991), The "E.C. Directive"; (5) the Model Regulation Concerning laundering Offences Connected to Illicit Drug Trafficking and related Offences of Organization of American States, (May 23, 1992), The "OAS Model Regulations"; (6) the Statement of Principles concerning "Prevention of criminal use of the banking system for the purpose of money laundering : (the "Bustetatementen"), adopted by the Basle Committee on Banking Regulation and Supervisory Practices in December 1988; (7) the "Vienna Declaration"(dalam butir 17), 10<sup>th</sup>. UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, April 2000.

tindak pidana, yang dalam istilah Jerman dikenal dengan istilah "Nachtaterschaft". Karena TPPU dijadikan delik tersendiri (*delictum sui generis*) dan sistem pidana/pemidanaanya terlepas atau tidak mustahil ada ketidakkonsistensian dan timbul kejanggalan-kejanggalan apabila dikaitkan dengan sistem pemidanaan untuk delik pokok/induknya.<sup>18</sup>

Sistem pemidanaan dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP (termasuk Undang-Undang TPPU) banyak yang menyimpang atau berbeda dengan aturan umum KUHP yang menjadi induknya. Penyimpangan/perbedaan itu antara lain mengenai :

- adanya subyek tindak pidana berupa "korporasi" dan ketentuan khusus mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi;
- adanya ancaman minimal khusus;
- adanya perumusan ancaman pidana secara kumulasi;
- dipidananya percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat yang sama dengan pelaku;
- meningkatnya jumlah ancaman pidana denda yang sangat tinggi.<sup>19</sup>

Penyimpangan/perbedaan itu dapat dibenarkan secara yuridis, artinya masih dapat dibenarkan dilihat dari sistem pemidanaan yang berlaku saat ini di Indonesia. Namun sangat disayangkan, peraturan pada Undang-Undang TPPU ini tidak dalam satu pola pemidanaan yang sama, tidak konsisten dan ada yang kontadiktif. Bahkan ada yang sama sekali tidak disertai dengan aturan/pedoman

---

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa catatan Terhadap Kebijakan Penanganan Tindak Iana Pencucian Uang (Money laundering)*, Makalah Seminar Nasional, Jakarta, tanggal 28 Agustus 2002, hal. 9.  
<sup>19</sup> Ibid, hal. 10.

kemidanaan. Hal inilah yang dapat menimbulkan masalah yuridis dan kesulitan/kegagalan dalam praktek penegakan hukum.

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan seperti telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana dalam UU TPPU.
2. Untuk mengetahui sinkronisasi kebijakan formulasi hukum pidana dalam UU TPPU Indonesia dengan UU TPPU di negara Asean dalam upaya menanggulangi kejahatan transnasional.

### **Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan formulasi hukum pidana yang terdapat dalam produk legislatif yaitu UU TPPU yang meliputi rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan perumusan sanksi pidana. Di samping itu juga dapat dijadikan evaluasi mengenai upaya sinkronisasi kebijakan formulasi hukum pidana dalam UU TPPU Indonesia dengan UU TPPU di negara Asean dalam upaya menanggulangi kejahatan transnasional.

## Metode Penelitian

### Metode Pendekatan

Permasalahan pokok dalam penelitian ini merupakan masalah kebijakan, yaitu kebijakan formulasi hukum pidana dalam mengatur tentang tindak pidana pencucian uang, oleh sebab itu pendekatan terhadap masalah ini tidak terlepas dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan. Pendekatan kebijakan mencakup pengertian yang saling tali menali antara pendekatan yang berorientasi pada tujuan, pendekatan yang rasional, pendekatan ekonomis dan pragmatis serta pendekatan yang berorientasi pada nilai.<sup>20</sup> Dengan pendekatan yang demikian, diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai kebijakan formulasi hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi rumusan tindak pidana pencucian uang, pertanggungjawaban pidananya dan rumusan sanksi pidana pencucian uang.

Metode pendekatan dalam rangka peninjauan terhadap kebijakan hukum ini terutama dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif, yang oleh Sunaryati Hartono juga dapat digunakan bersama-sama dengan metode pendekatan yang lain.<sup>21</sup> Dengan demikian, penelitian ini ditunjang dan dilengkapi pula dengan pendekatan yuridis komparatif dan pendekatan yuridis historis.

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Penjara*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1996, hal. 61.

<sup>21</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20*, Alumni, ng, 1994, hal. 141.

Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini, karena yang menjadi pusat perhatian utama dalam penelitian ini ialah kebijakan dalam menetapkan dan merumuskan tindak pidana, pertanggungjawabannya dan rumusan sanksi pidana dalam UU TPPU. Dengan demikian, penelitian ini menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan kegunaan dari metode penelitian hukum normatif, yaitu untuk mengetahui dan mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu.<sup>22</sup>

Pendekatan yuridis historis dan komparatif dipandang perlu untuk pendalaman, di samping sebagai pelengkap pendekatan yuridis normatif.<sup>23</sup>

Pendekatan yuridis komparatif dimaksudkan untuk melakukan kajian terhadap asas-asas dan norma-norma yang berkaitan dengan upaya dan strategi dalam menanggulangi kejahatan atau tindak pidana pencucian uang, termasuk di dalamnya instrumen-instrumen internasional, yang oleh Muladi dikatakan bahwa negara-negara anggota PBB tidak dapat dengan begitu saja mengabaikan instrumen-instrumen tersebut, sebab hal ini akan berkaitan erat dengan kesan internasional terhadap negara yang bersangkutan.<sup>24</sup> Berarti bahwa keberadaan hukum (pidana ) suatu negara juga dipengaruhi oleh pandangan-pandangan internasional.

Metode pendekatan yuridis historis dimaksudkan untuk melakukan kajian terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>22</sup> Ibid, hal. 140.

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan*  
*ma Penjara* Op. Cit., hal. 62.

<sup>24</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang,  
5, hal. 30.

berkaitan dengan kejahatan atau tindak pidana pencucian uang, didukung oleh studi yuridis komparatif sehingga dapat memberikan masukan bagi pembentuk kebijakan pada masa yang akan datang.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini dititik beratkan pada studi kepustakaan yang bersumber dari data sekunder, sehingga sesuai dengan metode pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yuridis normatif, maka bahan pustaka merupakan data dasar yang di dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder ini memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut :

- a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (*ready made*);
- b. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu;
- c. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.<sup>25</sup>

Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, dan bahan hukum sekunder yaitu berupa dokumen atau risalah perundang-undangan, konsep rancangan undang-undang, hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya serta pendapat ahli hukum dan ensiklopedia.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian hukum Normatif; Suatu Tinjauan ngkat*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 28..

<sup>26</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia donesia, 1990, hal. 11-12.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Data sekunder yang merupakan sumber utama dalam penelitian ini dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan/studi dokumenter, dengan demikian studi ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan<sup>27</sup>.

### 4. Analisis dan Penyajian Data

Penelitian ini bersifat analitis deskriptif kualitatif normatif yaitu menggambarkan, menjelaskan serta menganalisis secara yuridis data yang telah diperoleh. Penjelasan terhadap data yang dilakukan dengan menggunakan teori-teori dan norma-norma hukum yang ada. Sedangkan keseluruhan data yang diperoleh disajikan secara kualitatif<sup>28</sup>, yaitu dalam bentuk uraian –uraian yang sistematis.

### G. Sistematika Penulisan

Setelah uraian Pendahuluan dalam Bab I ini, selanjutnya Bab II tentang Tinjauan Pustaka akan dibahas konsep dasar mengenai pengertian dan mekanisme pencucian uang, tindak pidana, pertanggungjawaban dan sanksi pidana dalam TPPU, dan kebijakan formatif dalam TPPU.

Kemudian BAB III merupakan hasil penelitian dan analisis terhadap masalah yang terdapat dalam Bab I. Bab ini membahas kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana dalam UU TPPU dan selanjutnya membahas pula

---

<sup>27</sup> Ibid, hal. 98.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1982, hal 250.



mengenai sinkronisasi kebijakan formulasi hukum pidana dalam UU TPPU Indonesia dengan UU TPPU di negara Asean dalam upaya menanggulangi kejahatan transnasional.

BAB IV merupakan penutup, memuat kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan hasil penelitian beserta analisisnya sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya. Juga diuraikan saran sesuai dengan permasalahan yang diajukan sebelumnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### a. Pengertian dan Mekanisme Pencucian Uang

##### 1. Pengertian Pencucian Uang

Istilah pencucian uang atau pemutihan uang (*money laundering*) telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Pada saat itu kejahatan ini dilakukan oleh organisasi kejahatan “mafia” melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) yang kemudian digunakan oleh organisasi tersebut sebagai tempat pemutihan uang yang dihasilkan dari bisnis ilegal seperti perjudian, pelacuran, dan perdagangan minuman keras.

Dalam *Black's Law Dictionary*, *money laundering* diartikan sebagai berikut :

*“Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transactions, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced”.<sup>1</sup>*

Dalam perkembangan berikutnya pengertian *money laundering* dimuat dalam berbagai literatur maupun peraturan yang dilakukan oleh beberapa negara dan organisasi internasional. Salah satu pengertian yang menjadi acuan di seluruh dunia adalah pengertian yang dimuat dalam *the United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drug and*

---

<sup>1</sup> Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary (Sixth Editions)*, West Publishing 10, St. Pamb, Minnesota, USA, 1990, 302.

*Psycotropic Substances of 1988* yang kemudian diratifikasi di Indonesia dengan UU No. 7 Tahun 1997. Secara lengkap pengertian *money laundering* tersebut adalah:

*"The conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offences or offences, or from act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offences or offences to evade the legal consequences of his action; or The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences".*<sup>2</sup>

Selain itu pengertian *money laundering* diberikan oleh beberapa kalangan secara beragam namun pada hakekatnya mengandung unsur-unsur pokok berupa tindakan yang sengaja dilakukan berkaitan dengan kekayaan dan kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana, misalnya :

- a. M. Giovanoli dari *Bank for International Settlement* (BIS) mengatakan bahwa : "money laundering " merupakan suatu proses, yang dengan cara itu asset, terutama asset tunai yang diperoleh dari tindak pidana, dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga asset tersebut seolah-olah dari sumber yang sah".
- b. Mr. J. Koers, seorang Penuntut Umum Belanda, mengatakan bahwa :  
"money laundering" merupakan suatu cara untuk mengedarkan hasil

---

<sup>2</sup> Bambang Setijoprodjo, *Money Laundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan*, di Seminar Tentang *Money Laundering* diselenggarakan oleh BPHN - Departemen inatan, 4 - 3 - 1997, hal. 1.

kejahatan ke dalam suatu peredaran uang yang sah dan menutupi asal usul uang tersebut.<sup>3</sup>

Dengan demikian secara umum, *money laundering* merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas kejahatan.

Melihat definisi di atas, maka *money laundering* atau pencucian uang pada intinya melibatkan asset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Melalui *money laundering* pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal.

### **Mekanisme Pencucian Uang**

Kegiatan pencucian uang melibatkan aktivitas yang sangat kompleks. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali dilakukan bersama-sama yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*.<sup>4</sup> *Placement* diartikan sebagai upaya untuk menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan. Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik dari uang tunai baik melalui penyelundupan uang tunai dari satu negara lain, menggabungkan

---

<sup>3</sup> Loc. Cit.

<sup>4</sup> *Money Laundering : A Banker's Guide To Avoiding Problems*, occ.treas.gov/laundern, p.2.

antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan melakukan penempatan uang giral ke dalam sistem perbankan misalnya deposito bank, cek atau melalui real estate atau saham-saham atau juga mengkonversikan ke dalam mata uang lainnya atau transfer uang ke dalam valuta asing.

*Layering* diartikan sebagai memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau alokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/mengelabui sumber dana “haram” tersebut. *Layering* dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.

Adapun *integration* yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai “*legitimate explanation*” bagi hasil kejahatan.<sup>5</sup> Disini uang yang diputihkan melalui *placement* maupun *layering* dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang diputihkan. Pada tahap ini uang yang telah diputihkan dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum.

---

<sup>5</sup> Ibid.

Anwar Nasution pakar Ekonomi dengan bahasa lain juga mengemukakan bahwa proses pemutihan (pencucian) uang dilakukan melalui tiga tahap, yaitu .<sup>6</sup>

Tahap *pertama*, disebut sebagai “*immersion*” atau “membenamkan” uang haram sehingga tidak tampak dari permukaan. Dalam proses ini uang hasil kejahatan ditempatkan dan dikonsolidasikan dalam bentuk dan tempat yang sulit dilacak oleh sistem pengawasan petugas hukum. Karena menggunakan sistem pembayaran yang sah, proses “pembenaman” uang haram dilakukan melalui rekening koran, wesel pos (*postal orders*), *traveler's chek*, surat berharga atas unjuk, maupun instrumen keuangan lainnya yang mudah dikonversikan ke dalam bentuk uang tunai dan tabungan pada sistem perbankan.

Instrumen lain yang sering digunakan menutupi pemilik maupun sumber uang haram adalah penggunaan transaksi kegiatan yang memang sulit dilacak dan dipajaki. Kesukaran itu mungkin bersumber dari sifat transaksi pada kegiatan tersebut yang tidak memerlukan identitas pembeli maupun penjual komoditi yang diperjual belikan. Berapa besarnya volume maupun nilai transaksi sulit ditaksir karena transaksi bersifat *cash and carry* ataupun karena tidak ada suatu standar harga yang baku. Pelacakan semakin sulit dilakukan jika transaksi lebih banyak menggunakan uang tunai. Kegiatan seperti itu, antara lain, adalah perdagangan eceran. Termasuk di dalamnya

---

<sup>6</sup> Anwar Nasution, *Peranan Sistem Keuangan Dalam Pemberantasan Money Laundering*, Makalah Seminar Tentang *Money Laundering* oleh BPHN – Departemen Kehakiman, 4-3-1997, hal. 5.

kegiatan jasa seperti restoran, bar dan klab malam, persewaan alat-alat hiburan maupun perjudian serta pelacuran yang dilegalisir. Perdagangan batu mulia serta permata, barang antik, uang maupun perangko tua, yang tidak memiliki standar harga yang baku, juga termasuk dalam kelompok ini. Jika sistem perbankan tidak dapat dipercaya, msy kembali pada sistem pembayaran tradisional. Erosi kepercayaan masyarakat kepada sistem perbankan terjadi karena kegoncangan sistem politik-sosial ataupun karena adanya sistem devisa yang dikontrol ketat oleh pemerintah. Dalam sistem tradisional itu, uang maupun barang berharga dijual ataupun diagunkan oleh pemiliknya kepada pedagang emas ataupun valuta asing di suatu tempat dan negara. Pada gilirannya, pedagang tersebut memberikan surat bukti penyimpanan uang maupun barang berharga itu. Surat bukti tersebut dapat diuangkan kembali oleh pemegangnya pada jaringan yang dimiliki oleh pedagang emas dan valuta asing yang mengeluarkan surat berharga itu di tempat lain di manca negara. Biaya transaksi yang dipungut oleh jaringan pedagang seperti itu lebih mahal dari pada biaya yang dipungut oleh sistem perbankan. Masyarakat India menyebut sistem seperti itu sebagai *hundi*, *chop* ataupun *hawalah*, sedangkan masyarakat Cina menamakannya *fei ch'ien* atau uang terbang.

Pada tahap *kedua*, uang haram dipindah-pindahkan dari satu ke rekening bank di dalam negeri maupun melalui transaksi antar negara. Tujuan transaksi tersebut adalah untuk semakin menutup identitas pemilik yang sebenarnya maupun sumber uang haram itu. Untuk melayani transaksi

seperti itu, pemilik uang haram membentuk prasarana jaringan transaksi internasional yang sangat kompleks. Prasarana dapat berupa perusahaan gadungan yang sengaja dibentuk dan beroperasi di manca negara, apakah dimiliki sendiri oleh pemilik uang haram maupun cukup dikontrol olehnya. Prasarana tersebut termasuk jaringan pedagang emas dan valuta asing pada sistem *hundi* maupun *fei ch'ien* yang telah diuraikan di atas. Transaksi dapat juga dilakukan melalui rekening perwakilan (*trust*) milik pengacara, akuntan, maupun klien pemilik uang haram.

Tahap *ketiga*, proses pemutihan uang haram disebut sebagai proses pengeringan ataupun reprivatisasi dan integrasi. Pada tahap ini, uang haram yang telah di "cuci" bersih itu dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk yang menurut aturan hukum, telah berubah menjadi legal dan sudah membayar kewajiban pajak.

Kompleksitas tiap tahap proses pemutihan uang dan besar kecilnya jaringan prasarana yang diperlukan untuk mendukungnya tergantung pada volume uang haram yang akan di "putih" kan. Uang haram berjumlah besar hasil kejahatan kelompok *gangster* Al Capone, diputihkan oleh Meyer Lansky melalui perjudian legal maupun *offshore banking*. Untuk keperluan tersebut, kelompok Al Capone mengembangkan pusat perjudian, pelacuran serta bisnis hiburan di Las Vegas dan Nevada, dua negara bagian yang melegalisasi bisnis seperti itu. Dalam sekejap mata, Meyer Lansky membuat Havana (pada masa pemerintahan Presiden Fulgencio Batista) menjadi pusat perjudian, hiburan dan *offshore banking*. Tujuan utama *offshore banking*,



adalah untuk menjadi *pelabuhan transito* uang haram. Setelah Cuba jatuh ke tangan rejim komunis di bawah Presiden Fidel Castro, Meyer Lansky pindah ke Bahama yang dikembangkannya sebagai pusat perjudian dan hiburan serta *offshore* banking baru.<sup>7</sup>

Dewasa ini, pusat-pusat *offshore banking* telah menjalar luas ke berbagai negara miskin lainnya. Tadinya, negara –negara yang populer menjadi tempat penyimpanan uang haram hanya Swiss, Luxemburg, Lichtenstein, Hong Kong dan Singapura. Daftar ini semakin menjadi bertambah dengan masuknya Panama, Intille Belanda dan Cayman Islands yang sekarang nyatanya paling disukai oleh bank-bank Indonesia, swasta maupun BUMN. Selain menawarkan bebas pajak, negara-negara miskin itu tidak mempunyai infrastruktur yang memadai untuk mengawasi bank maupun transaksi keuangan masyarakat sehingga merupakan tempat yang sangat ideal bagi kegiatan pemutihan atau pencucian uang.

Secara lebih rinci, Bambang Setijoprodjo, menyatakan bahwa skim pemutihan uang sangat komplek dan rumit. Sarana yang digunakan para pelaku bervariasi meliputi antara lain :<sup>8</sup>

a. Perusahaan-perusahaan

Perusahaan-perusahaan yang didirikan dari hasil kejahatan untuk maksud transaksi fiktif. Hasil keuntungan yang diperoleh seolah-olah berasal dari perusahaan tersebut.

b. Emas dan barang antik

---

<sup>7</sup> Ibid, hal. 10.

<sup>8</sup> Bambang Setijoprodjo, Op. Cit., hal. 2-4.

Emas dan barang antik dijadikan sarana mengubah uang yang dimiliki dari hasil kejahatan. Pada saat yang sama, harta tersebut akan diuangkan kembali dengan mudah.

c. Realestate

Realestate yang dibeli dan disewakan juga merupakan sarana pemutihan uang hasil kejahatan. Dalam menyalurkan uang hasil pemutihan tersebut, pada umumnya pelaku mendirikan agen realestate, menunjuk perusahaan pemborong dan memanfaatkan pengacara.

d. *Deposit Taking Institutions (DTI)*

Kepopuleran DTI seperti *chartered bank*, *trust companies* dan *credit union* di Canada, sebagai sarana pemutihan uang terutama disebabkan pelayanan yang ditawarkan. DTI memiliki beberapa atribut yang sangat menarik untuk sarana pemutihan uang karena di dalamnya termasuk sistem kliring yang efisien lokasinya yang secara politis dan ekonomi berada dalam negara yang stabil, hubungan internasional dan reputasinya yang terkenal dalam memegang teguh rahasia bank. Kasus pemutihan uang yang melibatkan DTI antara lain transfer melalui telex dan surat berharga, penukaran valuta asing, pembelian obligasi pemerintah dan *treasure bills*.

e. Institusi Penanaman Uang Asing

Dari kasus-kasus yang terjadi terlihat bahwa beberapa institusi penanaman uang asing menawarkan jasanya sebagai perantara organisasi kejahatan dengan lembaga perbankan dalam mendepositokan uangnya.

f. Pasar Modal

Pemutihan uang dalam pasar modal dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

Pertama, jual beli surat berharga oleh para pelaku melalui perusahaan perantara. Jual beli di pasar modal memberikan kesempatan untuk mengkonversikan dana yang tidak sah menjadi aset yang sangat likuid dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas pelaku, misalnya dengan menggunakan rekening orang tertentu.

Kedua, hasil kejahatan diinvestasikan dalam perusahaan swasta dan kemudian perusahaan tersebut *go publik* dengan menjual saham-sahamnya.

g. Lembaga Keuangan

Hampir semua jasa yang ditawarkan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya dapat digunakakan untuk melakukan kegiatan pencucian uang.

Pemanfaatan bank dalam pemutihan uang dapat berupa :

- 1) menukarkan uang hasil kejahatan, misalnya menukarkan uang pecahan kecil menjadi uang pecahan besar;
- 2) menukar uang hasil kejahatan menjadi simpanan dengan nama palsu;
- 3) menggunakan *safe deposit box* untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan;
- 4) menyediakan fasilitas transfer, sehingga uang hasil kejahatan dapat dipindahkan ke tempat yang diinginkan;

- 5) menggunakan *electronic fund transfer* untuk membayar barang yang tidak sah seperti narkoba atau untuk menyimpan dan mendistribusikan hasil dari transaksi yang tidak sah.

Untuk mengetahui lebih jauh metode yang digunakan dalam pencucian uang, dapat pula dikutip "*the money laundering methods*"<sup>9</sup> sebagaimana dimuat dalam salah satu artikel untuk pelatihan dalam *Investigation Training Institute* yang menyatakan bahwa secara umum pencucian uang melibatkan 3 (tiga) metode yang bertujuan untuk manipulasi dan mengubah status dana ilegal menjadi dana legal. Ketiga metode tersebut adalah :

- (1) *schemes to buy and sell assets, goods or services;*
- (2) *offshore conversion schemes; and*
- (3) *legitimate business conversion schemes.*

Metode *buy and sell conversions* dilakukan melalui jual beli barang-barang dan jasa. Sebagai contoh, *real estate* atau aset lainnya dapat dibeli dan dijual kepada *coconspirator* yang menyetujui untuk membeli/menjual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang sebenarnya dengan tujuan untuk memperoleh *fees* atau *discount*. Kelebihan harga dibayar dengan menggunakan uang ilegal dan kemudian dicuci melalui transaksi bisnis. Dengan cara ini setiap aset, barang-barang atau jasa dapat diubah seolah-olah menjadi hasil yang legal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank.

---

<sup>9</sup> *Tracing Illegal Proceeds Workbook, Edward R. Burke, Investigation Training Institute, copyright 2001, p.17.*

Dalam metode *offshore conversions* dana ilegal dialihkan ke wilayah yang merupakan *tax haven money laundering centers* dan kemudian disimpan di bank atau lembaga keuangan yang ada di wilayah tersebut. Dana tersebut lalu digunakan antara lain untuk membeli aset dan investasi (*fund investments*). Di wilayah atau negara yang merupakan *tax heaven* terdapat kecenderungan hukum perpajakan yang lebih longgar, ketentuan rahasia bank yang cukup ketat dan prosedur bisnis yang sangat mudah sehingga memungkinkan adanya perlindungan bagi kerahasiaan suatu transaksi bisnis, pembentukan dan kegiatan usaha *trust fund* maupun badan usaha lainnya. Kerahasiaan inilah yang memberikan ruang gerak yang leluasa bagi pergerakan dan melalui berbagai pusat keuangan di dunia. Dalam hal ini para pengacara, akuntan, dan pengelola dana biasanya sangat berperan dalam metode *offshore conversions* dengan memanfaatkan celah yang ditawarkan oleh ketentuan rahasia bank dan rahasia perusahaan.

Metode yang ketiga yaitu *legitimate business conversions* dipraktekkan melalui bisnis atau kegiatan usaha yang sah sebagai sarana untuk memindahkan dan memanfaatkan hasil kejahatan. Dalam hal ini kejahatan dikonversikan melalui transfer, cek, atau instrumen pembayaran lainnya yang kemudian disimpan di rekening bank atau ditarik atau ditransfer lebih lanjut ke rekening bank lainnya. Metode ini memungkinkan pelaku kejahatan menjalankan usaha atau bekerjasama dengan mitra bisnisnya dan menggunakan rekening perusahaan yang bersangkutan sebagai tempat penampungan untuk hasil kejahatan yang dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, maka setiap transaksi yang dilakukan oleh individual/pribadi atau perusahaan, setiap bentuk kegiatan usaha maupun rekening yang terdapat di bank-bank dapat digunakan sebagai sarana untuk melancarkan kegiatan pencucian uang.

## B. Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana dan Sanksi Pidana

### 1. Tindak Pidana

Di dalam masyarakat yang mengalami modernisasi,<sup>10</sup> perkembangan itu akan diikuti oleh perkembangan lainnya, antara lain di bidang hukum. Perubahan yang terjadi akibat perkembangan itu akan mengakibatkan perubahan nilai. Dalam pengertian yuridis, perubahan nilai menyebabkan perubahan nilai yuridis yang oleh Oemar Seno Adji dijelaskan sebagai berikut :

“Perubahan atau pembaharuan dalam perundang-undangan di dunia adalah sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan untuk mengadakan..... kriminalisasi perbuatan.... Dekriminalisasi.”<sup>11</sup>

Kriminalisasi<sup>12</sup> perbuatan disini maksudnya adalah suatu proses yang menjadikan suatu perbuatan yang tadinya bukan merupakan tindak

---

<sup>10</sup> Modernisasi diartikan sebagai “proses penyesuaian diri dengan keadaan konstilasi dunia pada waktu ini” (Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 27)

<sup>11</sup> Oemar Seno Adji, *Herziening, ganti Rugi, Swap, Perkembangan Delik*, Erlangga, Jakarta, 1981, hal. 266.

<sup>12</sup> Sudarto, *Hukum dan hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 31-32: dengan kriminalisasi dimaksudkan proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya Undang-undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana. Lebih lanjut dikatakan oleh Sudarto bahwa dalam hal mengadakan kriminalisasi pembentuk Undang-undang harus menyadari daya kemampuan dari hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan (*ibid*, hal. 152).

pidana karena belum diatur di dalam Undang-undang hukum pidana, kemudian karena perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat bahkan dapat membahayakan kehidupan manusia, maka dirumuskan di dalam undang-undang hukum pidana dan diancam dengan pidana, sehingga perbuatan dimaksud dinyatakan sebagai tindak pidana.

Di dalam hukum pidana dikenal atas *Nullum Delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang artinya “tiada delik, tiada hukuman tanpa suatu peraturan yang terlebih dahulu menyebut perbuatan yang bersangkutan sebagai suatu delik dan yang memuat suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas delik itu.” Asas ini dimuat di dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi: “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.<sup>13</sup> Dengan asas ini diperoleh suatu kepastian hukum, bahwa seseorang dapat dipidana bilamana dapat dinyatakan salah (telah melakukan tindak pidana) dan telah ada aturannya terlebih dahulu.

Sejalan dengan hal tersebut, maka setiap kitab undang-undang hukum pidana memuat dua hal yang pokok,<sup>14</sup> pertama memuat pelukisan

---

<sup>13</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990, hal. 22 : Jika diperinci, Pasal 1 ayat (1) berisi dua hal yaitu:

a. Suatu tindak pidana harus dirumuskan/disebutkan dalam perturan undang-undang,  
b. Peraturan undang-undang ini harus ada sebelum terjadinya tindak pidana.

<sup>14</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan masyarakat Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, *op cit*, hal. 31. Tentang hal ini Muladi mengatakan bahwa dalam konteks hukum pidana material, permasalahan akan berkisar pada tiga permasalahan pokok hukum pidana yakni perumusan perbuatan yang dilarang (kriminalisasi), pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan sanksi yang diancamkan, baik pidana maupun tindakan (Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1995, hal. 50).

Mengenai ketiga masalah ini Packer merumuskannya sebagai “*Offence, guilt and punishment*” (H.L.Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, Stanford California, 1998, hal. 17).

dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan juga para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana. Kedua, menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.

Sehubungan dengan kriminalisasi suatu perbuatan, Sudarto mengemukakan beberapa kriteria yaitu bahwa perbuatan itu tidak dikehendaki dengan ukuran bahwa perbuatannya itu merugikan atau mendatangkan korban. Selain itu harus pula memperhatikan "*cost benefit principle*", artinya kriminalisasi sesuatu perbuatan harus seimbang dengan hasilnya, jangan sampai aparat penegak hukum "*over belast*" memikul beban yang terlalu berat sehingga peraturan itu tidak efektif lagi.<sup>15</sup>

Berbicara mengenai masalah kebijakan, pada hakikatnya kebijakan hukum pidana<sup>16</sup> (*penal policy*) tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan

---

<sup>15</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, op cit, al. 100-101.

Menurut Bassiouni yang dikutip Barda Nawawi Arief (dalam Muladi dan Barda Nawawi. A, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana Alumni*, Bandung, hal. 161-162): Keputusan melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada kebijakan yang mempertimbangkan bermacam faktor, termasuk:

*the proportionality of the means used in relationship to the outcome obtained,*  
*the cost analysis of the outcome in relationship to the objectives sought,*  
*the appraisal of the objective sought in relationship to other priorities in the allocation of resources of human power,*  
*the social impact of criminalization in terms of its secondary effects.*

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1996, hal. 28: Kebijakan atau politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Menurut Marc Ancel (*ibid*, d. 23), *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan domain tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.



kriminal<sup>17</sup> (*criminal policy*), yaitu upaya rasional untuk menanggulangi kejahatan. Mengenai konsep rasionalitas di bidang politik kriminal, Karl O. Christiansen mengemukakan: "...the characteristic of a rational criminal policy is nothing more than the application of rational methods."<sup>18</sup>

Sebagai usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan, kebijakan kriminal atau politik kriminal mempunyai tiga pengertian<sup>19</sup> yaitu dalam arti sempit, luas, dan arti yang paling luas. Dalam arti sempit, kebijakan kriminal merupakan keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari realisasi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kebijakan kriminal dalam arti luas, adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi, sedangkan dalam arti paling luas adalah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui pembentukan undang-undang dan tindakan dari badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Mengenai tujuan kebijakan kriminal dikemukakan di dalam "summary report" dari 34<sup>th</sup> International Training Course yang diselenggarakan oleh UNAFEI di Tokyo Tahun 1973:

Most of the group members agreed after discussion that protection of the society could be accepted as the final goal of criminal policy, although not the ultimate aim of society, which might perhaps be described by term like "happiness of the citizens", "a wholesome and cultural living", "social welfare" or "equality."<sup>20</sup>

---

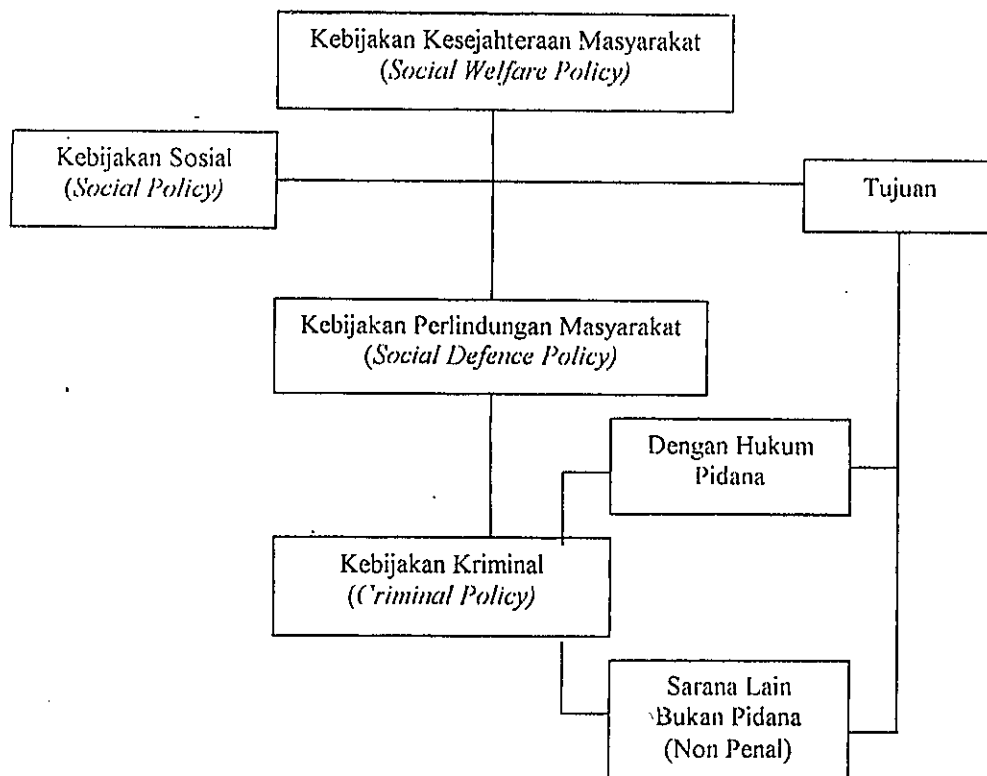
<sup>17</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, op cit, hal. 43.

<sup>18</sup> Barda Nawawi arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, op cit, hal. 94.

<sup>19</sup> Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 113-114.

<sup>20</sup> Summary Report: dari 34<sup>th</sup> International Training Course, dalam Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif Dalam Menanggulangi Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Undip, Semarang, hal. 31-32.

Kebijakan kriminal memiliki hubungan yang erat dengan kebijakan sosial, sebab sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan, pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*), yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*). Keterkaitan hubungan itu dapat dilihat pada skema dibawah ini :<sup>21</sup>



Dari skema di atas, tergambar jelas adanya keterpaduan antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial ataupun keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan jalur penal dan non penal dalam upaya mencapai kesejahteraan kehidupan manusia. Dengan demikian

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, op cit, hal. 3.

keseluruhan kebijakan yang ditempuh di dalam rangka menanggulangi kejahatan pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.

Mengenai kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), terdapat dua masalah sentral yang menurut Barda Nawawi Arief meliputi masalah penentuan:<sup>22</sup>

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar.

Yang dapat disebut sebagai tindak pidana (delik) adalah “perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”<sup>23</sup>

Menurut ujud atau sifatnya, tindak pidana ini adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang anti sosial.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 32.

<sup>23</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 54. Menurut Roeslan Saleh, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundangan pidana dinyatakan sebagai perbuatan terlarang (Roeslan Saleh, *Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Lokakarya Masalah Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, BPHN-Depkeh, 1982, hal. 3).

Oleh D. Schaffmeister, *et al*, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal. 27, dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkungan rumusan hukum, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

Oleh Clark Marshall dikatakan : *A crime is any act or omission prohibited by Law for the protection of the public, and made punishable by the state in a judicial proceeding in its own name. It is a public wrong as distinguished from a mere private wrong or civil injury to an individual* (A. Zah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 89).

<sup>24</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 13.

Di Inggris, antara perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana (*actus reus*) di satu pihak dipisahkan dengan pertanggungjawaban (*mens rea*) di lain pihak. Sejalan dengan hal itu, Moeljatno mengatakan,<sup>25</sup> tindak pidana ini kiranya dapat disamakan dengan istilah Inggris "*criminal act*". Pertama, karena *criminal act* juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan lain perkataan akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum. Kedua, karena *criminal act* juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*. Untuk adanya *criminal liability* (untuk dapat dipidanya seseorang) selain melakukan *criminal act*, orang itu harus mempunyai kesalahan.

Pendapat Moeljatno tersebut ternyata telah diikuti oleh Tim Penerjemah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BPHN Departemen Kehakiman, yang menyatakan bahwa :<sup>26</sup> "meskipun dipergunakan istilah tindak pidana (*actus reus*), harus dibedakan dan dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana".

Untuk menetapkan sesuatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang, merupakan tugas pemerintah dan pembuat undang-undang. Namun tidak berarti semua perbuatan yang melawan hukum atau bersifat merugikan masyarakat dapat disebut sebagai tindak pidana dan

---

<sup>25</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Op. Cit., hal. 57.

<sup>26</sup> Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, Armico, Bandung, 1995, hal. 114. Pengertian yang diberikan oleh Tim Pengkajian Hukum Pidana Nasional adalah : Perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang ang dan diancam dengan pidana (Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, dar Maju, Bandung, 2000, hal. 35).

dapat diberi sanksi pidana.<sup>27</sup> Atau hanya perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian yang besar saja yang dijadikan tindak pidana.<sup>28</sup> Penentuan ini harus dilakukan dengan rasional dan bijaksana. Selain disesuaikan dengan peraturan hukum yang hidup di dalam masyarakat, juga dipengaruhi oleh pandangan apakah ancaman dan penjatuhan pidana itu merupakan jalan yang utama untuk mencegah dilanggarnya larangan tersebut.

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) adalah salah satu bentuk tindak pidana yang timbul seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, bahkan merupakan kejahatan lintas negara/transnasional. Perkembangan di dalam masyarakat dipastikan memberikan pengaruh terhadap perubahan dan perkembangan kualitas tindak pidana. Sudarto mengatakan,<sup>29</sup> dapat dipastikan bahwa kemajuan teknologi mempunyai pengaruh terhadap pola pelaksanaan kejahatan. Cara dilaksanakannya kejahatan lebih "*sophisticated*".

---

<sup>27</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Op. Cit., hal. 42 : untuk mengenakan *poena* atau pidana diperlukan undang-undang (pidana) terlebih dahulu. Pembentuk undang-undanglah yang menetapkan peraturan tentang pidananya, tidak hanya tentang *crimen* atau *delictum*-nya, ialah tentang perbuatan mana yang dapat dikenakan pidana.

Sedangkan menurut Roeslan Saleh, dua segi utama dari hukum pidana yaitu menentukan apakah perbuatan seseorang merupakan tindak pidana atau tidak, dan menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidak (Roeslan Saleh, *Tentang Tindak pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Op. Cit., hal. 5).

<sup>28</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Op. Cit., hal. 13.

<sup>29</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Op. Cit., hal. 48. Latar belakang menjadikannya kegiatan pencucian uang sebagai suatu tindak pidana, kemungkinan besar disebabkan karena kurang berhasilnya upaya pemberantasan tindak pidana tertentu seperti perdagangan obat terlarang, sehingga dirasa perlu untuk menjajagi kembali untuk meneliti siapa dan melakukan apa saja yang dapat dilakukan dalam kaitannya dengan masalah perdagangan obat terlarang tersebut. Pada awalnya hanya pemakai dan penjual saja namun karena dalam kenyataannya kurang efektif pemberantasannya, maka pihak yang melakukan perbuatan pencucian uang hasil kejahatan asal beli obat terlarang juga dapat dikenakan sanksi ( Bambang Setijoprodjo, *Money Laundering dan Undang-undang Dalam Rangka Pengaturan*, Op. Cit., hal. 9).

Melihat perkembangan ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam Konggres ke-6 tentang *Prevention of Crime and The Treatment of offenders* di Caracas tahun 1980 berpendapat bahwa antara pembangunan dan kejahatan terdapat hubungan dengan saling berpengaruh yang melahirkan kriminalisasi sekaligus dekriminalisasi. Oleh karena itu pasal-pasal undang-undang hukum pidana harus diperluas, mencakup tindakan-tindakan disengaja yang merusak perekonomian dan kesejahteraan nasional (dalam konteks ini adalah TPPU).<sup>30</sup>

Pencucian uang oleh dunia internasional digolongkan sebagai tindak pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 Ayat (1) "*United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*" (Konvensi PBB) yang disahkan pada tanggal 19 Desember 1988 di Vienna. Dengan kata lain negara anggota PBB yang meratifikasi harus menggolongkan tindakan pemutihan uang sebagai tindak pidana dalam hukum nasionalnya. Konvensi tersebut berlaku efektif sejak November 1990 dan telah diratifikasi oleh berbagai negara anggota PBB.

Banyak negara telah mengadakan peraturan perundang-undangan secara tegas mengenai kegiatan pencucian uang dengan mengkategorikannya sebagai tindak pidana. Misalnya :

a. Amerika Serikat

Amerika Serikat telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan tentang pencucian uang antara lain *Money Laundering Control Act of*

---

<sup>30</sup> Kunarto, *Ikhtisar Implementasi HAM Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1996, hal. 23-24.

1986. Undang-undang tersebut menetapkan dua macam tindak pidana yang berhubungan dengan pencucian uang, yaitu "*laundering of monetary instrument* " dan "*engaging in monetary transaction in property derived from specified unlawful activity*" (18 US Code Section 1956-1957). Sebagai salah satu sarana untuk memantau kegiatan pencucian uang, bank diwajibkan untuk melaporkan satu atau beberapa transaksi dalam satu hari yang bernilai lebih dari US\$ 10.000 kepada bank-bank telah dikeluarkan buku pedoman yang berjudul "*Money Laundering : A Banker's Guide to Avoiding Problem*" oleh US Comptroller of the Currency, Washington D.C., tahun 1989.

b. Inggris

Inggris memiliki beberapa undang-undang yang berkaitan dengan pencucian uang, antara lain *Drug Trafficking Act 1986*. Berdasarkan peraturan yang berlaku di Inggris, orang yang membantu *drug trafficker* menikmati hasil kejahatan atau memudahkan penguasaan hasil tindak pidana tersebut, diancam dengan hukuman penjara maksimum 14 tahun; Pada tanggal 10 Desember 1990, Panitia Kerja yang dibentuk oleh British Bankers Association (BBA), the Building's Society Association (BSA) dan aparat penegak hukum, di bawah pimpinan Bank of England telah mengeluarkan pedoman pengembangan *the Basle Statement of Principle on Money Laundering*, yang antara lain berisikan pola praktek perbankan yang dapat digunakan untuk memberantas pencucian uang.

c. Hongkong

Hongkong juga memiliki *Drug Trafficking (Recovery of Proceeds) Ordinance 1989* yang memungkinkan penegak hukum dan pengadilan melacak, membekukan dan menyita kekayaan pelaku kejahatan dan juga memerintahkan pengembalian kekayaan hasil kejahatan tersebut. Bagi perbankan, The Hongkong Association of Banks telah mengeluarkan *guidelines* sebagai pelaksanaan Undang-undang tersebut, misalnya bank diharuskan untuk menunjuk pejabat tertentu yang bertanggung jawab atas pelaporan.

d. Swiss

Pada tahun 1977 Swiss National Bank dan The Swiss Bankers Association menyepakati "*Convention de Dilligence*" yang antara lain mewajibkan bank untuk mengetahui identitas nasabah yang memanfaatkan fasilitas *safe deposit box*. Selain itu, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Swiss telah mencantumkan ketentuan yang mengancam tindak pidana pencucian uang dengan hukuman penjara dan denda, dan mengancam orang yang tidak meminta identitas *beneficial owners* dari dana yang ada di bank.

Di Indonesia, walaupun agak terlambat, sudah menunjukkan keikutsertaan Indonesia dalam upaya penanggulangan *money laundering* yang sudah lama menjadi perhatian dunia Internasional dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 (UU TPPU), yang kemudian diamandemen dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian



Uang, tanggal 13 Oktober 2003. Dalam UU TPPU ditentukan tindak pidana pencucian uang dalam Bab II yaitu Tindak Pidana Pencucian Uang; dan Bab III berupa Tindak Pidana yang berkaitan dengan TPPU.

## 2. Pertanggungjawaban Pidana

Kesalahan, pertanggungan jawab dan pidana adalah ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan percakapan sehari-hari, dalam moral, agama, dan hukum. Tiga unsur itu berkaitan satu dengan yang lain, dan berakar dalam satu keadaan yang sama, yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan-aturan (hukum perdata, hukum pidana, aturan moral dan sebagainya).

Kesalahan merupakan masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang melakukan kesalahan, apabila pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi masyarakat patut dicela. Dengan demikian dapat dipidananya seseorang tergantung pada dua hal,<sup>31</sup> yaitu :

- a. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau harus ada unsur melawan hukum, jadi ada unsur objektif.

---

<sup>31</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hal. 31. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Op. Cit., hal. 48 : Hukum pidana yang berlaku sekarang meskipun hasil dari aliran neoklasik dengan adanya pengaruh aliran modern disebut juga "*schuldstrafrecht*" (hukum pidana kesalahan), yang mengandung arti bahwa untuk adanya pemidanaan harus ada kesalahan pada pembuat (*azas nulla poena sine culpa*).

Dalam hukum pidana Inggris, asas ini dikenal dengan "*Actus non facit reum, nisi mens sit rea*". Maksudnya adalah sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat. Dari hal itu diambil suatu ekspresi *actus reus* ini berarti kesengajaan atau kelalaian yang dilarang oleh hukum pidana. *Actus reus* harus dilengkapi dengan *mens rea*, dan harus dibuktikan dalam penuntutan bahwa tersangka telah melakukan *actus reus* dengan disertai *mens rea*, yaitu niat jahat atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan perkara yang dituduhkan kepadanya Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 40.)

b. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Jadi ada unsur subjektif.

E. Utrecht menyatakan bahwa adanya suatu kelakuan yang melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan hukuman. Di samping kelakuan yang melawan hukum itu, harus juga ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Pembuat (*dader*) harus bersalah (*schuldhebben*), bersalah itu bertanggung jawab pidana.<sup>32</sup>

Lebih lanjut dikatakan oleh Utrecht, menurut etika tiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Tetapi dalam bidang hukum pidana, hanya kelakuan yang dapat menyebabkan hakim-hakim pidana menjatuhkan hukuman dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat. Pertanggungjawaban itu adalah pertanggungjawaban pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, Roeslan Saleh mengatakan bahwa dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan, apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Bachtiar Agus Salim, *Masalah Pertanggungjawaban Pidana*, Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Bina Cipta, Bandung, 1980, hal. 103-104.

Alf Ross (dalam Mustafa Abdullah, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 33) mengemukakan pendapatnya sekitar apa yang dimaksud seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya (*on guilt, responsibility, and punishment*).

<sup>33</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Op. Cit., hal. 75.

Untuk memberikan arti tentang kesalahan yang merupakan syarat untuk menjatuhkan pidana, ada beberapa pendapat antara lain :<sup>34</sup>

- a. Mezger mengatakan : kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana (*Schuld ist der Erbegriff der Vorraussetungen, die aus der Straftat einen personalinlichen Verwurf gegen den tater begrunden*).
- b. Simons mengartikan kesalahan itu sebagai pengertian yang "Social-ethisch" dan mengatakan : Sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana ia berupa keadaan psychisch dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dalam arti bahwa berdasarkan keadaan psycisch (jiwa) itu perbuatannya dicelakan kepada pembuat.
- c. Van Hamel mengatakan : "kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psychologis perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya : Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*Schuld is de verantwoordelijkheid rechtens*)".
- d. Pompe mengatakan : "Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Kesalahan ini dapat dilihat dari dua sudut : menurut akibatnya ia adalah hal yang dapat dicelakan (*verwijtbaarheid*) dan menurut hakekatnya ia adalah hal dapat dihindarkannya (*vermijtbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum.

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa kesalahan mengandung unsur pencelaan terhadap pelaku karena telah melakukan tindak pidana (yang telah dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan), dan mengandung unsur pertanggungjawaban dalam hukum pidana.

Mengenai kesalahan ini, dahulu orang berpandangan psychologis dalam arti kesalahan hanya dipandang sebagai hukuman psychologis (batin) antara pembuat dan perbuatannya. Kemudian pandangan ini ditinggalkan

<sup>34</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Op. Cit., hal. 88-89.

dan orang berpandangan normatif yang menurut Sudarto,<sup>35</sup> kesalahan seseorang tidak hanya berdasar sikap batin atau hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya, tetapi di samping itu harus ada unsur penilaian atau unsur normatif terhadap perbuatannya. Penilaian normatif artinya penilaian dari luar mengenai hubungan antara pembuat dengan perbuatannya. Penilaian dari luar ini merupakan pencelaan dengan memakai ukuran-ukuran yang terdapat masyarakat, ialah apa yang seharusnya diperbuat oleh pembuat. Di dalam pengertian ini sikap batin pembuat ialah, yang berupa kesengajaan dan kealpaan tetap diperhatikan, akan tetapi hanya merupakan unsur dari kesalahan atau unsur dari pertanggungjawaban pidana. Di samping itu unsur lain ialah penilaian mengenai keadaan jiwa pembuat, ialah kemampuan bertanggung jawab dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan.

Sejalan dengan hal itu diperoleh suatu penegasan bahwa untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya seseorang, harus dipenuhi beberapa syarat,<sup>36</sup> yakni :

1. melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum;
2. mampu bertanggung jawab;
3. melakukan perbuatan dengan sengaja atau karena kealpaannya; dan
4. tidak adanya alasan pemaaf.

Menurut hemat penulis, yang penting di dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang adalah pertama, apakah perbuatan seseorang itu telah

---

<sup>35</sup> Ibid, hal. 90-91.

<sup>36</sup> Bachtiar Agus Salim, *Masalah Pertanggungjawaban Pidana*, Op. Cit., hal. 105.

terbukti sebagai tindak pidana sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tertulis yang berlaku pada saat atau sebelum perbuatan itu dilakukan. Kedua, apakah orang yang melakukan tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Mengenai tindak pidana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang tertulis, hal ini mengacu kepada setiap peraturan perundang-undangan yang merumuskan tindak pidana di dalamnya, termasuk undang-undang yang ada di luar KUHP.

Menurut Simons, kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila ia:

- a. mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
- b. dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.<sup>37</sup>

Bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara syah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu. Pidana dapat dikenakan secara syah berarti bahwa untuk tindakan itu telah ada aturannya dalam sistem hukum tertentu, dan sistem hukum tersebut berlaku

---

<sup>37</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, *op cit*, hal. 93.

atas perbuatan itu. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tindakan ini dibenarkan oleh sistem hukum yang bersangkutan.

Berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana ini, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya memastikan siapa pembuatnya tidaklah mudah.<sup>38</sup>

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief mengemukakan, setelah pembuat ditentukan, bagaimana selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidananya? Masalah pertanggungjawaban ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah pembuat (yang melakukan tindak pidana). Artinya pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah pembuat, tapi tidaklah selalu demikian. Masalah ini tergantung juga pada cara atau sistem

---

<sup>38</sup> Barda Nawawi Arief dalam Muladi dan Barda Nawawi A., *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, *op cit*, hal. 133.

Menurut Mustafa Abdullah, prinsip yang lebih fundamental itu adalah bahwa untuk pertanggungjawaban pidana harus ada yang disebut "*moral culpability*". Dan *moral culpability* dipandang tidak ada jika pada waktu dilakukannya perbuatan ada dan oleh hukum diakui adanya keadaan-keadaan memaafkan terhadap itu (Mustafa Abdullah, *Intisari Hukum Pidana*, *op cit*, hal.22).

Sehingga Jerome Hall, *ibid*, hal 23 mengatakan bahwa yang disebut *moral culpability* itu adalah suatu dasar dari pertanggung jawab dalam perbuatan pidana. Hall berpendapat bahwa *mens rea* adalah *voluntary doing of morality wrong act forbidden by penal law*.

perumusan pertanggungjawaban yang ditempuh oleh pembuat undang-undang.<sup>39</sup>

Konstruksi tersebut berlaku pula dalam hal tindak pidana dilakukan suatu korporasi tanpa spesifikasi atau identitas yang jelas. Kesulitan akan timbul dalam menentukan siapakah pembuatnya, sehingga membawa konsekuensi tentang masalah pertanggungjawabannya.

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban korporasi, terdapat sistem-sistem sebagai berikut :<sup>40</sup>

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat, dan pengurus bertanggung jawab; dan
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Dalam hal pengurus sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggung jawab, yang dipandang dilakukan oleh korporasi hanyalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan Anggaran Dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan korporasi adalah tindak pidana

---

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, op cit, hal. 135-136.

<sup>40</sup> Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN, *Himpunan Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana Tahun 1980/1981*, BPHN DepKeh RI, 1985, hal. 32-34.

Menurut Suprpto sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STH, Bandung, 1991, hal. 83: Korporasi dapat memiliki kesalahan, bila kesengajaan atau kelalaian terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alatnya. Kesalahan itu tidak bersifat individu, karena hal itu mengenai badan sebagai suatu kolektivitet. Dapatlah kiranya kesalahan itu disebut kesalahan kolektif yang dapat dibebankan kepada pengurusnya.

Maine menandakan bahwa bukan saja sekarang, korporasi yang berbentuk badan hukum dapat dipidana, melainkan sejak dahulu meskipun dengan nama yang berbeda dan juga dalam sifat serta bentuk dan pengungkapannya, korporasi bilamana dipidana bukanlah suatu hal yang aneh (Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Eresco, Bandung, 1994, hal. 33).

yang dilakukan oleh seseorang tertentu sebagai pengurus dari korporasi tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah "*onpersoonlijk*". Orang yang memimpin korporasi bertanggung jawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.

Mengenai korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab, motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana rupanya tidak cukup. Dalam delik-delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau diderita oleh saingan-saingannya, keuntungan dan atau kerugian-kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak akan sekali lagi melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Oleh karena korporasi tidak dapat dijatuhi pidana penjara, maka harus dicarikan pidana-pidana yang lain sifatnya dengan maksud agar korporasi dapat dipaksa mentaati aturan-aturan hukum.

Semenjak tahun 1976, Belanda menetapkan bahwa juga dalam hukum pidana umum (*commune strafrecht*), suatu korporasi dapat melakukan tindak pidana, dan oleh karena itu dapat dituntut dan dijatuhi



pidana sebagaimana termuat di dalam Pasal 51 KUHP Belanda sebagai berikut :<sup>41</sup>

1. Perbuatan pidana dapat dilakukan oleh perorangan dan oleh badan hukum;
2. Apabila suatu perbuatan pidana dilakukan oleh suatu badan hukum, tuntutan pidana dapat dilakukan dan dipidana serta tindakan yang tersedia dalam undang-undang dapat dijatuhkan kepada:
  - a. badan hukum, atau
  - b. terhadap mereka yang memerintahkan perbuatan serta juga terhadap mereka yang telah secara nyata memimpin lakukan perbuatan yang dilarang tersebut, atau
  - c. terhadap yang disebut dalam butir a dan b sekaligus.

Kegiatan yang dianggap sebagai tindak pidana korporasi, yang menimbulkan keresahan luas dalam masyarakat adalah tindak pidana yang menimbulkan kerugian besar. Kerugian ini tidak saja yang dapat dihitung dengan uang, tetapi juga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perekonomian yang berlaku. Dua kategori besar dapat diambil sebagai contoh<sup>42</sup>, yang pertama adalah penipuan terhadap masyarakat (*defrauding the public*), seperti: penentuan harga secara tidak wajar (*fixing prices*) dan berbohong tentang mutu atau khasiat barang (*misrepresenting product*). Sedangkan kategori yang lain adalah membahayakan masyarakat (*endangering the public*), seperti dalam hal pencemaran dan perusakan lingkungan atau membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja serta

---

<sup>41</sup> D. Schaffmeister, *et al*, *Hukum Pidana*, *op cit*, hal. 273.

Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, *op cit*, hal. 30: Tahun 1909 di Amerika menempatkan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana yaitu putusan "Supreme Court" dalam kasus New York Central and Hudson River R.R.V. United States.

Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan*, Erlangga, Jakarta, 1985, hal. 88: Di Inggris "Companies" itu bertanggung jawab dalam dua hal ialah secara "vicarious" dan dibawah doktrin identifikasi (*Identification doctrine*).

<sup>42</sup> Mardjono Reksodiputro, *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya*, Kumpulan Karangan Buku Kesatu, Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum, UI, Jakarta, 1995, hal. 104.

mengancam stabilitas perekonomian suatu negara. Semua kegiatan ini harus berhubungan dengan kegiatan perekonomian dan atau berkaitan dengan dunia bisnis.

Berkenaan dengan adanya korporasi yang melakukan TPPU, maka Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana Badan Pembinaan Hukum Nasional berpendapat bahwa untuk tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia, harus dimungkinkan penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap:

- a. badan hukum sendiri, atau
- b. badan hukum dan pengurusnya, atau
- c. pengurusnya saja<sup>43</sup>

Menurut pendapat Muladi<sup>44</sup>, korporasi dikualifikasikan sebagai subjek yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan di samping orang (pengurus), merupakan refleksi mengenai dua hal, yakni kemampuan korporasi melakukan tindak pidana dan kemampuan korporasi untuk dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

---

<sup>43</sup> Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPH, *Himpunan Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana Tahun 1980/1981*, *op cit*, hal. 27-28

<sup>44</sup> Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 7.  
Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, *op cit*, hal.29 mengutip pendapat A.Z. Abidin: Pembuat delik yang merupakan korporasi itu oleh Roling dimasukkan *funcioneel daderschap*, oleh karena korporasi dalam dunia modern mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi, pemberi kerja, produsen, penentu harga, pamakai devisa dan lain-lain.

### 3. Sanksi Pidana

Apabila mengadakan peninjauan terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia maka dapat dikemukakan tiga persoalan pokok : perbuatan pidana yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan masalah penjatuhan pidana. Sehubungan dengan itu, maka dalam melakukan pembaharuan hukum khususnya hukum pidana, perlu diketahui masalah pokok dari hukum pidana itu sendiri. Menurut Herbert L. Packer, tiga masalah pokok hukum pidana adalah :

- (1) *What conduct should be designated as criminal;*
- (2) *What determinations must be made before a person can be found to have committed a criminal offense;*
- (3) *What should be done with persons who are found to have committed criminal offenses.*<sup>45</sup>

Dalam melakukan pembaharuan hukum pidana tentu tidak terlepas dari persoalan-persoalan pokok dalam hukum pidana dan pidana. Dalam melakukan pembaharuan terhadap ketiga persoalan pokok dalam hukum pidana tersebut, juga tidak terlepas dari Kebijakan Legislatif/Formulatif, Kebijakan Yudikatif/Aplikatif dan Kebijakan Eksekutif/Administratif, karena dalam ketiga tahap kebijakan itu terkandung tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan, kekuasaan yudikatif/aplikatif dalam menerapkan

---

<sup>45</sup> Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968, hlm. 17.

hukum pidana dan kekuasaan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana".<sup>46</sup>

Penanggulangan kejahatan atau tindak pidana pencucian uang dengan hukum pidana berarti membahas pembaharuan hukum pidana di bidang kejahatan pencucian uang yang difokuskan pada kebijakan perumusan perbuatan pidananya, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidananya. Dengan kata lain pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan strategis yang diformulasikan dalam suatu peraturan perundang-undangan, yang disebut pula dengan kebijakan perundang-undangan.

Penggunaan hukum pidana sebagai satu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang kajian penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial. Dengan demikian masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan masalah kebijakan (*the problem of policy*)<sup>47</sup>. Oleh karena itu kita tidak boleh melupakan, bahwa hukum pidana atau lebih tepat sistem pidana itu merupakan bagian dari politik kriminal yaitu suatu usaha yang rasional dari masyarakat untuk melindungi kejahatan. Dan ini mencakup kegiatan pembentukan undang-undang pidana, aktivitas dari Kepolisian, Kejahatan,

---

<sup>46</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 30.

<sup>47</sup> Barda Nawawi Arief, *Op Cit.*, hal 17.

Pengadilan dan Aparat eksekusi, disamping usaha-usaha yang tidak menggunakan (hukum) pidana.<sup>48</sup> Menurut Marc Ancel, "Politik Kriminal ialah pengaturan atau penyusunan secara Rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat".<sup>49</sup>

Kebijakan hukum pidana dalam kerangka penanggulangan kejahatan dapat dirumuskan sebagai upaya bagaimana membuat atau membentuk peraturan hukum pidana dimasa mendatang secara efektif dan berdaya guna<sup>50</sup>. Sudarto mengartikan kebijakan hukum pidana melalui suatu badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan<sup>51</sup>

Kebijakan sanksi pidana akan dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap konkretisasi atau operasionalisasi atau fungsionalisasi hukum pidana yaitu :

1. Kebijakan Formulatif atau legislatif, yaitu tahap perumusan atau penyusunan hukum pidana.
2. Kebijakan aplikatif atau yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana.
3. Kebijakan administratif atau eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

Di antara ketiga tahap tersebut, tahap penetapan pidana merupakan tahap paling strategis. Tahap pertama ini diharapkan dapat memberi arah pada dua tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan dan pelaksanaan pidana.

---

<sup>48</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal 73.

<sup>49</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 1998, hal 157.

<sup>50</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung 1986, 153.

<sup>51</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, Hal 20.

Kalau uraian tahap penetapan pidana ini dibatasi pada kebijakan sanksi pidana, maka yang menjadi permasalahan adalah menetapkan jenis dan jumlah berat-ringannya pidana. Kebijakan sanksi pidana, merupakan suatu perencanaan yang terkandung di dalamnya kebijakan memilih dan menetapkan alternatif. Terkandung pula makna, bahwa pemilihan harus dilakukan berdasarkan pertimbangan yang rasional. Konsep rasionalitas di dalam politik kriminal, menurut Karl O. Christiansen adalah dengan merumuskan tujuan pemidanaan yang akan dicapai.<sup>52</sup>

Salah satu tujuan pemidanaan yang umum, dan yang telah dirumuskan dalam Konsep KUHP nasional adalah “dapat mencegah dilakukannya tindak pidana” (dalam hal ini kejahatan pencucian uang). “Mencegah” dalam hal ini mengandung arti, mencegah agar si pembuat (pelaku) tidak melakukan tindak pidana lagi (*prevensi spesial*). Di samping itu, juga dalam arti, mencegah *orang lain, calon pembuat potensial atau masyarakat pada umumnya* tidak melakukan tindak pidana (*prevensi general*).<sup>53</sup> Dengan demikian kebijakan sanksi pidana pada kejahatan pencucian uang perlu memperhatikan hal-hal di atas, sehingga kebijakan sanksi pidana yang ditetapkan benar-benar efektif mencapai tujuan pemidanaannya.

Dalam kepustakaan hukum pidana sering ditemui istilah-istilah yang nampaknya mirip, seperti : pola pemidanaan, sistem pemidanaan, stelsel pidana; dan kebijakan sanksi pidana.

---

<sup>52</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Op. Cit., hal. 93-94.

<sup>53</sup> Ibid, hal. 90-91.

a. Pola Pemidanaan

Menurut Barda Nawawi Arief, pola pemidanaan merupakan acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sistem sanksi (hukum) pidana. Penekanan pada kata “membuat” atau “menyusun” untuk membedakan “pola pemidanaan” dengan “pedoman pemidanaan” (*Guidance of Sentencing*). “Pedoman pemidanaan” merupakan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan atau menerapkan pemidanaan, sedangkan “pola pemidanaan” merupakan acuan atau pedoman bagi pembuat undang-undang dalam membuat atau menyusun peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana, dengan demikian perbedaan antara keduanya adalah :

Pola pemidanaan merupakan : pedoman pembuatan atau penyusunan pidana (pedoman legislatif);

Pedoman Pemidanaan merupakan : Pedoman penjatuhan atau penerapan pidana, dapat pula dikatakan pedoman yudicial/yudikatif.

Dari pengertian pola pemidanaan seperti tersebut di atas, seharusnya pola pemidanaan lebih dulu ada sebelum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibuat. Oleh karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dipandang sebagai induk peraturan pidana, maka praktek legislatif nampaknya menggunakan pola pemidanaan menurut Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata sebagai acuan atau pedoman dalam membuat peraturan perundang-undangan pidana lainnya.<sup>54</sup>

Untuk uraian berikutnya yang berkaitan dengan “pola pemidanaan” akan dihubungkan dengan “jenis sanksi (hukum) pidana, lamanya (berat-ringannya) pidana dan masalah yang berkaitan dengan “perumusan sanksi”. Di samping itu mengingat di Indonesia saat ini sedang disusun Konsep KUHP Nasional, maka pola pemidanaan yang terdapat dalam Konsep tersebut akan dijadikan pedoman dalam pembahasan, di samping terdapat dalam KUHP (WvS) yang sekarang berlaku.

b. Sistem Pemidanaan

Untuk memberi pengertian “sistem pemidanaan” Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia” memulai dengan menjelaskan pengertian “sistem” yang diartikan sebagai kombinasi hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk kompleks atau kesatuan secara keseluruhan”. Untuk memberi arti dua istilah yang menjadi judul buku tersebut pengertian “sistem” disingkat menjadi susunan (pidana) dan cara (pamidanaan). Dengan demikian Andi Hamzah mengartikan “sistem pemidanaan” sebagai “cara pamidanaan”.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op. Cit., hal. 167-168.

<sup>55</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, 1993, hal.



Mengutip pendapat dari LHC. Hulsman, Barda Nawawi Arief mengartikan “sistem pemidanaan” (*the sentencing system*) sebagai “aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan”. Selanjutnya Barda Nawawi Arief menjelaskan :

“Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalisasikan secara kongkrit, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substansif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.

Bertolak dari pengertian di atas, maka apabila aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substansif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan.<sup>56</sup>

Pembahasan berikutnya apabila berkaitan dengan sistem pemidanaan akan menggunakan batasan hukum pidana substantif saja. Sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief pembahasan mengenai “sistem pemidanaan” yang terbatas pada hukum pidana substantif, dan dalam hal ini sesuai judul yang akan dibahas hanya menyinggung tentang :

- a. jumlah atau lamanya ancaman pidana;
- b. perincian dan pemberatan pidana;
- c. sistem perumusan dan penerapan pidana.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op. Cit.*, hal. 129-130.

<sup>57</sup> Ibid, hal. 130.

c. Stelsel Pidana

Banyak pendapat yang menyatakan bahwa bagian yang terpenting dari hukum pidana adalah stelsel pidananya. Stelsel pidana ini berkaitan dengan : jenis-jenis pidana (*strafsoort*), berat – ringannya pidana (*strafmaat*) dan cara bagaimana pidana dilaksanakan. Dari stelsel pidana tersebut di atas tercermin nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa.<sup>58</sup>

d. Kebijakan sanksi pidana

Kebijakan sanksi pidana adalah kebijakan menetapkan jenis dan berat-ringannya pidana yang dilaksanakan pada “tahap penetapan pidana” dari mekanisme penegakan hukum pidana.<sup>59</sup>

Kaitannya dengan sanksi pidana dalam TPPU yang terdapat dalam UU TPPU dihubungkan dengan sistem pemidanaan dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP banyak menyimpang atau berbeda dengan aturan umum KUHP yang menjadi induknya. Penyimpangan/perbedaan itu antara lain mengenai :

- a. adanya subjek tindak pidana berupa “korporasi” dan ketentuan khusus mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi;
- b. adanya ancaman pidana minimal khusus;
- c. adanya perumusan ancaman pidana secara kumulasi;
- d. dipidananya percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat yang sama dengan pelaku;

---

<sup>58</sup> Muladi, *Stelsel Pidana dan Tindakan Dalam Konsep KUHP Baru*, Makalah Diskusi mengenai Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, arang, tanggal 16 Desember 1989, hal. 10.

<sup>59</sup> Barda Nawawi Arief, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Ijakan Pidana*, Op. Cit., hal. 91.

e. meningkatnya jumlah ancaman pidana denda yang sangat tinggi.

Dalam UU TPPU tindak pidana yang dirumuskan di dalamnya merupakan kejahatan, berarti bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dikenakan ancaman hukuman lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Dengan digolongkannya sebagai tindak kejahatan, maka diharapkan akan dapat lebih terbentuk ketaatan yang tinggi terhadap ketentuan dalam UU TPPU.

Secara tradisional sebenarnya setiap sanksi pidana mempunyai pengaruh pencegahan umum (*preventie general/general deterrent*) dan pencegahan khusus (*preventie special/special deterrent*). Dengan sanksi pidana yang tinggi diharapkan undang-undang itu dapat berlaku efektif. Anggapan seperti itu tidak selamanya ada dalam kenyataan, faktor yang justru sangat berperan dalam upaya penegakan hukum termasuk adalah faktor kepastian dan keajegannya diterapkannya sanksi pidana itu sendiri.

Dalam kepustakaan sering dinyatakan bahwa kepastian diterapkannya sanksi (*certainty of punishment* atau *certainty of conviction*) lebih penting dan juga lebih mempunyai daya pencegahan/penangkal dari pada beratnya sanksi pidana (*severity of punishment*) itu sendiri, Wolf Middelndorf, pernah mengatakan:<sup>60</sup>

“Certainty of conviction is the ideal deterrent, and more significant element in general prevention than the severity of penalties”.

Kebijakan pola perumusan ancaman sanksi pidana dalam UU TPPU menggunakan pola “kumulatif” dan “tunggal”. Dengan pola kumulatif

---

<sup>60</sup> Barda Nawawi Arief, *Tinjauan Terhadap Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan dan (UU No. 14 Tahun 1992) Dari Sudut Politik Hukum Pidana*, dalam Masalah-Masalah Hukum o. 3 Tahun 1993, hal. 14.

(pidana penjara 5 – 15 tahun dan denda 5 – 15 miliar) berarti tidak ada pilihan lain bagi hakim kecuali harus menerapkan kedua jenis sanksi pidana tersebut. Untuk tindak pidana yang dilakukan korporasi diancam dengan pidana pokok denda yang maksimumnya ditambah 1/3 dan ada pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi. Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda diganti dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Untuk pola perumusan ancaman pidana tunggal yaitu penjara saja, atau denda saja (bagi tindak pidana lain yang berkaitan dengan TPPU), maka terhadap pelaku tindak TPPU tidak ada pilihan lain, kecuali ancaman pidana yang diancamkan tersebut.

## 2. Kebijakan Formulatif Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum yang lebih luas, meliputi dan merupakan perwujudan dari proses kebijakan tiga tahap,<sup>61</sup> yaitu tahap penetapan kebijakan (tahap formatif atau legislatif), tahap penerapan kebijakan (tahap aplikasi atau yudikatif), dan tahap pelaksanaan kebijakan (tahap eksekusi).

Apabila dilihat dari keseluruhan proses tahap penegakan hukum pidana, maka tahap kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling penting, sebab

---

<sup>61</sup> Barda Nawawi Arief, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Op. Cit., hal. 91.  
Marc Ancel menyatakan kebijakan hukum pidana sebagai salah satu komponen dari "*Modern criminal science* " *Has in fact three essential components : criminology, which studies the phenomenon of crime in all its aspects; criminal law, wich is the explanation and application of the positive rules whereby society reacts against the phenomenon of crime; finally; penal policy ... ..*, ( Marc Ancel, 1965, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problem*, Ront Ledge & Kegan Paul, London, P. 4).

pada tahap inilah dirumuskan konsep atau asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana di dalam suatu pekerjaan, sekaligus merupakan landasan legalitas bagi dua tahap berikutnya.

Menurut Barda Nawawi Arief, sebagai salah satu bagian dari mata rantai perencanaan penanggulangan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka tahap penetapan pidana harus merupakan tahap perencanaan yang matang mengenai kebijakan-kebijakan tindakan apa yang seharusnya diambil dalam hal pemidanaan apabila terjadi suatu pelanggaran hukum.<sup>62</sup> Pada kesempatan lain, Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa kebijakan legislatif (formulatif) merupakan tahap paling strategis dari keseluruhan proses operasionalisasi/fungsionalisasi dan konkretisasi (hukum) pidana.<sup>63</sup>

Dengan demikian kebijakan legislatif/formulatif atau disebut pula sebagai kebijakan perundang-undangan merupakan langkah awal di dalam penanggulangan kejahatan, yang secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan, yang dituangkan ke dalam perundang-undangan dan meliputi :

- a. perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan apa yang dilarang;
- b. perencanaan/kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelakunya (baik berupa pidana atau denda) dan sistem penerapannya;

---

<sup>62</sup> Barda Nawawi Arief, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Op. Cit., hal. 92.

<sup>63</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op. Cit., hal. 257.

- c. perencanaan/kebijakan tentang prosedur atau mekanisme sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum pidana.<sup>64</sup>

Berkenaan dengan masalah kebijakan legislatif ini, La-Patra mengemukakan bahwa sebagai bagian dari kebijakan kriminal, "*Crime Policy*" dikatakan efektif jika mampu mengurangi kejahatan, baik dalam arti mampu melakukan pencegahan kejahatan, maupun mampu melakukan perbaikan terhadap pelakunya.<sup>65</sup> Menurut Sahetapy, timbulnya suatu kejahatan dapat juga berasal dari undang-undang yang kurang baik, dan dapat juga berasal dari pelaksanaan undang-undang yang tidak konsekuen dan dari sikap para penegak hukum itu sendiri.

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, Wolf Middendorf mengemukakan bahwa untuk efektifnya peradilan pidana harus memenuhi tiga faktor yang saling berkaitan, yaitu :<sup>66</sup>

1. Adanya undang-undang yang baik (*good legislation*);
2. Pelaksanaan yang cepat dan pasti (*quick and certain enforcement*); dan
3. Pemidanaan yang layak dan seragam (*moderate and uniform sentencing*).

Kebijakan formatif sebagai kebijakan yang paling strategis merupakan proses utama di dalam menentukan ketiga persoalan dasar hukum pidana, khususnya yang menyangkut masalah pidana yaitu tentang konsep tujuan pemidanaan, untuk mencari dasar pembenaran dari pidana, agar pidana dapat dilaksanakan dengan lebih proporsional.

---

<sup>64</sup> Barda Bawawi Arief, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan* lama, Op. Cit., hal. 198.

<sup>65</sup> Ibid, hal. 199.

<sup>66</sup> Ibid, hal. 200.

Kebijakan hukum pidana, merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang integral dengan kebijakan sosial, dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, di mana di dalamnya sekaligus tercakup perlindungan masyarakat.

Perlindungan masyarakat dan upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat adalah ide yang telah dijabarkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam Pembukaan yang berisikan tujuan nasional negara Indonesia, antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Pembangunan adalah cara untuk mewujudkannya, dan rencana pembangunan nasional tersusun dalam suatu kebijakan yang dinamakan Garis-Garis Besar Haluan Negara (DBHN).

Adapun kebijakan yang dimaksudkan di dalam penulisan ini adalah kebijakan legislatif/formulatif, khususnya memilih alternatif menangani masalah pencucian uang (*money laundering*), untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan dengan menggunakan sarana pidana.

Seperti dikemukakan di muka bahwa masalah "*money laundering*" bukan saja merupakan masalah satu negara, tetapi sudah merupakan masalah antar negara, sehingga perlu penanganan secara serius, baik melalui kerjasama internasional maupun bilateral. Perbuatan pencucian uang di samping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Sehubungan dengan hal

ersebut, upaya untuk mencegah dan memberantas praktek pencucian uang telah menjadi perhatian internasional..

Di Indonesia, adanya indikasi merupakan tempat yang mudah dilakukannya kegiatan *money laundering*. Gabungan antara kelemahan sistem sosial (termasuk sistem hukum nasional) dan keterbelakangan sistem keuangan merupakan faktor penyebab kenapa Indonesia dapat menjadi surga bagi usaha untuk memperoleh uang haram dan sekaligus untuk mencuci ataupun memutihkannya ("*money laundering*"). Proses pemutihan uang haram menjadi semakin lebih mudah dilakukan karena kombinasi antara kemajuan teknologi dan deregulasi perekonomian telah mempererat integrasi perekonomian nasional dengan perekonomian dunia. Integrasi perekonomian ini memudahkan proses keluar masuknya uang haram melalui transaksi di pasar : barang-barang dan jasa-jasa (termasuk turisme) faktor-faktor produksi modal maupun tenaga kerja antara Indonesia dengan luar negeri.<sup>67</sup>

Di samping itu ada beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia dijadikan sorotan tajam terjadinya *money laundering* antara lain :

- (1) Sampai saat ini di Indonesia berlaku ketentuan bahwa uang yang disimpan dalam bentuk deposito berjangka tidak diusut asal-usulnya, sehingga dengan sendirinya diputihkan dan halal;

---

<sup>67</sup> Anwar Nasution, "Peranan Sistem Keuangan Dalam Pemberantasan *Money laundering*", Makalah Seminar Tentang *Money Laundering* diselenggarakan oleh BPHN-departemen Kehakiman, 4 -3- 1997, hal. 1.



- (2) Undang-undang Perbankan yang berlaku di Indonesia memberikan peluang besar kepada bank untuk merahasiakan kekayaan seseorang. Perdebatan dalam menafsirkan kerahasiaan tersebut hingga kini masih berlangsung;
- (3) Indonesia menganut sistem devisa bebas. Dalam sistem ini setiap orang yang pergi ke luar negeri dan masuk ke Indonesia dengan leluasa membawa uang dengan jumlah yang tidak dibatasi sehingga setiap orang dimungkinkan mentransfer uang simpanannya kemana saja dan dapat menerima uang kiriman dari luar negeri berapapun jumlahnya.<sup>68</sup>

Pencucian uang hasil kejahatan, nampaknya dewasa ini sudah berkembang begitu luas, tidak hanya hasil kejahatan berupa perdagangan gelap narkoba, penyelundupan, dan korupsi, namun sudah meliputi kejahatan perdagangan senjata api, perdagangan obat terlarang seperti psikotropika, hasil penggelapan atau penghindaran pajak.

Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat. Kejahatan ini antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan (*bribery*), penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, perdagangan gelap narkoba dan psikotropika, perdagangan budak, wanita, dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, dan berbagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Kejahatan-

---

<sup>68</sup> Pande Raja Silalahi, *Money Laundering dan Sistem Keuangan Internasional*, Makalah seminar tentang Money Laundering diselenggarakan oleh BPHN-Departemen Kehakiman, 4-3-1997, l. 3.

kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya.

Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut, pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (*financial system*), terutama ke dalam sistem perbankan (*banking system*). Dengan cara demikian asal-usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut adalah pencucian uang (*money laundering*).

Dengan demikian *money laundering* sebenarnya merupakan "*follow up crime*" dari kejahatan sebelumnya, maka penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tersebut dilakukan dengan cara menanggulangi kejahatan yang menjadi sumber kegiatan pencucian uang dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang itu sendiri.

Menurut Muladi, ada tiga kategori model-model yang dilakukan oleh negara dalam rangka mendeteksi adanya kegiatan "*money laundering*" yaitu :

a. *Non Discriminating system*, dianut oleh Amerika Serikat dan Australia.

Dalam sistem ini, setiap transaksi di atas US \$ 10.000,- harus dilaporkan, sekalipun sama sekali tidak nampak adanya kecurigaan terhadapnya (karena

- wajar). Cara ini mengandung kelemahan berupa pengurangan kepekaan dan tanggung jawab para pejabat lembaga-lembaga keuangan terhadap transaksi yang patut dicurigai. Cara ini membutuhkan waktu dan biaya, dan dapat diakali dengan "smurfing",<sup>69</sup> yaitu membagi-bagi jumlah transaksi menjadi kecil-kecil, sehingga tak perlu dilaporkan.
- b. *Discriminating system*, dianut oleh Inggris dan Australia. Dalam sistem ini yang digunakan sebagai kriteria yang harus dilaporkan adalah bila terjadi apa yang dinamakan "*suspicious/unusual transaction*". Keuntungan dari sistem ini adalah bank-bank tetap harus selalu siap siaga dan jumlah laporan tidak terlalu berlebihan (*manageable*).
- c. Di negara Belanda, bank-bank tidak dalam posisi untuk menilai apakah transaksi patut dicurigai atau tidak, sebab hal tersebut merupakan tugas Polisi. Semua transaksi melalui bank yang dianggap "*unusual*" dilaporkan kepada "*reporting agency*", yang merupakan lembaga pemerintah. Lembaga inilah yang akan menseleksi mana yang patut dicurigai dan mana yang tidak. Yang mencurigakan dilaporkan kepada polisi yang kemudian melakukan penyidikan. Dengan demikian lembaga tersebut bertindak sebagai "*intermediary selecting body*" antara bank dengan polisi.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> *Smurfing* merupakan cara pencucian uang yang paling mudah dikenali karyawan bank. *Smurfing* melibatkan tenaga-tenaga "kurir" (biasa dijuluki *smurf*) untuk membeli instrumen-instrumen keuangan yang bernilai di bawah US\$ 10.000. Dokumen-dokumen keuangan tersebut kemudian disetorkan ke dalam tabungan, untuk seterusnya ditransfer ke rekening di luar negeri yang memiliki peraturan perbankan yang ketat.

<sup>70</sup> Muladi, "*Tindak Pidana "Money Laundering" dan Permasalahannya*", Makalah pada Seminar Nasional Pemutihan Uang hasil Kejahatan, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 13 Agustus 1994, hal. 5.

Di Indonesia, kebijakan legislatif/formulatif mengenai kegiatan pencucian uang secara garis besar dibagi atas dua macam garis kebijakan. *Pertama*, dituangkan dalam Undang-undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan *kedua*, yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana yang menjadi sumber asal dari uang haram (*dirty money*) atau hasil kejahatan (*criminal proceeds*) yang kemudian dicuci.

Kebijakan legislatif/formulatif sebagaimana di atas, merupakan bentuk pencegahan dan pemberantasan TPPU dengan menggunakan pendekatan pidana, pendekatan non pidana dan pendekatan administratif. Upaya pemberantasan TPPU ini merupakan pelaksanaan dari amariat PBB dalam *the United Nation Convention Against Illicit in Narcotics, Drugs and Psycotropica Substances of 1988* yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang No. 7 tahun 1997. Dengan penandatanganan konvensi tersebut maka setiap negara penandatanganan diharuskan untuk menetapkan kegiatan pencucian uang sebagai suatu tindak pidana kejahatan dan mengambil langkah-langkah agar pihak penegak hukum dapat mengidentifikasi, melacak dan membekukan atau menyita hasil kejahatan.

Kebijakan formulatif mengenai penanggulangan dan pemberantasan TPPU di Indonesia, selain Undang-undang Undang-undang No. 15 tahun 2002 jo. Undang-undang No. 25 Tahun 2003, juga dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Pasal 610 dan 611 RUU KUHP. Juga dalam Undang - undang yang berkaitan dengan Psikotropika dan

Narkotika serta peraturan perundang-undangan di bidang Bank Indonesia, Undang-undang No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

Banyak sekali ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung dapat mencegah, mengurangi atau memberantas kegiatan *money laundering* secara administratif, antara lain :

- a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/271A/KEP/DIR tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/191A/KEP/DIR tentang Pengeluaran atau Pemasukan Mata Uang Rupiah Dari Atau Ke Dalam Wilayah Republik Indonesia;
- b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/50/KEP/DIR tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum.
- c. PBI No.2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum
- d. PBI No.1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum;
- e. PBI No.1/9/PBI/1999 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank beserta peraturan pelaksanaannya SE No.1/9/DSM tentang Pelaporan Kegiatan Lalu lintas Devisa oleh Bank;
- f. Surat Edaran Bank Indonesia No.2/10/DASP tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong;
- g. PBI No.3/3/PBI/2001 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valas oleh Bank;

- h. Peraturan Bank Indonesia No. 2/23/PBI/2000 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
- i. Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Nasabah (*Know Your Customers Principles*).

Dalam rangka kerjasama internasional kiranya dapat disebut Pasal 57 Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan, bahwa Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan bank sentral lainnya, organisasi dan lembaga internasional. Kerjasama ini dapat meliputi kerjasama berupa tukar menukar informasi yang terkait dengan tugas bank sentral, termasuk dalam bidang pengawasan bank. Dalam kaitan dengan kerjasama ini juga dapat disebutkan, bahwa terdapat UU No. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi yang memungkinkan adanya kerjasama internasional. Republik Indonesia sudah menandatangani beberapa perjanjian ekstradisi dengan Filipina, Malaysia, Thailand, Australia dan Hong Kong. Kerjasama dengan Australia dan Hong Kong sudah meliputi juga *money laundering*, walaupun *money laundering* belum dinyatakan sebagai tindak pidana.

Di samping itu dapat dikemukakan, bahwa sejak Juni 2000 Indonesia telah diterima menjadi anggota *Asia Pacific Group on Money Laundering*, suatu forum kerjasama untuk pemberantasan *money laundering* di kawasan Asia Pasifik yang didirikan pada Februari 1997. Sejak Mei 2001 keanggotaan APG sudah meliputi 22 negara di Asia Pasifik.

Dewasa ini otoritas pengawas perbankan di seluruh dunia semakin menyadari pentingnya upaya-upaya untuk menetapkan landasan/pedoman bagi

bank-bank yang ada di bawah pengawasan mereka agar memiliki sistem dan prosedur pengawasan yang memadai untuk mencegah agar bank tidak digunakan sebagai sarana kejahatan. Dalam hal ini *due diligence* terhadap calon nasabah maupun nasabah yang telah ada merupakan kunci sistem dan prosedur pengawasan dimaksud.

Berkenaan dengan hal tersebut, rekomendasi yang dikeluarkan oleh *the Basel Committee on Banking Supervision* merupakan salah satu acuan yang digunakan oleh perbankan dalam membentuk sistem dan prosedur pengawasan dimaksud. Pedoman yang dikeluarkan oleh *Basel Committee* mengenai *customer due diligence and anti-money laundering efforts* terbagi dalam 3 (tiga) *papers*.

Paper pertama adalah *the Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money Laundering*, diterbitkan pada tahun 1988 dan menetapkan beberapa prinsip dasar bagi perbankan yang pada intinya menganjurkan bank-bank agar senantiasa melakukan identifikasi terhadap para nasabahnya, menolak setiap transaksi yang mencurigakan dan menjalin kerja sama dengan pihak yang berwajib untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang.

Paper kedua yaitu *the 1997 Core Principles for Effective Banking Supervision*, menetapkan antara lain bahwa sebagai bagian dari pengawasan internal, bank-bank harus menerapkan kebijakan, praktek dan prosedur yang dapat mendorong terbentuknya standar etika dan profesional yang cukup tinggi bagi sektor perbankan serta mencegah pemanfaatan bank sebagai sarana kejahatan. Selain itu paper ini juga mendorong bank-bank agar mengikuti

omendasi *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) susnya yang berkaitan dengan identifikasi nasabah, pemeliharaan itan/dokumen, pelaporan transaksi yang mencurigakan dan upaya-upaya adap negara-negara yang belum memiliki ketentuan anti money laundering g memadai.

Paper ketiga yaitu *the 1999 Core Principles Methodology* yang menjadi borasi lebih lanjut dari *the Core Principles* dengan menetapkan kriteria-teria tertentu.

Di samping itu terdapat pula rekomendasi internasioanl dari FATF yang lu mendapat perhatian dari *law enforcement*, *financial* dan *banking institution* Indonesia. FATF dibentuk pada tahun 1989 oleh negara-negara yang gabung dalam *the Group of Seven* (G7) sebagai upaya perlawanan terhadap negara dan terus berupaya agar negara-negara lainnya yang belum bergabung agai anggota turut berpartisipasi menjadikan Rekomendasi FATF sebagai domain untuk memerangi kejahatan pencucian uang.

Adapun rekomendasi yang ditetapkan oleh FATF terdiri dari 40 (empat luh) prinsip yang meliputi penegakan hukum, pengaturan sistem uangan/perbankan, dan kerja sama internasional. Keempat puluh prinsip rsebut selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan "*the Forty ecommendations*". Dari keempat puluh rekomendasi tersebut, rekomendasi ng berlaku bagi lembaga keuangan baik bank maupun non bank adalah komendasi 10 sampai dengan rekomendasi 29.



Rekomendasi FATF pada intinya menganjurkan lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun non bank agar berupaya mengenal nasabahnya dan mengetahui sumber dana yang disimpan atau digunakan oleh nasabah. Rekomendasi inilah yang menjadi landasan bagi Prinsip *Know Your Customer* atau Prinsip Pengenalan Nasabah.

Pada bagian ini dapat pula dikemukakan bahwa beberapa butir dari *the Forty Recommendations* ternyata belum dapat diterapkan sepenuhnya di Indonesia, antara lain :

- a. Rekomendasi ke-15 mengenai kewajiban bank untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang mengenai adanya dana yang bersumber dari aktivitas kejahatan. Rekomendasi ini terbentur pada ketentuan rahasia bank yang diatur dalam UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.
- b. Rekomendasi ke-16 mengenai perlindungan hukum bagi bank dalam hal melaporkan adanya dana yang bersumber dari aktivitas kejahatan. Hal ini telah diatur dalam RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun demikian, selama RUU tersebut belum berlaku sebagai UU yang sah, maka perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi ke-16 tersebut belum bisa diterapkan di Indonesia.

Masih adanya kendala bagi perbankan Indonesia untuk menerapkan Rekomendasi FATF termasuknya belum adanya ketentuan yang secara tegas menetapkan kegiatan pencucian uang sebagai tindak pidana menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh negara-negara anggota FATF untuk

mengidentifikasi Indonesia sebagai salah satu negara yang tidak dapat bekerja sama dalam rangka pencegahan kegiatan pencucian uang (*Non Cooperative Countries and Territories/NCCTs*). Sebagaimana telah dikemukakan di atas pada tanggal 22 Juni FATF telah memutuskan Indonesia sebagai NCCTs. Dampak pengkategorian Indonesia sebagai NCCTs, antara lain adalah :

1. Memperingatkan *multilateral corporations* untuk menghindari melakukan bisnis dengan negara Indonesia;
2. memperingatkan bank-bank untuk memperoleh informasi secara detail sebelum melakukan transaksi dengan penduduk atau perusahaan dari negara Indonesia;
3. mempersulit bank-bank umum dari Indonesia untuk beroperasi di luar negeri.

Setelah disahkannya RUU *Money Laundering* menjadi Undang - Undang No: 15 tahun 2002 jo. Undang-undang No. 25 Tahun 2003, maka Indonesia dapat dibebaskan dari pengkategorian NCCTs dimaksud.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

##### **.. Kelemahan Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam UU TPPU**

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa tahap kebijakan formulatif/legislatif merupakan tahap yang paling penting dari keseluruhan proses penegakan hukum pidana, karena tahap ini dirumuskan konsep atau asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam suatu pekerjaan, sekaligus merupakan landasan legalitas bagi dua tahap berikutnya yaitu tahap aplikatif dan tahap eksekutif. Demikian pula dengan kebijakan hukum pidana yang diformulasikan dalam UU TPPU tidak dapat dilepaskan dari kebijakan legislatif yang meliputi perumusan Tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana. Oleh karena itu pembahasan dalam sub bab ini difokuskan pada kelemahan kebijakan legislatif yang meliputi perumusan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana yang terdapat dalam UU TPPU. Pada tanggal 13 Oktober 2003 telah dilakukan amandemen UU TPPU dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Oleh sebab itu pembahasan juga dilakukan terhadap amandemen undang-undang tersebut.

##### **1. Perumusan TPPU Dalam UU TPPU sebelum dan sesudah Amandemen**

Perumusan TPPU dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2002 diformulasikan dalam dua kelompok tindak pidana yaitu Bab II Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Bab III tentang Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.

**a. Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pasal 3 UUTPPU pada pokoknya merumuskan bahwa dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), setiap orang yang melakukan salah satu perbuatan yang berhubungan dengan harta kekayaan hasil tindak pidana di bawah ini, yaitu dengan sengaja :

- a. menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain ;
- b. mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
- c. membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- d. menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun nama pihak lain;

- e. menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- f. membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;
- g. menukarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya atau
- h. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Dipidana dengan pidana yang sama bagi setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

Dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2003 (selanjutnya disebut UU TPPU Amandemen), Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, d e, f, tidak ada perubahan sehingga masih tetap redaksinya, namun untuk huruf g dan h, redaksinya dijadikan satu dan pengertiannya juga masih tetap. Untuk perumusan ancaman pidana penjara juga masih tetap yaitu minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Namun untuk ancaman pidana denda mengalami perubahan, yaitu yang semula minimal 5 miliar rupiah, berubah menjadi 100 juta rupiah, sedangkan maksimal pidana denda masih tetap yaitu 15 milyar rupiah.

Selanjutnya Pasal 5 UU TPPU mengancam pidana denda ditambah 1/3 (satu pertiga) dan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pembubaran korporasi, jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi. Pasal ini dalam UU TPPU Amandemen tidak ada perubahan.

Di samping itu Pasal 6 mengancam dengan pidana yang sama yaitu pidana penjara paling singkat lima tahun sampai 15 tahun dan denda lima miliar sampai 15 miliar, terhadap setiap orang yang menerima atau menguasai : (a) penempatan, (b) penstranferan, (c) pembayaran, (d) hibah, (e) sumbangan, (f) penitipan, (g) penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut menduga bahwa harta kekayaan itu hasil tindak pidana. Dalam UU TPPU Amandemen Pasal 6 ini perubahannya terletak pada minimal pidana denda yaitu paling sedikit 100 juta rupiah.

Harta yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung yang berjumlah 500 juta atau lebih atau nilai yang setara, dari hasil tindak pidana salah satu di antara 15 kejahatan/tindak pidana yang tersebut dalam Pasal 2 yaitu :

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. penyelundupan barang;
- d. penyelundupan tenaga kerja;
- e. penyelundupan imigran;

- f. perbankan;
- g. narkoba;
- h. psikotropika;
- i. perdagangan budak, wanita, dan anak;
- j. perdagangan senjata gelap;
- k. penculikan;
- l. terorisme;
- m. pencurian;
- n. penggelapan;
- o. penipuan.

Dalam UU TPPU Amandemen Pasal 2 secara keseluruhan dirubah menjadi :

Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana :

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. penyelundupan barang;
- d. penyelundupan tenaga kerja;
- e. penyelundupan imigran;
- f. di bidang perbankan;
- g. di bidang pasar modal;
- h. di bidang asuransi;
- i. narkoba;

- j. psikotropika;
- k. perdagangan manusia;
- l. perdagangan senjata gelap;
- m. penculikan;
- n. terorisme;
- o. pencurian;
- p. penggelapan;
- q. penipuan;
- r. pemalsuan uang;
- s. perjudian;
- t. prostitusi;
- u. di bidang perpajakan;
- v. di bidang kehutanan;
- w. di bidang lingkungan hidup;
- x. di bidang kelautan; atau
- y. tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat)

Tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Kemudian ayat (2) Pasal 2 UU TPPU Amandemen ini disebutkan bahwa harta kekayaan yang dipergunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme dipersamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf n.”



Dalam UU TPPU Amandemen Pasal 2 ini rupanya diperluas dari 15 tindak pidana dalam UU TPPU ditambah sehingga menjadi 25 tindak pidana dan harta kekayaan yang dipergunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme dipersamakan juga sebagai hasil tindak pidana.

Mengenai “tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia”, dalam Pasal 2 ayat (1) huruf y UU TPPU Amandemen ini rupanya dalam menentukan hasil tindak pidana menganut asas kriminalitas ganda (*double criminality*).

Jadi, tindak pidana dalam Pasal 6 ini merupakan pasangan dari TPPU dalam Pasal 3 baik dalam UU TPPU maupun dalam UU TPPU Amandemen. Hanya saja dalam Pasal 6 ini tidak ada ketentuan bahwa mengancam pidana sama bagi orang yang melakukan “percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dalam Pasal 6.

Dari perumusan mengenai TTPU baik dalam UU TPPU maupun dalam UU TPPU Amandemen yang diuraikan di atas, terdapat pengertian bahwa tindak pidana pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan

maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah. Jadi terdapat unsur-unsur bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari 25 tindak pidana dan harus mengetahui/patut menduga, bahwa harta kekayaan itu merupakan hasil kejahatan/tindak pidana.

**b. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pasal 8 UU TPPU mengancam dengan pidana denda dua ratus lima puluh juta sampai satu milyar bagi Penyedia Jasa Keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 (1).

Dalam UU TPPU Amandemen, Pasal 13 ayat (1) bahwa Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Bab V, untuk hal-hal :

- a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- b. Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.

Dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa pada dasarnya Transaksi Keuangan Mencurigakan tidak memiliki ciri-ciri yang baku, karena hal

tersebut dipengaruhi oleh variasi dan perkembangan jasa dan instrumen keuangan yang ada. Meskipun demikian, terdapat ciri-ciri umum dari Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dapat dijadikan acuan antara lain sebagai berikut :

- 1) tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas;
- 2) menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajiban ;
- 3) aktivitas transaksi nasabah di luar kebiasaan dan kewajiban.

Yang dimaksud dengan “Transaksi Keuangan Mencurigakan” adalah :

- a. transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
- b. transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini atau;
- c. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana (Pasal 1 butir 7 UU TPPU Amandemen).

Menurut Pasal 13 ayat (1a), UU TPPU Amandemen bahwa perubahan besarnya jumlah Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK.

Menurut Pasal 13 (2) UU TPPU Amandemen, bahwa penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Penyediaan Jasa Keuangan mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Ketentuan ini dimaksudkan agar Penyediaan Jasa Keuangan dapat sesegera mungkin melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan agar Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana dan pelaku pencucian uang dapat segera dilacak.

Menurut Pasal 13 (3) UU TPPU Amandemen, penyampaian laporan Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.

Menurut Pasal 13 (4) UU TPPU Amandemen, kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf b tidak berlaku untuk transaksi yang dikecualikan.

Menurut Pasal 13 (5) UU TPPU Amandemen, bahwa transaksi yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) meliputi transaksi antar bank, transaksi sentral, pembayaran gaji, pensiun, dan transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan Penyedia Jasa Keuangan yang disetujui oleh PPATK.

Yang dimaksud dengan “transaksi lainnya” adalah transaksi-transaksi yang dikecualikan yang sesuai dengan karakteristiknya selalu dilakukan dalam bentuk tunai dan dalam jumlah yang besar, misalnya setoran rutin oleh pengelola jalan tol atau pengelola supermarket.

Pasal 13 (6) UU TPPU Amandemen, Penyedia Jasa Keuangan wajib membuat dan menyimpan daftar transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) [seharusnya Ayat (5), pen].

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar data atau informasi mengenai transaksi yang dikecualikan tersebut dapat diteliti atau diperiksa oleh PPATK untuk keperluan analisis. Rincian daftar transaksi yang wajib dibuat dan disimpan pada dasarnya sama dengan transaksi tunai yang seharusnya dilaporkan kepada PPATK. Daftar dapat dibuat dalam bentuk elektronik sepanjang dapat dijamin bahwa data atau informasi tersebut tidak mudah hilang atau rusak.

Menurut Pasal 13 ayat (6a), Penyediaan Jasa Keuangan dapat dikecualikan untuk tidak membuat dan menyimpan daftar transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun sejak pengecualian diberikan.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Penyedia Jasa Keuangan tertentu yang untuk sementara waktu belum dapat memenuhi ketentuan ini. Pengecualian dapat diberikan baik dengan atau tanpa permintaan dari penyedia Jasa Keuangan.

Menurut Pasal 13 (7) UU TPPU Amandemen, ketentuan mengenai bentuk, jenis, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala PPATK.

Pasal 9 UUTPPU merumuskan mengancam dengan pidana denda minimal 100 juta rupiah dan maksimal 300 juta rupiah tiap orang yang tidak melapor membawa uang rupiah tunai 100 juta atau lebih ke dalam/luar wilayah RI. Dalam UU TPPU Amandemen, Pasal 9 dirubah sehingga berbunyi “setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu yang dibawa ke dalam atau wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Perubahan Pasal 9 oleh UU TPPU Amandemen ini terletak pada “mata uang asing yang nilainya setara dengan itu” maksudnya adalah setara dengan nilai mata uang rupiah.

Menurut Pasal 16 (1) UU TPPU Amandemen, setiap orang yang membawa uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar wilayah negara Republik Indonesia, harus melaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Menurut Pasal 16 (2), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib menyampaikan laporan tentang informasi yang diterimanya selama jangka

waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada PPATK.

Menurut Pasal 16 (3), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib memberitahukan kepada PPATK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pelanggaran Pasal 16 ayat (2) dan (3) di atas oleh Dirjen Bea dan Cukai, tidak ada ancaman pidananya.

Pasal 16 ayat (5) UU TPPU Amandemen, bahwa apabila diperlukan PPATK dapat meminta informasi tambahan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu yang dibawa setiap orang dari atau kedalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 10 UU TPPU merumuskan mengancam dengan pidana penjara minimal satu tahun dan maksimal tiga tahun kepada PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim, atau orang lain yang bersangkutan dengan TPPU yang melanggar Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 Ayat (1) (membuka identitas pelapor). Pasal ini tidak ada perubahan dalam UU TPPU Amandemen.

Dalam UU TPPU Amandemen, diantara Pasal 10 dan 11 terdapat sisipan Pasal 10 A. Dalam ayat (1) menyatakan bahwa pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim dan siapapun juga

yang memperoleh dokumen dan/atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-undang ini, wajib merahasiakan dokumen dan/atau keterangan tersebut kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang – Undang ini.

Ketentuan ini termasuk sebagai ketentuan mengenai rahasia jabatan.

Pasal 10 A Ayat (2) menyatakan bahwa sumber keterangan dan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan wajib dirahasiakan dalam persidangan pengadilan.

Penjelasan ayat ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “sumber keterangan” dalam ketentuan ini adalah Penyedia Jasa Keuangan yang menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK. Kewajiban untuk merahasiakan sumber keterangan dan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan di persidangan pengadilan dimaksudkan untuk mendorong Penyedia Jasa Keuangan melaksanakan kewajiban penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Pasal 10 A ayat (3) UU TPPU Amandemen mengemukakan bahwa pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan siapapun juga yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan pada Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 3 (tiga) Tahun .

Pasal 10 A ayat (4), bahwa jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dilakukan dengan



sengaja, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun “

Pasal 11 merumuskan bahwa dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda diganti dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda dicantumkan dalam amar putusan hakim.

Berdasarkan uraian rumusan TPPU dan Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan TPPU baik dalam UU TPPU maupun UU TPPU di atas, terdapat beberapa masalah yang menjadikan kelemahan TPPU dan Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan TPPU.

Masalah Batas Jumlah Harta Kekayaan (uang) Yang Dicuci dalam UU TPPU (sebelum dimandemen) menentukan batas harta kekayaan (uang) yang dicuci dalam Pasal 2, yaitu 500 juta rupiah atau lebih atau nilai yang setara. Dengan adanya “batas” itu, dikhawatirkan dapat digunakan sebagai celah-celah untuk lolos dari jaringan hukum dengan jalan memecah-mecah uang yang dicuci itu di bawah nilai 500 juta rupiah dengan menggunakan beberapa nama.

Setelah UU TPPU diamandemen dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tidak ada pembatasan mengenai harta kekayaan yang dicuci. Dalam UU TPPU Amandemen juga harta kekayaan hasil tindak pidana ditambah lagi dengan yang semula 15 tindak pidana menjadi 25 tindak pidana dan ditambah ketentuan tentang Harta Kekayaan yang dipergunakan

secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme dipersamakan sebagai hasil tindak pidana terorisme.

Selanjutnya adalah masalah "*Predicate Offence*" yaitu asal usul harta kekayaan (uang) yang dicuci. Sejak RUU TPPU ini diseminarkan pada tahun 2000, muncul masalah asal-usul harta kekayaan yang dicuci, yaitu berasal dari semua jenis tindak pidana atau hanya yang berasal dari tindak pidana tertentu. Jadi ada masalah mengenai "*predicate offence*" (yaitu delik-delik yang menghasilkan "*criminal proceeds*" atau "hasil kejahatan" yang kemudian dicuci).

UU TPPU (sebelum amandemen) mengambil sikap, bahwa "*predicate offence*" dalam Undang - Undang ini dirumuskan secara limitatif dalam Pasal 2 Bab I (Ketentuan Umum) yang terdiri dari 15 tindak pidana : (1) korupsi; (2) penyuapan; (3) penyelundupan barang; (4) penyelundupan tenaga kerja; (5) penyelundupan imigran; (6) perbankan; (7) narkoba; (8) psikotropika; (9) perdagangan budak, wanita, dan anak; (10) perdagangan senjata gelap; (11) penculikan; (12) terorisme; (13) pencurian; dan (14) penggelapan; (15) penipuan. Ini lebih luas jika dibandingkan dalam RUU 2001 hanya disebutkan 9 jenis tindak pidana (yaitu : korupsi; penyuapan; penyelundupan; tindak pidana yang berkaitan dengan perbankan; tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba; tindak pidana yang berkaitan dengan psikotropika; perdagangan budak, wanita, atau anak; perjudian ; terorisme).

Dengan dibatasinya “*predicate offence*” dalam UU TPPU hanya pada 15 tindak pidana, dapat timbul masalah jika terjadi tindak pidana lainnya selain 15 tindak pidana tersebut. Oleh karena itu dalam UU TPPU Amandemen tindak pidana tersebut diperluas menjadi 25 tindak pidana yaitu selain 15 tindak pidana ditambah 10 tindak pidana lagi yaitu : 1) di bidang pasar modal; 2) di bidang asuransi; 3) pemalsuan uang; 4) perjudian; 5) prostitusi; 6) di bidang perpajakan; 7) di bidang kehutanan; 8) di bidang lingkungan hidup; 9) di bidang kelautan; atau 10) tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) Tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Masalah “*Predicate Offence*” dalam *money laundering* menurut berbagai sumber dapat dilihat berikut ini :

#### MASALAH “*PREDICATE OFFENCE*”

##### Dalam *Money Laundering*<sup>1</sup>

Sumber	Predicate Offence
1. Vienna Convention	Hanya berasal dari TP Narkotik
2. Konvensi Dewan Erp	Berasal dari “Predicate offence”
3. OAS Model Regulation	Berasal dari “Predicate offence”
4. EC ( European Communities ) Directive	Berasal dari “criminal activity”, yaitu - narcotics offences; ditambah - “any other activity” yang ditetapkan oleh masing-masing negara;
5. FATF (Financial Action Task Force) Report	Menyarankan beberapa pendekatan: a. memperluas TP pada “any other crimes

<sup>1</sup> Diedit oleh Barda Nawawi Arief, *Beberapa Catatan Terhadap Kebijakan Penanganan TP pencucian uang (Money Laundering)*, Makalah Seminar Nasional, BI, Jakarta Tanggal 28 Agustus 2002., hal. 13, dari Stephen R. Kroll, “*CEELI Report: Money Laundering*”, *The International Lawyer*, Vol. 28, No. 3, P. 841-842; dan dari Model Law yang dibuat oleh UNDCP.

	<p>for which there is a link to narcotics”,</p> <p>b. mengkriminalisasikan Money Laundering berdasarkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- “all serious offences”; dan/atau</li> <li>- “all offences that generate a significant amount of proceeds”; or</li> <li>- “certain serious offences”.</li> </ul>
6. KUHP Swiss (Pasal 305 bis)	Berasal dari “a crime” (berarti semua kejahatan).
7. United Kingdom	“narcotics trafficking and terrorism predicate offence”
8. Italia	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. aggravated robbery;</li> <li>b. aggravated extortion</li> <li>c. kidnapping;</li> <li>d. narcotics trafficking and organized crime.</li> </ul>
9. USA	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. narcotics production and trafficking;</li> <li>b. racketeering;</li> <li>c. bribery;</li> <li>d. counterfeiting;</li> <li>e. securities fraud;</li> <li>f. bank and customs fraud;</li> <li>g. smuggling;</li> <li>h. espionage;</li> <li>i. kidnapping;</li> <li>j. mail and wire fraud</li> <li>k. environmental crime.</li> </ul>
10. Model “Crivil Law”	<ul style="list-style-type: none"> <li>- illicit traffic in narcotics drugs &amp; Psychotropic substances;</li> <li>- other serious offences, typical of organized crime.</li> </ul>
11. Model Comman Law	- an offences -> punishable by imprisonment for not less than 12 months;
12. Gerassimos Furlanos (UNDCP, Bangkok)	<p>Saran dalam lokakarya 2000, menambah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPPemerasan (racketeering/extortion);</li> <li>- Kidnapping</li> <li>- Trafficking in human being;</li> </ul>
13. Michael Mc Donald (USA)	<p>Saran dalam lokakarya 2000 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-fraud on bank</li> <li>-fraud against the government</li> <li>-arms trafficking;</li> <li>-kidnapping</li> <li>-terrorism</li> </ul>

Memperhatikan berbagai sumber, memang terdapat bermacam-macam variasi "*predicate offence*". Namun untuk menentukan pilihan/kebijakan, seyogyanya ada kriteria atau rambu-rambu yang cukup rasional. Stephen R. Kroll misalnya, pernah mengemukakan kriteria/rambu-rambu untuk menetapkan "*money laundering predicate offenses*" sebagai berikut :<sup>2</sup>

- a. Kejahatan (Tindak Pidana ) itu adalah kejahatan yang menyebabkan timbulnya uang/dana itu;
- b. Kejahatan (Tindak Pidana) itu berhubungan dengan perdagangan narkoba;
- c. Kejahatan (Tindak Pidana) itu melibatkan pelanggaran-pelanggaran serius terhadap tatanan internasional yang memerlukan transfer uang yang banyak (seperti perdagangan senjata dan terorisme)
- d. Kejahatan itu berhubungan dengan "*organized criminal enterprises/activities*".
- e. Kejahatan itu menyerang secara serius kredibilitas bank dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Kriteria di atas sekedar contoh. Kriteria lain menurut Barda Nawawi Arief, misalnya diorientasikan pada : (1) delik-delik yang bersifat transnasional/ internasional; (2) delik-delik yang sangat mengganggu sistem perekonomian/moneter nasional maupun internasional ; atau (3) batas ancaman pidana untuk delik-delik serius tertentu.<sup>3</sup>

Kebijakan menentukan kriteria itupun tentunya sangat bergantung pada tujuan/strategi kebijakan kriminal dan kebijakan pembangunan nasional. Bahkan terkait dengan kebijakan global, karena ketidaksamaan

<sup>2</sup> Lihat Stephen R. Kroll, "*CEELI Report : Money Laundering*", The International Lawyer, Vol. 28, No. 3. Dalam Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hal. 6.

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Catatan Terhadap Implementasi UU No. 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Makalah Seminar Nasional, "Arah Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (money Laundering)", di Runag Serba Guna Bank Indonesia, Tanggal 28 Agustus 2002, hal.. 175-176.

*“predicate offence”* di antara berbagai negara, dapat menghambat kerjasama internasional/regional dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagai *“transnasional crime”*.

Kembali pada masalah unsur-unsur dalam perumusan tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu bahwa harta kekayaan yang dicuci harus berasal dari tindak pidana tersebut dalam Pasal 2 UU TPPU, dan mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa harta kekayaan itu merupakan hasil kejahatan/tindak pidana. Unsur yang demikian mengandung konsekuensi bahwa harus dibuktikan terdakwa mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa harta kekayaan itu merupakan hasil kejahatan/tindak pidana. Jadi yang harus dibuktikan adalah unsur subjektifnya yaitu unsur sikap batin jahat/kesalahannya, bukan unsur “objektif”-nya yaitu bukan membuktikan apakah kejahatan itu telah terjadi atau belum.

Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Huruf a” UUTPPU dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “merupakan hasil tindak pidana” yaitu sudah terdapat bukti permulaan yang cukup atas terjadinya tindak pidana. Jadi yang dimaksud dalam penjelasan itu ialah, bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa “mengetahui/sepatutnya menduga bahwa harta kekayaan itu merupakan hasil tindak pidana”, tidak perlu betul-betul dibuktikan telah terjadi tindak pidana”. dengan demikian terhadap Harta Kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu

tindak pidana asalnya, untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang.

Dibandingkan dengan pembuktian tindak pidana "penadahan" (di dalamnya juga mengandung unsur "yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", Pasal 480 KUHP) yang dalam beberapa yurisprudensi dinyatakan sebagai berikut :<sup>4</sup>

1. Putusan M.A. 9 Juli 1958 No. 79 K/Kr/1958 :

Tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menurut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah : dalam perkara ini adanya orang yang kecurian dan adanya barang-barang yang berasal dari pencurian itu terdapat pada penadahnya, sudahlah cukup untuk menuntut yang bersangkutan karena 'penadahan;

2. Putusan M.A. 29 Nopember 1972 No. 126 K/Kr/1969 :

Pemeriksaan TP penadahan tidak perlu menunggu adanya putusan mengenai TP yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan.

3. Putusan M.A. 21 Nopember 1961 No. 103 K/Kr/1961 :

TP "penadahan" dapat berdiri sendiri di samping dan sejajar dengan TP "pencurian".

---

<sup>4</sup> P.A.F. Lamintang dan Djisman Samnosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru Bandung, 1983, hal. 200-201.

Dalam UU TPPU Amandemen Pasal 2 ayat (1) huruf y disebutkan bahwa tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) Tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Menurut Barda Nawawi Arief, ketentuan demikian mirip dengan yang dirumuskan dalam Pasal 6 Ayat (2) *Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the proceeds from crime, E.T.S. No. 141* (8 Nopember 1990) yang menegaskan, bahwa “tidak menjadi masalah apakah “*predicate offence*” itu termasuk dalam yurisdiksi kriminal dari negara/pihak yang bersangkutan”. Demikianlah pula dalam “*The 1991 Europe-an Communities Directive*” ditegaskan, bahwa tetap dianggap ada *Money Laundering* sekalipun aktivitas kejahatan yang menyebabkan timbulnya harta kekayaan yang dicuci itu dilakukan di wilayah negara lain.<sup>5</sup>

Mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan TPPU permasalahan yang patut diperhatikan adalah mengenai tindak pidana Pasal 9 UU TPPU yaitu “tidak lapor membawa uang rupiah tunai sejumlah Rp. 100.000.000,00 ke dalam atau ke luar wilayah Republik Indonesia”, dan Pasal 16 ayat (1) yaitu setiap orang yang membawa uang tunai ke dalam atau ke luar wilayah negara Republik Indonesia berupa rupiah sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, harus melaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Catatan Terhadap Implementasi UU No. 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Op. Cit., halaman 179.



Ketentuan yang demikian akan menjadi masalah apabila yang dibawa berupa mata uang asing, karena dalam pasal-pasal di atas (UU TPPU sebelum amandemen) hanya disebutkan secara tegas *uang rupiah* dan tidak digunakan istilah “yang nilainya setara” seperti disebut dalam Pasal 2. Tidak jelas alasan pembentuk undang-undang membuat ketentuan Pasal yang demikian, padahal kebijakan formulasi seperti itu (yaitu tidak digunakannya istilah “yang nilainya setara”) dapat memberi peluang bagi pelaku tindak pidana pencucian uang untuk lolos dari jeratan Pasal 9 dengan menukar terlebih dahulu uang rupiah tunai Rp. 100 juta yang akan dibawanya itu dengan mata uang asing.

Namun hal demikian ternyata dalam UU TPPU Amandemen sudah disempurnakan yaitu dalam Pasal 9, bahwa setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau “*mata uang asing yang nilainya setara dengan itu*” (cetak miring penulis) yang dibawa ke dalam atau wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Dengan adanya ketentuan yang demikian maka kecil kemungkinan untuk melakukan pelanggaran ketentuan ini, karena baik mata uang rupiah sejumlah lebih dari 100 juta rupiah atau mata uang asing dengan jumlah setara dengan 100 juta rupiah yang dibawa ke atau masuk Indonesia harus melaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

## 2. Pertanggungjawaban Pidana

Pasal 1 angka 1 Undang - Undang No. 15 Tahun 2002 (Pasal 1 angka 2 UU TPPU Amandemen) menyatakan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan dan korporasi”. Selanjutnya Pasal 1 angka 3 UU TPPU Amandemen disebutkan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dengan demikian menurut Undang - Undang TPPU, subjek TPPU tidak hanya “orang perseorangan” tetapi juga “korporasi”.

Tindak pidana yang dilakukan korporasi, biasanya berhubungan dengan kegiatan ekonomi atau kegiatan yang berkaitan dengan bisnis. Sejalan dengan pesatnya aktivitas ekonomi, bentuk-bentuk tindak pidana korporasipun semakin beraneka ragam. Yusuf Shofie memberikan contoh bentuk-bentuk tindak pidana tersebut, antara lain penggelapan pajak, pembobolan bank melalui komputer atau *automatic teller machine*, penyalahgunaan ijin perdagangan untuk beroperasi sebagai lembaga keuangan (seperti kasus PT. Suti Kelola dan Firma Meredien Indonesia), penjualan saham palsu, penjualan rumah fiktif, obat yang tidak berfaedah atau berbahaya bagi konsumen, pencemaran lingkungan, dan sebagainya.<sup>6</sup>

Tindak pidana semacam ini sulit diketahui. Meskipun diketahui, untuk membuktikannya di pengadilan masih menghadapi permasalahan hukum. Sulit diketahui karena dilakukan secara rahasia, bahkan sering korbannya tidak mengetahui kerugian yang dialaminya. Selain itu juga

---

<sup>6</sup> Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 255.

sulitnya mencari bukti-bukti berdasarkan hukum dan sulit menentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan korporasi tersebut. Kesulitan dalam penegakan hukum akibat dari tindak pidana korporasi ini menurut Mardjono<sup>7</sup> pertama, korporasi (sebagai pelaku kejahatan yang potensial) pada umumnya mempunyai lobby yang efektif dalam usaha perumusan delik maupun cara-cara menanggulangi kejahatan korporasi. Kedua, menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi maupun menentukan kesalahan korporasi tidaklah mudah. Lebih lanjut Mardjono mengatakan, bahwa kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan korporasi ini bagi individu, terlihat hanyalah puncak gunung es saja.

Sejalan dengan perkembangan dunia internasional (salah satunya adalah *International Meeting of Experts On The Use of Criminal Sanction in The Protection of Environment, Internationally, Domestically and Regionally*, Portland, Oregon, USA, 19-23 March 1994) yang menempatkan korporasi sebagai subjek TP, dalam pertemuan tersebut mengenai pertanggungjawaban korporasi (*Legal entity liability*), ditentukan sebagai berikut :<sup>8</sup>

1. Delik-delik yang dirumuskan dalam *generic crimes* dan *specific crimes* dapat dipertanggungjawabkan terhadap seseorang individu maupun

---

<sup>7</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Kumpulan Karangan Buku Kesatu, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, UI, Jakarta, 1995, hal. 68.

<sup>8</sup> Beberapa Hasil *International Meeting Of Expert On The Use Of Criminal Sanction In The Protection Of Environment, Internationally, Domestically and Regionally*, Portland, Oregon, USA, 19-23 March 1994, disarikan oleh Barda Nawawi Arief, Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang, 3-15 Desember 1995, hal. 6-7.

korporasi, dengan ketentuan bahwa delik itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan organisasi (korporasi) itu;

2. Pertanggungjawaban korporasi terjadi apabila :
  - a. ada kesalahan manajemen dari korporasi itu dan telah terjadi *generic crimes*; atau
  - b. ada pelanggaran peraturan atau ketentuan undang-undang oleh korporasi itu.
3. Pertanggungjawaban korporasi dikenakan juga pada pertanggungjawaban perseorangan dari manajer, petugas, agen, karyawan atau pelayan dari korporasi itu.
4. Pertanggungjawaban korporasi diterapkan tanpa memperhatikan apakah orang atau individu yang melakukan perbuatan atas nama korporasi itu telah diidentifikasi, telah dituntut atau telah dipidana atau tidak.
5. Semua sanksi, kecuali sanksi pidana penjara, dapat dikenakan kepada korporasi.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dikenakan kepada:

1. Badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain;
2. Mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu; atau
3. Kedua-duanya yaitu korporasi dan pengurus.

Satu hal yang perlu diperhatikan di dalam membicarakan masalah pertanggungjawaban pidana korporasi, adalah sistem perumusan yang

menyatakan bahwa korporasi itu sendiri dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Motivasi dari adanya sistem pertanggungjawaban korporasi ini, didasarkan kepada perkembangan akhir-akhir ini terutama dalam bidang ekonomi khususnya kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan TPPU. Ditetapkannya pengurus saja yang dapat dipidana ternyata tidak cukup, karena kerugian yang dialami oleh masyarakat dan negara akibat tindak pidana ekonomi adalah lebih besar apabila dibandingkan dengan pidana denda yang dijatuhkan kepada pengurus korporasi yang melakukan tindak pidana.

Sejalan dengan hal tersebut Roeslan Saleh mengatakan, dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak akan sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh Undang-undang itu. Dengan kata lain "*deterent effect*" nya tidak dapat diharapkan dengan baik apabila hanya pengurus saja yang dipidana.<sup>9</sup> Lebih lanjut Roeslan Saleh mengatakan, bahwa ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, korporasi dan pengurus, atau pengurus saja.

---

<sup>9</sup> Roeslan Saleh, 1982, *Tentang TP dan Pertanggungjawaban Pidana*, Lokakarya Masalah Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, BPHN-Depkeh, hal. 17.  
Berkenaan dengan TPLH, Van Strien mengatakan, norma-norma ketelitian atau kecermatan tertentu yang terkait pada perilaku yang mengganggu lingkungan juga akan sangat berperan dalam menetapkan batas-batas atau syarat penetapan korporasi sebagai pelaku delik. Faktor lain yang juga penting penetapan korporasi sebagai pelaku adalah sifat, struktur dan bidang kerja korporasi. Semakin luas atas yang ditarik dari penetapan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, semakin cepat korporasi dapat diperlakukan sebagai terdakwa (Van Strien, 1994, *Kekhawatiran Masa Kini, pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 295.

Hal senada dikemukakan pula oleh Schaffmeister, dengan dasar arrest hukum perdata "*Kleuterschool Babbel*" (Taman Kanak-kanak Babel) dipertahankan bahwa perbuatan dari perorangan dapat dibebankan pada korporasi, apabila perbuatan-perbuatan tersebut tercermin dalam lalu lintas sosial sebagai perbuatan-perbuatan dari korporasi.<sup>10</sup>

Dalam kondisi-kondisi bagaimana suatu tindak pidana dapat dipandang telah dilakukan oleh korporasi, Nico Keijzer memberikan beberapa contoh sebagai berikut :<sup>11</sup>

a. *American Model Penal Code (MPC)*

1. *If a legislative purpose to impose liability on corporations plainly appears and the conduct is performed by an agent of the corporation acting in behalf of the corporation within the scope of his office or employment; or*

(Apabila maksud pembuat Undang-undang untuk mengenakan pertanggungjawaban pada korporasi yang melakukan atas nama korporasi dalam ruang lingkup jabatan atau tugas pekerjaannya); atau

2. *If the offence consists of an omission to discharge a specific duty of affirmative performance imposed on corporations by law; or*  
(Apabila tindak pidana itu merupakan suatu pengabaian atau pelanggaran kewajiban khusus yang dibebankan kepada korporasi oleh Undang-undang); atau

---

<sup>10</sup> Schaffmeister, *et al*, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hal. 279.

<sup>11</sup> Nico Keijzer, 1997, *Fraud By Corporations*, terjemahan Barda Nawawi Arief : *Sari Kalliah Perbandingan Hukum Pidana*, OT. Raja Grafindo Perdsada, Cetakan Keempat, 2002, hal. 126-127.

3. *If the commission of the offence was authorized, requested, commanded, performed or recklessly tolerated by the directors or by a high managerial agent acting in behalf of the corporation within the scope of his office or employment.*

(Apabila dilakukannya tindak pidana itu dibenarkan atau disahkan, diminta, diperintahkan, dilaksanakan atau dibiarkan atau ditolerir secara sembrono oleh dewan direksi atau oleh agen pimpinan puncak yang bertindak atas nama korporasi dalam batas-batas ruang lingkup tugas atau pekerjaannya).

b. *Dutch Case Law* (Yurisprudensi Belanda):

1. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang yang secara khusus ditujukan bagi korporasi.
2. Apabila korporasi berkewajiban mencegah terjadinya tindak pidana, tetapi gagal berbuat demikian.
3. Apabila tindak pidana itu berhubungan dengan bidang usaha korporasi yang bersangkutan.

Namun demikian ada beberapa batasan yang menyebabkan korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang oleh Peter Gillies diuraikan sebagai berikut :<sup>12</sup>

- a. apabila "*a responsible officer*" dari perusahaan, tidak dapat dipandang sebagai melakukan delik dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang melakukan perbuatan untuk korporasi;

---

<sup>12</sup> Petter Gilles, 1990, *Criminal Law*, terjemahan Barda Nawawi Arief, Dalam : *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan Keempat, 2002, hal 191.

- b. apabila sifat atau hakiki perbuatan tidak dimaksudkan oleh pembuat Undang-undang untuk mampu dilakukan oleh perusahaan, misal perkosaan (*rape*), penyerangan seksual (*sexual assault*), sumpah palsu (*perjury*), dan bigami (karena perusahaan tidak dapat menikah).

Selanjutnya dikatakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa menurut Peter Gillies, ada batas-batas tindak pidana mana yang dilakukan oleh korporasi. Salah satu pertimbangan yang relevan adalah masalah pidana. Secara normal, pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi adalah pidana denda. Tentang hal ini diberikannya contoh bahwa di Inggris, korporasi pernah dihukum sebagai pmbantu (*eccessory*) untuk tindak pidana yang menyebabkan kematian karena "*dangerous driving*" (Robert Millar (contractors) Ltd., 1970). Dengan melihat faktanya, dapat diperdebatkan bahwa perusahaan dapat dihukum sebagai "*a principal*". Faktanya ialah, korporasi memiliki lori/truk dan mempekerjakan sopir. Lori/truk itu keluar dari jalan raya, ketika salah satu bannya dalam kondisi tidak sempurna/rusak dan berbahaya. Ban itu kemudian pecah, dan terjadilah tabrakan fatal.<sup>13</sup>

Perundang-undangan di Inggris sekarang ini mengakui bahwa perbuatan dan sikap batin dari orang-orang tertentu yang berhubungan erat dengan korporasi dan dengan pengelolaan urusan korporasi, dipandang sebagai perbuatan dan sikap batin korporasi. Orang-orang itu dapat disebut sebagai "*senior officers*" dari korporasi. Doktrin yang disebut sebagai "*Direct Corporate Liability*" atau "*The Identification Doctrine*" ini

---

<sup>13</sup> Ibid, halaman 192.



merupakan dasar pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana. Oleh karena korporasi bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat senior di dalam korporasi, sepanjang ia melakukannya dalam ruang lingkup kewenangannya atau dalam urusan transaksi korporasi. Lebih spesifik dikatakan, bahwa tindak pidana dan kesalahan atau sikap batin pejabat senior dipandang sebagai perbuatan dan sikap batin korporasi. Unsur-unsur tindak pidana dapat dikumpulkan dari perbuatan dan sikap batin beberapa pejabat senior.<sup>14</sup>

Sehubungan dengan kasus Robert Millar (*contractor*) Ltd. diatas, maka dapat dikemukakan bahwa dasar pertanggungjawaban yang diterapkan pada korporasi yang bersangkutan adalah doktrin *Direct Corporate Liability* atau *The Identification Doctrine*.

Di samping itu, doktrin pertanggungjawaban langsung (*direct liability doctrine*) juga menunjuk pada "*alter ego/identification doctrine*" atau "*the primary corporate liability doctrine*", yang diatribusikan pada tiga putusan Inggris pada tahun 1944 yaitu:<sup>15</sup>

a. Kasus D.P.P.V. Kent and Sussex Contractors Ltd (1944)

Dalam kasus ini, pengadilan mempertanggungjawabkan korporasi atas tindak pidana tentang peraturan pendistribusian bensin yang mensyaratkan bukti adanya unsur "sengaja menipu" ("*intent to deceive*"). Kesengajaan itu ada pada "*transport manager*". Hakim Viscount Caldecote mempertimbangkan, bahwa sikap batin jahat dari

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 179.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 194.

manajer itu dapat diatribusikan kepada korporasi dan diperlakukan sebagai sikap batin jahat dari korporasi dengan menyatakan : “walaupun para direktur dan pimpinan umum korporasi adalah para agen, mereka lebih dari itu. Suatu korporasi mampu berbuat, berbicara, maupun berpikir seperti yang diperbuat, dibicarakan atau dipikirkan oleh para manajernya.”

b. Kasus *I.C.R. Haulage Ltd.* (1944)

Pengadilan banding dalam kasus ini memperkuat penghukuman kepada pembanding korporasi, direktur manajer dan orang-orang lain, atas perbuatan melakukan “konspirasi untuk penipuan” (“*conspiracy to defraud*”). Pengadilan mengemukakan, bukti-bukti membenarkan penemuan bahwa perbuatan-perbuatan dari direktur manajer merupakan perbuatan dari korporasi, dan penipuan dari orang itu merupakan penipuan dari korporasi. Dalam hal-hal khusus, tindak pidana dari agen, termasuk sikap batinnya, kesengajaan, pengetahuan atau keyakinannya merupakan perbuatan dari korporasi, harus bergantung (antara lain) pada kedudukan dari pejabat atau agen itu.

c. Kasus *Moore V.I Bresler Ltd.* (1944)

Putusan pengadilan dalam kasus ini mengemukakan hal serupa. Kasusnya adalah menyembunyian (*submission*) pengembalian pajak perdagangan (*purchase tax*) yang dilakukan dengan “sengaja menipu” (“*intent to deceive*”). Sekretaris dan manajer penjualan dari sebuah korporasi telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan dengan

kesengajaan yang demikian. Hakim Viscount Caldecote mengemukakan : “kedua orang ini merupakan pejabat/staf penting dari korporasi, dan oleh karena itu perbuatan mereka adalah perbuatan korporasi.”

Putusan-putusan lain yang juga memandang bahwa pejabat senior dari suatu korporasi dipandang sebagai korporasi, dan perbuatannya dipandang sebagai perbuatan korporasi adalah perkara *H.L. Bolton (Engineering) Co. Ltd. V.T.J Graham & Sons Ltd.* (1957) dan perkara *Tesco Supermarkets Ltd. V. Nattrass.* (1972). Di samping itu doktrin “*direct liability*” juga diakui oleh pengadilan-pengadilan Australia, antara lain dalam kasus *Universal Telecast-ers (Qld) Ltd. Guthrie* (1977).

Mengenai pertanggungjawaban pidana pengurus dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggung jawab, yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya.

Mengenai hal ini Roeslan Saleh<sup>16</sup> mengatakan, tindak pidana yang dilakukan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tertentu sebagai pengurus dari korporasi tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan TP itu adalah “*onpersoonlijk*”. Orang yang memimpin korporasi

---

<sup>16</sup> Roeslan Saleh, *Tentang TP dan Pertanggungjawaban Pidana*, op cit, hal. 16.

bertanggung jawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.

Menurut A.Z. Abidin<sup>17</sup>, dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tetapi pengurus yang bertanggung jawab adalah berdasarkan kepada anggapan, bahwa suatu perbuatan hanya dapat dilakukan manusia secara fisik dalam keadaan nyata dan kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan itu menyangkut kejiwaan yang hanya dapat dimiliki oleh manusia saja. Dengan demikian tidak ada konstruksi lain yang dapat digunakan selain daripada ukuran pertanggungjawaban pengurus atau wakil korporasi.

Mengenai petanggungjawabn pidana pengawas atau pengurus ini Nico Keijzer memandang tidak hanya atas nama pribadi, tetapi juga dari sudut peranannya di dalam korporasi<sup>18</sup>, yaitu:

a. *American Model Penal Code (MPC)*

Dalam hal kewajiban melakukan sesuatu dibebankan oleh Undang-undang kepada korporasi, setiap agen korporasi yang mempunyai tanggungjawab utama untuk melaksanakan kewajiban itu bertanggung jawab untuk pelanggaran atau pengabaian secara sembrono atas kewajiban itu, sama seperti apabila kewajiban itu dibebankan secara langsung kepadanya oleh Undang-undang.

b. Yurisprudensi Belanda menetapkan, pengurus dapat dipidana apabila:

1. ia tahu, bahwa pelanggaran itu sedang terjadi, dan

---

<sup>17</sup> A.Z. Abidin, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradya Paramita, Jakarta, hal. 63. menurut Schaffmeister, seorang pemimpin yang bertindak sendiri, walaupun mungkin menurut kebiasaan berbicara ditafsirkan sebaliknya, dapat juga dianggap telah memimpin perbuatan yang terlarang yang telah dilakukan oleh korporasi (Schaffmeister, *Hukum Pidana*, op cit, hal. 287)

<sup>18</sup> Nico Keijzer, *Found By Corporations*, op cit, hal. 127-128.

2. ia dapat dan seharusnya campur tangan, tetapi gagal berbuat demikian.

Dalam hal seseorang dapat dipandang mengetahui bahwa perbuatan itu telah terjadi, cukup apabila ada *dolus eventualis*, cukup ia menyadari hakikat dari perbuatan itu. Sedangkan tindakan yang seharusnya diambil oleh pengurus, tidak cukup bahwa ia telah memerintahkan tindak pidana itu dihentikan, karena ia juga harus mengontrol bahwa perintahnya telah dipatuhi secara tepat; untuk mempertanggungjawabkan pengurus, tidak disyaratkan bahwa korporasi masih tetap ada; tidak disyaratkan bahwa pengurus atau pengawas itu adalah pegawai dari korporasi itu.

Berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana pengurus, Peter Gillies<sup>19</sup> mengemukakan suatu doktrin yaitu *vicarious liability* dengan mengatakan, bahwa pengadilan telah mengembangkan sejumlah prinsip-prinsip mengenai hal ini. Salah satunya adalah "*employment principle*".

Menurut doktrin ini, majikan (*employer*) adalah penanggung jawab utama dari perbuatan-perbuatan para buruh atau karyawan yang melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup tugas/pekerjaannya. Oleh Peter Gillies diberikan contoh, bahwa di Australia tidak ada keraguan "*the vicar's criminal act*" (perbuatan dalam delik *vicarious*) dapat dihubungkan dengan majikan atau pembuat (*principal*). Sedangkan di Inggris, "*a guilty mind*" hanya dapat dihubungkan dengan majikan apabila ada delegasi kewenangan dan kewajiban yang relevan menurut Undang-undang. Hal ini tampak pada

---

<sup>19</sup> Peter Gillies, *Criminal Law*, op cit, hal. 135-137.

dua putusan Inggris sebelum tahun 1944, yaitu perkara *Mousell Bros Ltd. V. London* dan kasus *North-Western Railway* (1917).

Bertolak dari "*employment principal*" dalam hubungannya dengan *vicarious liability*, dapat dibuat suatu proposisi bahwa "suatu perusahaan dapat bertanggung jawab secara mengganti untuk perbuatan yang dilakukan oleh karyawan atau agennya.

Mengenai doktrin *vicarious liability* ini, John C. Coffe mengemukakan beberapa kritik mengenai ide pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. *Vicarious liability* hanya tepat sebagai prinsip untuk hukum ganti rugi (*tort law*), karena pembedanya terletak pada pembagian kerugian pada pihak yang lebih dapat menanggung (atau setidaknya tidaknya lebih berhak mendapat beban itu), tetapi ia tidak berkaitan dengan tujuan-tujuan dalam hukum pidana (*retribution, deterence, prevention, rehabilitation*).
- b. *Vicarious liability* tidak adil karena bebannya jatuh pada yang tidak bersalah daripada yang salah, yaitu hukuman (*penalty*) ditanggung oleh para pemegang saham dan orang-orang lain yang mempunyai kepentingan dalam korporasi, daripada dibebankan pada individu yang bersalah.

---

<sup>20</sup> John C. Coffe, 1983, *Corporate Criminal Liability*, dalam Sanford H. Kadish: *Encyclopedia of crime and justice* terjemahan Barda Nawawi Arief, Dalam : *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Op. Cit., hal. 160-161.

- c. *Vicarious liability* menghasilkan disparitas antara bisnis yang dilakukan dalam bentuk korporasi dengan bersifat kepemilikan (*proprietorship*), karena pemilik individual tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana untuk perbuatan-perbuatan bebas dari para pegawainya.
- d. *Vicarious liability* untuk korporasi dapat membuka pintu di masa yang akan datang untuk *vicarious liability* yang diperluas juga bagi individu.

Mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus (kedua-duanya), dasar dari pertanggungjawaban ini disesuaikan dengan perkembangan itu sendiri, ternyata untuk beberapa tindak pidana ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana rupanya tidak cukup sebagai contoh adalah tindak pidana ekonomi, tidak mustahil denda yang dijatuhkan sebagai pidana kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau diderita oleh saingan-saingannya, keuntungan dan atau kerugian-kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Oleh karena dipidanya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, dan mustahil dapat memenjarakan korporasi, maka harus dicari jenis pidana lain supaya korporasi mentaati ketentuan yang berlaku.

Sejalan dengan hal tersebut Loebby Loqman mengemukakan pendapat<sup>21</sup>, apabila suatu korporasi melakukan tindak pidana, maka ada beberapa kemungkinan yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya. Kemungkinan pertama adalah manusianya, kemungkinan kedua korporasinya dan kemungkinan ketiga kedua-keduanya.

Menurut Mardjono Reksodiputro<sup>22</sup>, hukuman pidananya dapat dijatuhkan secara kumulatif, yaitu hukuman penjara dan hukuman denda. Pidana berupa denda harus dijatuhkan terhadap perusahaan berupa korporasi (badan hukum), dan pidana penjara bagi pengurus yang bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran tersebut.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat pula semata-mata berdasarkan Undang-undang, terlepas dari kedua doktrin di atas (doktrin "*identification*" dan doktrin "*vicarious liability*"), yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/kondisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh Undang-undang, dikenal dengan istilah "*Companies offence*", "*situational offence*", atau "*strict liability offences*"<sup>23</sup>. Misalnya Undang-undang menetapkan sebagai suatu tindak pidana bagi :

- a. korporasi yang menjalankan usaha tanpa ijin;
- b. korporasi pemegang ijin yang melanggar syarat-syarat (kondisi/situasi) yang ditentukan dalam ijin itu;

---

<sup>21</sup> Loebby Loqman dalam Hamdan, *TP Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung, hal. 14.

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 15.

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah TP dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bahan Kuliah Umum FH Unswagati, Cirebon, 17 Juni 2002, hal. 15.



- c. korporasi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan di jalan umum. .

Sehubungan dengan penggunaan hukum pidana sebagai sarana pengayoman masyarakat terhadap tindak pidana korporasi, John C. Coffe mengatakan bahwa:

1. hukum pidana dipandang mampu melaksanakan peranan edukatif dalam mendefinisikan atau menetapkan dan memperkuat batas-batas perbuatan yang dapat diterima (*ecceptable conduct*);
2. hukum pidana bergerak dengan langkah lebih cepat daripada perdata, dengan pidana restitusi lebih cepat memperoleh bagi korban;
3. peradilan perdata terhalang untuk mengenakan sanksi pidana;
4. penuntutan bersama (korporasi dan agennya) memerlukan suatu forum pidana, apabila ancaman pengurangan digunakan untuk mencegah individu. Dari sudut penegakan hukum, peradilan bersama itu cukup beralasan karena lebih murah dibandingkan dengan penuntutan terpisah, dan karena mereka mengijinkan penuntut umum mengikuti kasus itu dalam cara yang terpadu.<sup>24</sup>

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi ini penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap korporasinya sendiri adalah perlu. Hal ini sebabkan kerugian yang diakibatkan oleh macam tindak pidana ini sangat besar untuk individu, masyarakat maupun negara, dan dalam kebijakan pembangunan nasional Indonesia, seyogyanya hal tersebut

---

<sup>24</sup> John C. Coffe, *Corporate Criminal Liability*. Dalam Barda Nawawi Arief : *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, hal. 163.

tidak dilupakan. Pilihan digunakannya pidana denda terhadap korporasi bukanlah tanpa alasan. Dari sudut pandang ekonomi, pidana denda tersebut sangat menarik, karena langsung ditujukan pada hasrat untuk mencari atau memperoleh keuntungan calon pelaku. Di samping itu merupakan pidana dengan biaya murah, sedangkan dari sudut ekonomis dapat dipertanggungjawabkan.

Kebijakan memperluas subjek tindak pidana pada korporasi sudah sesuai dengan perkembangan/dimensi kejahatan masa kini, terlebih dalam menghadapi TPPU yang mengandung ciri sebagai "*transnational and organized crime*". Dalam Kongres PBB mengenai "*Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*", dan berbagai dokumen internasional lainnya yang berkaitan dengan *Money Laundering* dan *Transnational Crime* juga ditegaskan demikian.

Walaupun menurut Undang - Undang TPPU Indonesia, korporasi menjadi subjek TPPU, namun sangat disayangkan kebijakan pertanggungjawaban pidana untuk korporasi di dalam Undang - Undang No. 15 Tahun 2002 dan dalam UU TPPU Amandemen Tahun 2003 masih mengandung beberapa kelemahan.

Pasal 4 (1) Undang - Undang No. 15 Tahun 2002 jo. UU TPPU Amandemen menyatakan : "Apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan/atau kuasa pengurus atas nama korporasi, maka penjatuhan pidana dilakukan baik terhadap pengurus dan/atau kuasa pengurus maupun terhadap korporasi".

Dari perumusan demikian, menurut Barda Nawawi Arief, korporasi seolah-olah baru dapat dipidana apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan/atau kuasa pengurus. Jadi kalau dilakukan oleh karyawan/pegawai/buruh/orang lain bukan pengurus atau bukan kuasa pengurus, maka korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Redaksi Pasal 4 itu terkesan menganut teori identifikasi (teori "*alter ego*"; teori organ) atau teori "*vicarious liability*" yang terbatas (yaitu hanya didasarkan pada "*the delegation principle*", tidak didasarkan pada "*the employment principle*").<sup>25</sup>

Perumusan Pasal 4 ini berbeda dengan perumusan yang ada dalam Undang - Undang Tindak Pidana Ekonomi (Pasal 15 (2) Undang - Undang No. 7 Drt. 1955) dan dalam Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi (Pasal 20 (2) Undang - Undang No. 31 Tahun 1999).

Ancaman pidana denda untuk korporasi yang maksimumnya diperberat sepertiga tidak disertai dengan ketentuan khusus untuk pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi. Di dalam Pasal 11 hanya dinyatakan, bahwa apabila denda tidak dibayar dikenakan pidana penjara pengganti maksimal 3 tahun. Ketentuan demikian jelas hanya tertuju pada "orang", tidak pada korporasi, karena tidak mungkin korporasi dikenakan pidana penjara pengganti.

---

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Catatan Terhadap Implementasi UU No. 15/2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Op. Cit., halaman 184. Menurut "*the delegation principle*", seseorang/korporasi hanya bertanggungjawab atas perbuatan orang lain (sebagai "pengganti") apabila telah mendelegasikan kewenangannya; menurut "*the employment principle*", majikan (employer) adalah penanggungjawab utama dari perbuatan buruh/karyawan yang melakukan perbuatan dalam ruang lingkup tugas/pekerjaannya.

Dengan adanya beberapa kelemahan di atas, maka implementasi Undang - Undang TPPU termasuk dalam UU TPPU Amandemen terhadap korporasi dikhawatirkan tidak efektif. Dikatakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan strategis dalam menghadapi TPPU seyogyanya disesuaikan dengan karakteristik TPPU sebagai salah satu mata rantai kegiatan "*transnational organized crime*". Ini berarti, sasarannya justru harus tertuju pada bagaimana melemahkan/menghancurkan organisasinya yang berbentuk korporasi/badan hukum itu. Menghancurkan organisasi/korporasi dengan menggunakan pidana tambahan berupa "pencabutan izin usaha" atau "pembubaran korporasi" seperti diatur dalam Pasal 5 Undang - Undang No. 15 Tahun 2002 tidaklah mudah, karena kemungkinan besar korporasinya sendiri bersifat transnational atau bahkan merupakan organisasi gelap atau "*underground organization*". Jadi yang paling mungkin adalah mengenakan pidana denda tinggi atau merampas harta kekayaan/asetnya yang merupakan "darah" bagi suatu organisasi/korporasi. Oleh karena itu, strategi kebijakan pidana harus lebih bersifat institusional, artinya lebih tertuju pada institusinya (korporasi), bukan bersifat individual.<sup>26</sup>

Dengan lemahnya aturan pelaksanaan sanksi pidana denda untuk korporasi, dan tidak adanya ketentuan untuk merampas/menyita dan melelang harta kekayaan korporasi untuk membayar denda yang tidak dibayarnya (sebagai alternatif/alat pemaksa lain dari pidana penjara pengganti), maka dapat dikatakan sistem pidanaan dalam Undang -

---

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya yang terkait*, Dalam Jurnal Hukum dan Bisnis. Vol. 22 No. 3 Tahun 2003, hal. 22.

Undang No. 15 Tahun 2002 dan UU TPPU Amandemen kurang berorientasi pada sistem pertanggungjawaban pidana yang bersifat institusional.

Menghadapi kondisi kebijakan formulasi yang demikian, ditegaskan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa dalam implementasinya harus ada keberanian dan *inovasi* dari aparat penegak hukum, khususnya hakim, untuk melakukan kontruksi hukum yang bersumber pada teori/ilmu hukum, pendapat para ahli, atau bersumber dari ide-ide dasar yang secara konseptual dapat dipertanggungjawabkan.<sup>27</sup>

Akhirnya dapat dikemukakan di sini bahwa kelemahan dalam UUTPPU baik sebelum maupun sesudah amandemen, terutama masalah pidanaan terhadap korporasi, implementasinya tergantung kepada aparat penegak hukum, khususnya hakim untuk menemukan hukum sehingga korporasi dapat dijatuhi pidana.

### 3. Sanksi Pidana

Kebijakan sanksi pidana adalah kebijakan menetapkan jenis dan berat-ringannya pidana yang dilaksanakan pada “tahap penetapan pidana” dari mekanisme penegakan hukum pidana.<sup>28</sup>

Dalam UU TPPU tindak pidana yang dirumuskan di dalamnya merupakan kejahatan, berarti bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dikenakan ancaman hukuman lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Dengan

---

<sup>27</sup> Loc. Cit.

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Op. Cit., hal. 91.

digolongkannya sebagai tindak kejahatan, maka diharapkan akan dapat lebih terbentuk ketaatan yang tinggi terhadap ketentuan dalam UU TPPU.

Secara tradisional sebenarnya setiap sanksi pidana mempunyai pengaruh pencegahan umum (*preventie general/general deterrent*) dan pencegahan khusus (*preventie special/special deterrent*). Dengan sanksi pidana yang tinggi diharapkan undang-undang itu dapat berlaku efektif. Anggapan seperti itu tidak selamanya ada dalam kenyataan, faktor yang justru sangat berperan dalam upaya penegakan hukum termasuk adalah faktor kepastian dan keajegan diterapkannya sanksi pidana itu sendiri.

Dalam kepustakaan sering dinyatakan bahwa kepastian diterapkannya sanksi (*certainty of punishment* atau *certainty of conviction*) lebih penting dan juga lebih mempunyai daya pencegahan/penangkal dari pada beratnya sanksi pidana (*severity of punishment*) itu sendiri. Wolf Middelndorf, pernah mengatakan:<sup>29</sup>

*"Certainty of conviction is the ideal deterrent, and more significant element in general prevention than the severity of penalties".*

Untuk mengetahui perumusan sanksi pidana dalam UU TPPU setelah Amandemen dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

---

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, *Tinjauan Terhadap Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No. 14 Tahun 1992) Dari Sudut Politik Hukum Pidana*, dalam Masalah-Masalah Hukum No. 3 Tahun 1993, hal. 14.

BAB	PS	TINDAK PIDANA	PIDANA	RUMUSAN SANKSI PIDANA
II (TPPU)	3	<p>(1) Setiap orang yang dengan sengaja :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;</li> <li>b. mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;</li> <li>c. membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;</li> <li>d. menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;</li> <li>e. menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;</li> <li>f. membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;</li> <li>g. menukarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang surat berharga lainnya; atau</li> <li>h. menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang.</li> </ul> <p>(2) Setiap orang yang melakukan percobaan pembantuan, atau permupakatan jahat untuk melakukan TPPU.</p> <p>Menurut ketentuan umum Pasal 2 UU TPPU Amandemen : Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. korupsi;</li> <li>b. penyuapan;</li> </ul>	<p>Dalam UU TPPU Penjara 5 th – 15 tahun dan denda 5 Milyar – 15 M ilyar</p> <p>Dalam UU TPPU Amandemen Penjara 5 th – 15 tahun dan denda 100 juta – 15 M ilyar</p> <p>Penjara 5 th – 15 tahun dan denda 100 juta – 15 M ilyar</p>	<p>Kumulatif</p> <p>Kumulatif</p>

		c. penyelundupan barang; d. penyelundupan tenaga kerja; e. penyelundupan imigran; f. di bidang perbankan; g. di bidang pasar modal; h. di bidang asuransi; i. narkotika; j. psikotropika; k. perdagangan manusia; l. perdagangan senjata gelap; m. penculikan; n. terorisme; o. pencurian; p. penggelapan; q. penipuan; r. pemalsuan uang; s. perjudian; t. prostitusi; u. di bidang perpajakan; v. di bidang kehutanan; w. di bidang lingkungan hidup; x. di bidang kelautan; atau y. tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) Tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Harta Kekayaan yang dipergunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme dipersamakan sebagai hasil tindak pidana terorisme.		
	4	TPPU dilakukan oleh pengurus dan/atau kuasa pengurus	Yang dipidana : -pengurus, dan -korporasi	
	5	a. pidana pokok utk. Korporasi; b. pidana tambahan utk. korporasi	Denda maksimum ditambah 1/3 -pencabutan izin usaha; -pembubaran korporasi;	Tunggal
	6	Menerima atau menguasai a. penempatan ; b. pentransferan; c. pembayaran ; d. hibah; e. sumbangan; f. penitipan; g. penukaran, harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.	Penjara 5 - 15 tahun dan denda 100 juta - 15 milyar	Kumulatif
	7	Tiap WNI/korporasi Indonesia di luar wilayah RI memberi bantuan, kesempatan, sarana, keterangan utk. Terjadinya TPPU.	Penjara 5 th - 15 tahun dan denda 5 Milyar - 15 Milyar	Kumulatif



III (TP YANG BERKAITAN DGN. TPPU)	8	Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dengan sengaja tdk lapor kpd PPATK sebagaimana dimaksud dlm Pasal 13 (1), yaitu : a. transaksi keuangan yang mencurigakan ; b. transaksi keuangan tunai 500 juta atau lebih, dilakukan dlm satu kali/beberapa kali transaksi dlm satu hari kerja.	Denda 250 juta - 1 milyar	Tunggal
	9.	tiap orang yang tdk lapor membawa uang tunai 100 juta atau lebih ke dlm/luar wilayah RI.	Denda 100 juta - 300 juta	Tunggal
	10	PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim, atau orang lain yang bersangkutan dengan TPPU melanggar Pasal 39:1 & Pasal 41 :1 (membuka identitas pelapor).	1 - 3 tahun penjara	Tunggal
	10A	PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim yang lalai melanggar Pasal 10 A ayat (1) dan (2)	Pidana penjara 1 tahun -- 3 tahun Jika dilakukan dengan sengaja 5 - 15 tahun penjara	
	11	Tdk. Mampu membayar denda	Diganti pidana penjara maksimal 3 th.	
	12	Tindak pidana dalam Bab II & III adlh kejahatan		
	13	Wajib Melaporkan kepada PPATK		

Kebijakan pola perumusan ancaman sanksi pidana dalam UU TPPU dan UU TPPU Amandemen menggunakan pola "kumulatif" dan "tunggal". Dengan pola kumulatif (pidana penjara 5 - 15 tahun dan denda 100 juta - 15 miliar) berarti tidak ada pilihan lain bagi hakim kecuali harus menerapkan kedua jenis sanksi pidana tersebut. Untuk tindak pidana yang dilakukan korporasi diancam dengan pidana pokok denda yang maksimumnya ditambah 1/3 dan ada pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi. Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda diganti dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Untuk pola perumusan ancaman pidana

tunggal yaitu penjara saja, atau denda saja (bagi tindak pidana lain yang berkaitan dengan TPPU), maka terhadap pelaku tindak TPPU tidak ada pilihan lain, kecuali ancaman pidana yang diancamkan tersebut.

Untuk subjek TPPU berupa “orang”, Undang - Undang No. 15 Tahun 2002 dan UU TPPU Amandemen, Pasal 3 merumuskan jenis pidana pokok penjara dan denda dengan sistem minimal khusus secara kumulatif (tidak ada pidana tambahan atau sanksi “tindakan”), sedangkan untuk “korporasi” diancam dengan pidana pokok denda (yang maksimumnya ditambah 1/3) dan ada pidana tambahan berupa “pencabutan izin usaha” dan/atau “pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi” (Pasal 5).

Perumusan pidana denda yang cukup tinggi (antara 100 juta - 15 miliar) secara kumulatif dengan pidana penjara yang juga cukup tinggi (antara 5 - 15 tahun) diperkirakan tidak akan efektif, walaupun ada Pasal 11 yang mengatur pidana penjara pengganti denda paling lama 3 tahun (menyimpang dari Pasal 30 KUHP). Menurut Barda Nawawi Arief, alasannya adalah :<sup>30</sup>

- (a) Dalam Pasal 11 tidak disebutkan upaya-upaya penekan lainnya agar terpidana mau membayar denda, misal dengan menyita dan melelang harta bendanya untuk membayar denda itu atau diambil dari pendapatan terpidana; dan apabila tidak ada (tidak cukup), baru dikenakan pidana pengganti yang lamanya sama dengan maksimum pidana penjara yang

---

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Catatan Terhadap Implementasi UU No. 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Op. Cit., halaman 182.

diancamkan (Bandingkan dengan Pasal 18 Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 76 Konsep RUU KUHP 2000).

Pasal 76 Konsep :

- (1) Denda dapat dibayar dengan cara mencicil dalam tenggang waktu sesuai dengan keputusan hakim.
- (2) Jika denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dibayar penuh dalam tenggang waktu yang diterapkan, maka untuk denda yang tidak dibayar tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan pidana.
- (3) Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak memungkinkan, maka denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, atau pidana penjara, dengan ketentuan denda tersebut tidak melebihi denda Kategori I.
- (4) Lamanya pidana pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah :
  - a. Untuk pidana kerja sosial pengganti, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dan ayat (4);
  - b. untuk pidana pengawasan, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
  - c. Untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun

(b) Pidana penjara pengganti denda yang disebutkan dalam Pasal 11 Undang

- Undang No. 15 Tahun 2002 dan UU TPPU Amandemen itu maksimumnya hanya 3 tahun. Jadi di bawah pidana minimal khusus yang diancamkan (yaitu 5 tahun). Hal ini dikhawatirkan tidak membawa pengaruh bagi terpidana, karena terpidana dapat saja berpikiran bahwa buat apa membayar denda, karena tidak membayar dendapun dia akan tetap terkena pidana penjara minimal 5 tahun.

(c) Ketentuan Pasal 11 mengenai pidana penjara pengganti denda ini tidak mungkin diterapkan untuk "korporasi". Oleh karena itu pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi (apalagi diperberat) tidak akan efektif

karena dalam Undang - Undang ini tidak ada pasal khusus untuk pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi.

- (d) Undang - Undang mencantumkan ancaman pidana minimal khusus, namun tidak memuat aturan/pedoman penerapan pidananya secara khusus. Hal inipun dapat menimbulkan masalah, karena dilihat dari sistem pemidanaan, jumlah ancaman pidana (minimal maupun maksimal) hanya merupakan salah satu sub-sistem yang tidak dapat begitu saja diterapkan/dioperasionalkan hanya dengan dicantumkan di dalam perumusan delik. Untuk dapat diterapkan, harus disertai dengan sub-sistem mengenai aturan pemidanaan/pedoman penerapannya terlebih dahulu.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa dalam UU TPPU sekaligus dalam UU TPPU Amandemen karena khusus perumusan sanksi pidana tidak ada perubahan hanya masalah berat ringannya pidana saja, sedangkan pedoman pemidanaan tidak ada perubahan ataupun tambahan, sehingga masalah pemidanaan tersebut masih terdapat kelemahan. Mengenai pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana khususnya mengenai sistem dan strategi pemidanaan dalam UU TPPU dan UU TPPU Amandemen mengandung kelemahan antara lain perumusan jenis pidana pokok yang berlaku kaku dan imperatif, yaitu menggunakan sistem tunggal (hanya pidana denda) untuk korporasi dan sistem kumulatif (penjara dan denda ) untuk orang. Di samping itu tidak ada aturan/pedoman penerapan pidana minimal khusus dan tidak ada aturan khusus untuk korporasi yang tidak membayar denda.

Selain itu pertanggungjawaban korporasi dalam UU TPPU (Pasal 4 ayat (1)) masih sangat terbatas dan tidak konsisten dengan perumusan yang ada dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi dan Undang-undang Korupsi. Sistem dan strategi pemidanaan dalam UU TPPU kurang diorientasikan dalam UU TPPU sebagai *transnational organized crime*, yaitu masih bersifat individual dan kurang bersifat institusional (kurang terfokus pada korporasi sebagai institusi/organisasi).

#### **B. Sinkronisasi Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam UU TPPU Indonesia Dengan UU TPPU di Negara Ascan Dalam Upaya Menanggulangi Kejahatan Transnasional**

Kejahatan pencucian uang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian, maka kejahatan ini termasuk pula dalam kejahatan perekonomian. Perhatian dunia internasional terhadap kejahatan ekonomi sangat wajar, mengingat dimensi, ruang lingkup dan dampak dari kejahatan ekonomi ini sangat luas dan dapat melampaui batas-batas teritorial. Diakui ada hubungan yang sangat erat dan saling ketergantungan, antara tatanan sosial dan tatanan ekonomi secara nasional maupun internasional. Sebagai masalah sosio-politik, dikemukakan dalam kongres PBB ke-7, bahwa kejahatan sebagai produk sosial disebabkan oleh beraneka ragam faktor dan di antaranya faktor ekonomilah yang memegang peranan utama.

Dampak negatif dari kejahatan terhadap program-program pembangunan nasional di negara-negara yang sedang berkembang sangatlah jelas dan berbahaya. Program-program pembangunan nasional di negara-negara

berkembang, banyak dirintangi oleh semakin meningkatnya kejahatan ekonomi (*economic crimes*), seperti penggelapan, penipuan, penyelundupan, penghindaran pajak, penyalahgunaan bantuan (milik umum dan negara), korupsi yang merajalela, penyuapan dan penyalahgunaan kekuatan-kekuatan ekonomi oleh korporasi nasional dan transnasional.

Dalam pertemuan tahunan kedua pejabat senior Asean mengenai kejahatan lintas negara/transnasional (*"The 2 Asean Annual Senior Officials Meeting On Transnational Crime"*) tanggal 17 Mei 2002 telah diterima program kerja untuk mengimplementasikan "Rencana Aksi Asean Menghadapi Kejahatan Transnasional" (*"The Asean Plan of Action To Combat Transnational Crime"*), antara lain dalam menghadapi "*Money Laundering*" (tindak pidana pencucian uang). Program kerja dalam menghadapi TPPU itu meliputi antara lain:<sup>31</sup>

- (1) Pertukaran informasi, antara lain mengkompilasi peraturan perundang-undangan nasional "*Anti Money Laundering*", melakukan kajian mengenai kecenderungan dan modus operandi TPPU di Asean;
- (2) Meninjau masalah hukum khususnya masalah kriminalisasi TPPU di Negara Asean;
- (3) Masalah kerjasama dan koordinasi penegakan hukum;
- (4) Mengembangkan program pelatihan;

---

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief, *Implementasi UU Pencucian Uang Republik Indonesia Dalam Menunjang Rencana Aksi Asean Menghadapi Kejahatan Transnasional*, Makalah pada Lokakarya, Dirjen Kerjasama sean Deparlu Republik Indonesia, Yogyakarta, 26 September 2002.

(5) Membangun kemampuan institusional dalam menganalisis informasi kegiatan pencucian uang;

(6) Mengembangkan kerja sama ekstra regional.

Dengan telah diundangkannya Undang - Undang No. 15 Tahun 2002 maka jelas langkah Indonesia itu telah sesuai dan menunjang program kerja dan rencana aksi Asean dalam menghadapi kejahatan transnational khususnya Tindak Pidana Pencucian Uang. Bahkan dapat dikatakan telah mendahului program kerja Asean itu karena Undang - Undang TPPU Indonesia diundangkan pada tanggal 17 April 2002, sementara program kerja Asean itu baru diterima pada tanggal 17 Mei 2002.<sup>32</sup>

Karena dipandang masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2002, pada tanggal 13 Oktober 2003 ditetapkan perubahan Undang-undang No. 15 Tahun 2002 dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003.

Undang - Undang No. 15 Tahun 2002 tentang TPPU terdiri dari 10 (sepuluh) Bab 46 Pasal yang uraiannya adalah sebagai berikut :

Bab I : Ketentuan Umum (Pasal 1 dan 2);

Bab II : Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 3 s/d 7);

Bab III : Tindak pidana lain yang berkaitan dengan TPPU (Pasal 8 s/d 12);

Bab IV : Pelaporan (Pasal 13 s/d 17);

---

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arief, *Implementasi UU Pencucian Uang Republik Indonesia Dalam unjang Rencana Aksi Asean Menghadapi Kejahatan Transnasional*, Makalah pada Lokakarya : in Kerjasama Asean Deparlu Republik Indonesia, Hotel Melia Purosani, Yogyakarta, 26 ember 2002, halaman 2.

- Bab V : PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Pasal 18 s/d 29);
- Bab VI : Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Pasal 30 s/d 38);
- Bab VII : Perlindungan Bagi Pelapor dan Saksi (Pasal 39 s/d 43);
- Bab VIII : Kerja sama Internasional (Pasal 44);
- Bab IX : Ketentuan Peralihan (Pasal 45);
- Bab X : Ketentuan Penutup (Pasal 46).

Dalam UU TPPU Amandemen, pasal-pasal yang dilakukan perubahan adalah Pasal 1 angka 4 dan angka 6, Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) Pasal 9, menambah Pasal 10 A, Pasal 13 ayat (1), (2), ayat (5) serta menambah dua ayat baru menjadi ayat (1a) dan ayat (6a), Pasal 15, Pasal 16 ayat (1) dan (6), menambah Pasal 17 A, merubah penjelasan Pasal 25 ayat (3), Pasal 26, Pasal 29, menambah Pasal 29 A, 29B, Pasal 33 ayat (4), Pasal 44, menambah Pasal 44A, Pasal 44 B.

Latar belakang perubahan Undang-undang No. 15 Tahun 2002 dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 karena Undang-undang No. 15 Tahun 2002, dirasakan belum memenuhi standar internasional serta perkembangan proses peradilan tindak pidana pencucian uang sehingga perlu diubah, agar upaya pencegahan dan pembantasan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan secara efektif.

Dalam Penjelasan Umum, Undang-undang No. 25 Tahun 2003 disebutkan bahwa :



“Hal-hal yang diantaranya dirubah adalah mengenai cakupan pengertian Penyedia Jasa Keuangan diperluas tidak hanya bagi setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan tetapi juga meliputi jasa lainnya yang terkait dengan keuangan. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi pelaku tindak pidana pencucian uang yang memanfaatkan bentuk Penyedia Jasa Keuangan yang ada di masyarakat namun belum diwajibkan menyampaikan laporan transaksi keuangan dan sekaligus mengantisipasi munculnya bentuk Penyedia Jasa Keuangan baru yang belum diatur dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2002.

Pengertian Transaksi Keuangan mencurigakan diperluas dengan mencantumkan transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Pembatasan jumlah hasil tindak pidana sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, atau nilai yang setara yang diperoleh dari tindak pidana dihapus, karena tidak sesuai dengan prinsip yang berlaku umum bahwa untuk menentukan suatu perbuatan dapat dipidana tidak tergantung pada besar atau kecilnya hasil tindak pidana yang diperoleh.

Cakupan tindak pidana asal (*predicate crime*) diperluas untuk mencegah berkembangnya tindak pidana yang menghasilkan Harta Kekayaan dimana pelaku tindak pidana berupaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil tindak pidana namun perbuatan tersebut tidak dipidana. Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait yang mempidana tindak pidana asal antara lain Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika; Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jangka waktu penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dipersingkat, yang semula 14 (empat belas) hari kerja menjadi tidak lebih dari 3 (tiga) hari kerja setelah Penyedia Jasa Keuangan mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan. Hal ini dimaksudkan agar Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana dan pelaku tindak pidana pencucian uang dapat segera dilacak.

Penambahan ketentuan baru yang menjamin kerahasiaan penyusunan dan penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang disampaikan kepada PPATK atau penyidik (anti-tipping off). Hal ini dimaksudkan antara lain untuk mencegah berpindahnya hasil tindak

pidana dan lolosnya pelaku tindak pidana pencucian uang sehingga mengurangi efektifitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Ketentuan kerja sama bantuan timbal balik di bidang hukum (*mutual legal assistance*) dipertegas agar menjadi dasar bagi penegak hukum Indonesia menerima dan memberikan bantuan dalam rangka penegakan hukum pidana pencucian uang. Dengan adanya ketentuan kerja sama bantuan timbal balik merupakan bukti bahwa Pemerintah Indonesia memberikan komitmennya bagi komunitas internasional untuk bersama-sama mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Kerja sama internasional telah dilakukan dalam forum yang tidak hanya bilateral namun regional dan multilateral sebagai strategi untuk memberantas kekuatan ekonomi para pelaku kejahatan yang tergabung dalam kejahatan yang terorganisir.

Namun demikian pelaksanaan kerja sama bantuan timbal balik harus tetap memperhatikan hukum nasional masing-masing negara serta kepentingan nasional dan terutama tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 44 UU TPPU Amandemen, Bab VIII mengenai Bantuan Timbal

Balik Dalam Masalah Tindak Pidana Pencucian Uang, ditegaskan bahwa :

- (1) Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, dapat dilakukan kerja sama bantuan timbal balik di bidang hukum dengan negara lain melalui forum bilateral atau multilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama bantuan timbal balik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ini dapat dilaksanakan dalam hal negara dimaksud telah mengadakan perjanjian kerja sama bantuan timbal balik dengan Negara Republik Indonesia atau berdasarkan prinsip resiprositas.
- (3) Permintaan kerja sama bantuan timbal balik dari dan ke negara lain disampaikan kepada dan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan perundang-undangan.
- (4) Menteri dapat menolak permintaan kerja sama bantuan timbal balik dari negara lain dalam hal tindakan yang diajukan oleh negara lain tersebut dapat mengganggu kepentingan nasional atau permintaan tersebut berkaitan dengan penuntutan kasus politik atau penuntutan yang berkaitan dengan suku, agama, ras, kebangsaan, atau sikap politik seseorang.

Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Undang-undang ini, Undang-undang

mengenai hukum acara pidana, undang-undang mengenai hubungan luar negeri, dan undang-undang mengenai perjanjian internasional.

Perjanjian kerja sama bantuan timbal balik antara lain mengatur tentang prosedur komunikasi, tata cara penyampaian surat rogatori, persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyampaikan permintaan bantuan.

Menteri dalam menerima atau menolak kerja sama bantuan timbal balik berkoordinasi dengan penegak hukum dan instansi terkait.

Selanjutnya dalam Pasal 44A UU TPPU Amandemen, ditegaskan bahwa :

- (1) Kerja sama bantuan timbal balik dengan negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 antara lain meliputi :
  - a. pengambilan barang bukti dan pernyataan seseorang, termasuk pelaksanaan surat rogatori;
  - b. pemberian barang bukti berupa dokumen dan catatan lain;
  - c. identifikasi dan lokasi keberadaan seseorang ;
  - d. pelaksanaan permintaan untuk pencarian barang bukti dan penyitaan;
  - e. upaya untuk melakukan pencarian, pembekuan, dan penyitaan hasil kejahatan;
  - f. mengusahakan persetujuan orang – orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan di negara peminta;
  - g. bantuan lain yang sesuai dengan tujuan pemberian kerja sama timbal balik yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka melakukan kerja sama bantuan timbal balik, menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan dapat meminta pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan kepolisian berupa penggeledahan, pembokiran, penyitaan, pemeriksaan surat, pengambilan keterangan, atau hal-hal lain yang sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang ini.
- (3) Barang bukti, pernyataan, dokumen, atau catatan lain merupakan alat bukti yang digunakan dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Surat rogatori dalam ketentuan ini adalah surat dari negara lain yang berisi permintaan pemeriksaan untuk mendapatkan keterangan mengenai tindak pidana

pencucian uang yang dilakukan di bawah sumpah dan di hadapan penyidik, penuntut umum, atau hakim di Indonesia dan sebaliknya. Surat rogatori ini dikenal dengan *letter of rogatory*.

Di antara Bab VIII dan Bab IX ditambah 1 bab baru menjadi Bab VIIIA, yang berisikan Pasal 44B menegaskan bahwa dalam hal ada perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK dapat melaksanakan ketentuan tersebut menurut undang-undang ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dilakukannya kerja sama internasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang karena harta kekayaan yang ditempatkan (*placement*), ditransfer (*layering*), atau yang diintegrasikan (*integration*) tidak tertutup kemungkinan peredaran harta kekayaan tersebut dari atau ke luar negeri sehingga dengan kerja sama ini diharapkan dapat dilakukan upaya pencegahan atau pemberantasan secara lebih efektif.

Kerja Sama Internasional (*Internatinal Cooperation*) termasuk pula mengefektifkan upaya penanggulangan TPPU secara regional, khususnya dalam kawasan ASEAN. Upaya demikian diperlukan adanya harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan formulasi TPPU di Indonesia dengan berbagai negara ASEAN.

Mengenai perumusan TPPU di berbagai negara Asean dapat dilihat sebagai berikut :

1. Malaysia

Di Malaysia dengan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2001 ("*Anti Money Laundering Act 2001*", Act 613, 5 July, 2001). Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa :<sup>33</sup>

- (1) Setiap orang yang melakukan/terlibat, atau mencoba melakukan atau membantu dilakukannya "Pencucian Uang".
- (2) Seseorang dapat dipidana berdasar ketentuan Ayat (1) terlepas apakah ada penghukuman yang berkaitan dengan "*serious offence*" atau "*foreign serious offence*" atau penuntutan telah dilakukan terhadap tindak pidana itu.

Selanjutnya Pasal 3 (1) merumuskan pengertian pencucian uang ialah perbuatan seseorang yang :

- (a) melakukan/terlibat (langsung/tidak langsung) dalam suatu transaksi harta kekayaan yang berasal dari perbuatan melawan hukum ("*Unlawful activity*");
- (b) memperoleh, menerima, memiliki, menyembunyikan, mentransfer, mengubah, menukar, membawa, menyimpan, menggunakan, memindahkan, dari atau membawa ke Malaysia, harta kekayaan yang berasal dari "*Unlawful activity*" atau
- (c) menyembunyikan, menyamarkan, atau merintangi penentuan asal usul, tempat, penyaluran, penempatan/pembagian, hak-hak yang terkait dengan atau kepemilikan dari harta kekayaan yang berasal dari "*Unlawful activity*".

Di mana :

- Orang itu (berdasarkan kondisi objektif) mengetahui atau beralasan untuk meyakini bahwa harta kekayaan itu berasal dari "*Unlawful activity*"; atau
- Orang itu (dilihat dari perbuatannya) tanpa alasan pemaaf yang masuk akal, gagal mengambil langkah-langkah untuk memastikan apakah harta itu berasal dari "*Unlawful activity*" atau tidak.

*Unlawful activity* adalah setiap aktivitas yang berhubungan dengan "*Serious offence*" atau "*foreign serious offence*", sedangkan "*serious offence*"

---

<sup>33</sup> Malaysia, "*Anti-Money Laundering Act 2001*", Act 613, 5 Juli, 2001.

ditentukan dalam "the second Schedule" (lampiran ke-2) yaitu terdapat 119 tindak pidana.

Pasal 4 :

- (1) Setiap orang yang melakukan/terlibat, atau mencoba melakukan atau membantu dilakukannya pencucian uang;
- (2) Seseroang dapat dipidana berdasar ketentuan ayat (1) terlepas apakah ada penghukuman yang berkaitan dengan seious offence atau foreign serious offence atau penuntutan telah dilakukan tindak pidana itu.

Perbuatan/tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas dipidana dengan pidana denda maksimal 5 juta ringgit, atau pidana penjara maksimal 5 tahun, atau kedua-duanya yaitu pidana denda dan penjara.

## 2. Filipina

Undang-undang Tindak pidana Pncucian Uang No. 9160 Tahun 2001.<sup>34</sup>

SEC. 4. :

*Money Laundering Offence-money laundering is a crime where by the proceeds of an unlawful activity are transacted, there by making them appear to have originated from legitimate sources. It is committed by the following:*

- (a) Any person knowing that any monetary instrument or property represents, involves, or relates to, the proceeds of any unlawful activity, transacts or attempts to transact said monetary instrument or property.*
- (b) Any person knowing that any monetary instrument or property involves the proceeds of any unlawful activity, performs or fails to perform any act as a result of which he facilitates the offence of money laundering referred to in paragraph (a) above.*
- (c) Any person knowing that any monetary instrument or property is required under this Act to be disclosed and filed with the Anti Money Laundering Council (AMLC), fails to do so.*

Pidana yang diancamkan untuk tindak pidana dalam Pasal 4 (a) di atas adalah 7 – 14 tahun pidana penjara dan denda antara 3 juta Philippine pesos (Php 3,000,000.00) tetapi tidak lebih dari dua kali nilai harta kekayaan

---

<sup>34</sup> Philippines, *Anti Money Laundering Act of 2001*", No.9160, 23 July, 2001.

yang terlibat dalam tindak pidana yang bersangkutan. Untuk tindak pidana dalam Pasal 4 (b) 4-7 tahun pidana penjara dan denda antara 1,5 –3 juta Php. Untuk tindak pidana dalam Pasal 4 (c) 6 bulan – 4 tahun pidana penjara dan dan/atau denda antara 100 ribu-500 ribu Php.

Dalam Pasal 3 (i) dijelaskan bahwa *unlawful activity* terdiri dari 14 kelompok tindak pidana; yang dirinci lagi dalam aturan pelaksanaannya menjadi 114 tindak pidana. 114 kelompok kejahatan tersebut adalah sebagai berikut :<sup>35</sup>

- (1) *Kidnapping for ransom under Article 267 of Act No. 3815, otherwise known as the Revised Penal Code, as amended;*
- (2) *Section 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9 of Article Two of Republic Act No. 6425, as amended, otherwise known as the Dangerous Drugs Act of 1972;*
- (3) *Section 3 paragraphs B, C, E, G, H, and I of Republic Act No. 3019, as amended; otherwise known as the Anti Graft and Corrupt Practices Act;*
- (4) *Plunder under Republic Act No. 7080, as amended;*
- (5) *Robbery and extortion under Articles 294, 295, 296, 299, 300, 301 and 302 of the Revised Penal Code, as amended;*
- (6) *Jueteng and Masiao punished as illegal gambling under Presidential Decree No. 1602;*
- (7) *Piracy on the high seas under the Revised Penal Code, as amended and Presidential Decree No. 532;*
- (8) *Qualified theft under Article 310 of the Revised Penal Code, as amended;*
- (9) *Swindling under Article 315 of the Revised Penal Code, as amended;*
- (10) *Smuggling under Republic Act Nos. 455 and 1937;*
- (11) *Violations under Republic Act No. 8792, otherwise known as the Electronic Commerce Act of 2000;*
- (12) *Hijacking and other violations under Republic Act No. 6235; destructive arson and murder, as defined under the Revised Penal Code, as amended, including those perpetrated by terrorists against non combatant persons and similar targets;*
- (13) *Fraudulent practices and other violations under Republic Act No. 8799, otherwise known as the securities regulation code of 2000;*
- (14) *Felonies or offences of a similar nature that are punishable under the penal laws of other countries.*

---

<sup>35</sup> Philippines, *Anti Money Laundering Act of 2001*", No.9160, 23 July, 2001.

Dari Ke-14 kelompok tindak pidana di atas, di dalam Rulle 3.1 (Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang No. 9160) (*Implementing Rules and Regulations Republic Act No. 9160 Anti Money Laundering Act of 2001*) tanggal 8 Maret 2002, dirinci lagi menjadi 114 tindak pidana.

3. UU TPPU Indonesia (Undang - Undang No. 15 Tahun 2002, 17 April 2002) yang dirubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 Tanggal 13 Oktober 2003.

Dalam Pasal 3 Bab II Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa :

(1) Setiap orang dengan sengaja:

- a. menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyediaan Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
- b. mentransfer Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
- c. membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- d. menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;



- e. menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
- f. membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Terhadap Harta Kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang.

Selanjutnya dalam Pasal 2 Ketentuan Umum menegaskan bahwa hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana :

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. penyelundupan barang;
- d. penyelundupan tenaga kerja;
- e. penyelundupan imigran;
- f. di bidang perbankan;
- g. di bidang pasar modal;

- h. di bidang asuransi;
- i. narkotika;
- j. psikotropika;
- k. perdagangan manusia;
- l. perdagangan senjata gelap;
- m. penculikan;
- n. terorisme;
- o. pencurian;
- p. penggelapan;
- q. penipuan;
- r. pemalsuan uang;
- s. perjudian;
- t. prostitusi;
- u. di bidang perpajakan;
- v. di bidang kehutanan;
- w. di bidang lingkungan hidup;
- x. di bidang kelautan; atau
- y. tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat)

Tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Berdasarkan ketentuan bahwa "tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan

tindak pidana menurut hukum Indonesia”, maka Undang-undang ini dalam menentukan Hasil tindak pidana menganut asas kriminalitas ganda (*double criminality*).

Harta Kekayaan yang dipergunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme dipersamakan sebagai hasil tindak pidana terorisme.

4. Myanmar (*The Control of Money Laundering Law No. 6/2002, 17<sup>th</sup> June, 2002*).<sup>36</sup>

Dalam Chapter III mengenai *Money Laundering Offences* Pasal 5 disebutkan bahwa :

- (a) *This law shall apply to the offences of illegally converting, transferring, concealing, obliterating or disguising of money and property obtained from the commission of any of the following offences to legalize the same:*
- (1) *offences committing under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Law;*
  - (2) *trafficking and smuggling of women and children;*
  - (3) *undertakings of a financial institution without the licence issued by the Central Bank of Myanmar;*
  - (4) *theft and smuggling out of the country of antiques and articles of cultural heritage;*
  - (5) *illegal trafficking in arms, ammunition and explosives;*
  - (6) *counterfeiting money, using and prossessing thereof;*
  - (7) *hijacking of aircraft, vessel or any type of vehicle;*
  - (8) *cyber crimes committed by acts of terrorism;*
  - (9) *offences committed by acts of terrorism;*
  - (10) *offences prescribed by the government by notification from time ti time;*
- (b) *This Law shall also be applicable to the commission of transnational offences contained in sub section (a);*
- (c) *The amount of value of money and property realting to offences contained in sub sections (a) and (b) shall be as prescibed by the Central Control Board.*

---

<sup>36</sup> Myanmar, *The Control of Money Laundering Law No. 6/2002, 17<sup>th</sup> June, 2002.*

Selanjutnya dalam *Chapter X* mengenai *Offences and Penalties*

Pasal 22 disebutkan :

*Whoever commits any of the following acts in committing any offence contained in the narcotic drugs and psikotropic substances law shall, on conviction, be punished with imprisonment for term which may extend from minimum of 10 years to a maximum of an unlimited period :*

- (a) concealing or obliterating of money and property obtained by commission of an offence, so that action may not be taken;*
- (b) converting, transferring or disguising of money and property relating to an offence so as to appear to have been acquired from a legitimate source.*

Untuk tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 22 di atas yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Psikotropika adalah pidana penjara 10 tahun dan maksimal tidak terbatas (*unlimited period*).

Pasal 23 menyebutkan bahwa :

*Whoever converts, transfers, conceals, obliterates, or disguises money and property obtained in sub section (a) and (b) of section 5, so as to appear to have been acquired from a legitimate source except any offence contained in section 22 shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to 10 years and may also be liable to a fine.*

Untuk Tindak pidana Pencucian Uang yang berasal dari delik-delik dalam Pasal 5 (a) dan (b) adalah pidana penjara maksimal 10 tahun dan dapat dijatuhi pidana denda.

Berdasarkan perumusan TPPU dari UU TPPU Indonesia dan negara Asean lainnya di atas mengenai implementasinya masih patut dikaji, antara lain beberapa kelemahan dan kendala dalam penegakan hukumnya serta keterkaitan dan kesesuaiannya dengan Undang - Undang TPPU di negara-negara Asean lainnya. Dilihat dari aspek kerjasama regional, khususnya Asean, masalahnya adalah seberapa jauh ada harmonisasi dan sinkronisasi antara kebijakan legislasi

dalam Undang - Undang TPPU Indonesia dan Undang - Undang TPPU di negara Asean lainnya.

Untuk mengkaji atau menganalisis masalah di atas, diperlukan bahan perbandingan yang cukup dari Undang - Undang TPPU Indonesia dan Undang - Undang terkait lainnya di berbagai negara Asean. Hal ini tentunya tidak mudah. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini hanya mencoba melakukan analisis umum yang dikaitkan dengan beberapa Undang - Undang TPPU negara Asean lainnya (khususnya Myanmar, Filipina, dan Malaysia). Adapun ruang lingkup yang dianalisis meliputi : masalah "*predicate offence*" dalam TPPU; batas/jumlah uang atau kekayaan yang dicuci; subjek TPPU, dan tindak pidana lain yang terkait dengan TPPU yaitu tidak melaporkan transaksi yang mencurigakan dan uang tunai yang dibawa ke dalam/luar wilayah negara.

#### 1. Sumber Harta Kekayaan Yang Dicuci (*Predicate Offence*)

##### a. UU TPPU Indonesia

Sumber harta kekayaan yang dicuci atau *Predicate offence* adalah delik-delik yang menjadi sumber asal uang haram (*dirty money*) atau hasil kejahatan (*criminal proceeds*) yang kemudian dicuci. UU TPPU Indonesia mengambil sikap, bahwa "*predicate offence*" dirumuskan secara limitatif dalam Pasal 2 Bab I (Ketentuan Umum).

Dengan demikian *predicate offence* dalam UU TPPU Amandemen Indonesia terdiri dari 25 tindak pidana. Ini lebih luas jika dibandingkan dalam UU TPPU sebelumnya yang hanya disebutkan 15 jenis tindak pidana.

- b. UU TPPU Myanmar (*"The Control of Money Laundering Law"* No. 6/2002, 17<sup>th</sup> June, 2002)

Berdasarkan pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam *The Control of Money Laundering Law* No. 6/2002, 17<sup>th</sup> June, 2002, yaitu Pasal 3 bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang berasal dari delik-delik yang disebut dalam Pasal 5 sub (a) dan (b). Pasal 5 sub (a) menyebut secara limitatif 10 jenis/kelompok tindak pidana yang merupakan asal – usul harta yang dicuci. Untuk tindak pidana yang ke-10 dirumuskan secara fleksibel, yaitu *"offences prescribed by the Government by notification from time"*. Pasal 5 sub (b) menyatakan, bahwa Undang - Undang ini berlaku juga untuk *"transnational offences"* terhadap tindak pidana dalam sub (a).

Dengan demikian perumusan Tindak Pidana Pencucian Uang menurut *The Control of Money Laundering Law* No. 6/2002, 17<sup>th</sup> June, 2002 Myanmar adalah cukup menarik, yaitu perumusan tindak pidananya secara limitatif dan fleksibel. Misalnya dari perumusan Pasal 5 sub (a) ke-10 di atas. Dengan adanya ketentuan seperti itu, pemerintah dapat membuat pengumuman dari waktu untuk menetapkan atau menambah jenis-jenis *"predicate offence"* untuk TPPU.

- c. UU TPPU Filipina (*"Anti Money Laundering Act of 2001"*, No. 9160, 23 July, 2001").

Dalam *Anti Money Laundering Act of 2001*, No. 9160, 23 July, 2001, Pilipina, Pasal 4, disebutkan bahwa TPPU berasal dari *"unlawful*

*activity*" yaitu kegiatan ilegal/perbuatan melawan hukum. "*Unlawful activity*" dijelaskan dalam pengertian/definisi Pasal 3 (i) *Anti Money Laundering Act of 2001* (AMLA 2001), yaitu menunjuk pada 14 kelompok tindak pidana yang kemudian dirinci lagi dalam Rule 3.i Undang - Undang pelaksanaannya ("*Implementing Rules and Regulations Republic Act No. 9160 Anti Money Laundering Act of 2001*") menjadi 114 tindak pidana sebagai berikut :<sup>37</sup>

- (1) *Kidnapping for ransom*
- (2) *Importation of prohibited drugs;*
- (3) *Sale of prohibited drugs;*
- (4) *Administration of prohibited drugs;*
- (5) *Delivery of prohibited drugs;*
- (6) *Distribution of prohibited drugs;*
- (7) *Transportation of prohibited drugs;*
- (8) *Maintenance of a Den, Dive or Resort for prohibited users;*
- (9) *Manufacture of prohibited drugs;*
- (10) *Possession of prohibited drugs;*
- (11) *Use of prohibited drugs;*
- (12) *Cultivation of plants which are sources of prohibited drugs;*
- (13) *Culture of plants which are sources of prohibited drugs;*
- (14) *Directly or indirectly requesting or receiving any gift, present, share, percentage or benefit for himself or for any other person in connection with any contract or transaction between the Government and any party, wherein the public officer in his official capacity has to intervene under the law;*
- (15) *Directly or indirectly requesting or receiving any gift, present or other pecuniary or material benefit, for himself or for another, from any person for whom the public officer, in any manner or capacity, has secured or obtained, or will secure or obtain, any government permit or license, in consideration for the help given or to be given, without prejudice to section 13 of R.A. 3019;*

---

<sup>37</sup> *Implementing Rules and Regulations Republic Act No. 9160 Anti Money Laundering Act of 2001*, Philippines, *Anti Money Laundering Act of 2001*", No.9160, 23 July, 2001.

- (16) *Causing any undue injury to any party, including the government, or giving any private party any unwarranted benefits, advantage or preference in the discharge of his official, administrative or judicial functions through manifest partiality, evident bad faith or gross inexcusable negligence;*
- (17) *Entering, on behalf of the government, into any contractor transaction manifestly and grossly disadvantageous to the same, whether or not the public officer profited or will profit thereby;*
- (18) *Directly or indirectly having financial or pecuniary interest in any business contract or transaction in connection with which he intervenes or takes part in his official capacity, or in which he is prohibited by the Constitution or by any law from having any interest;*
- (19) *Directly or indirectly becoming interested, for personal gain, or having material interest in any transaction or act requiring the approval of a board, panel or group of which he is a member, and which exercise of discretion in such approval, even if he votes against the same or he does not participate in the action of the board, committee, panel or group.*
- (20) *Plunder through misappropriation, conversion, misuse or malversation of public funds or raids upon the public treasury*
- (21) *Plunder by receiving, directly or indirectly, any commission, gift, share, percentage, kickbacks or any other form of pecuniary benefit from any person and/or entity in connection with any government contractor project or by reason of the office or position of the public officer concerned;*
- (22) *Plunder by the illegal or fraudulent conveyance or disposition of assets belonging to the National Government or any of its subdivisions, agencies, instrumentalities or government-owned or controlled corporations or their subsidiaries;*
- (23) *Plunder by obtaining, receiving or accepting, directly or indirectly, any shares of stock, equity or any other form of interest or participation including the promise of future employment in any business enterprise or undertaking;*
- (24) *Plunder by establishing agricultural, industrial or commercial monopolies or other combinations and/or implementation of decrees and orders intended to benefit particular persons or special interests;*
- (25) *Plunder by taking undue advantage of official position, authority, relationship, connection or influence to unjustly enrich himself or themselves at the expense and to the damage and prejudice of the Filipino people and the republic of the Philippines.*
- (26) *Robbery with violence or intimidation of persons;*
- (27) *Robbery with physical injuries, committed in an uninhabited place and by a band, or with use of firearms on a street, road or alley;*



- (28) *Robbery in an uninhabited house or public building or edifice devoted to worship;*
- (29) *jueteng;*
- (30) *masiao*
- (31) *piracy on the high seas;*
- (32) *piracy in inland Philippine waters;*
- (33) *aiding and abetting pirates and brigands*
- (34) *Qualified theft*
- (35) *Estafa with unfaithfulness or abuse of confidence by altering the substance, quality of anything of value which the offender shall deliver by virtue of an obligation to do so, even though such obligation be based on an immoral or illegal consideration;*
- (36) *Estafa with unfaithfulness or abuse of confidence by misappropriating to the prejudice of another, money, goods or any other personal property received by the offender in trust or on commission, or for administration, or under any other obligation involving the duty to make delivery or to return the same, even though such obligation be totally or partially guaranteed by a bond; or by denying having received such money, goods, or other property;*
- (37) *Estafa with unfaithfulness or abuse of confidence by taking undue advantage of the signature of the offended party in blank, and by writing any document above such signature in blank, to the prejudice of the offended party or any third person;*
- (38) *Estafa by using a fictitious name, or falsely pretending to possess power, influence, qualifications, property, credit, agency, business or imaginary transactions, or by means of other similar deceits;*
- (39) *Estafa by altering the quality, fineness or weight of anything pertaining to his art or business;*
- (40) *Estafa by pretending to have bribed any government employee;*
- (41) *Estafa by postdating a check, or issuing a check in payment of an obligation when the offender has no funds in the bank, or his funds deposited therein were not sufficient to cover the amount of the check;*
- (42) *Estafa by inducing another, by means of deceit, to sign any document;*
- (43) *Estafa by resorting to some fraudulent practice to ensure success in a gambling game;*
- (44) *Estafa by removing, concealing or destroying, in whole or in part, any court record, office files, document or any other papers.*
- (45) *Fraudulent importation of any vehicle;*
- (46) *Fraudulent exportation of any vehicle;*
- (47) *Assisting in any fraudulent importation;*
- (48) *Assisting in any fraudulent exportation;*
- (49) *Receiving a smuggled article after fraudulent importation;*
- (50) *Concealing a smuggled article after fraudulent importation;*

- (51) *Buying smuggled article after fraudulent importation;*
- (52) *Selling smuggled article after fraudulent importation;*
- (53) *Transportation of smuggled article after fraudulent importation;*
- (54) *Fraudulent practices against customs revenue*
- (55) *unauthorized access into or interference in a computer system/server or information and communication system; or*
- (56) *any access in order to corrupt, alter, steal, or destroy using a computer or other similar information and communication devices, without the knowledge and consent of the owner of the computer or information and communications system, including;*
- (57) *the introduction of computer viruses and the like, resulting in the corruption, destruction, alteration, theft or loss of electronic data messages or electronic document;*
- (58) *the unauthorized copying, reproduction,*
- (59) *the unauthorized dissemination, distribution,*
- (60) *the unauthorized importation,*
- (61) *the unauthorized use, removal, alteration, substitution, modification,*
- (62) *the unauthorized storage, uploading, downloading, communication, making available to the public, or*
- (63) *the unauthorized broadcasting, of protected material, electronic signature or copyrighted work including legally protected sound recordings or phonograms or information material on protected works, through the use of telecommunication networks, such as, but not limited to, the internet, in a manner that infringes intellectual property rights;*
- (64) *Sale of any consumer product that is not in conformity with standart under the Consumer Act;*
- (65) *Sale of any product that has been banned by a rule under the Consumer Act;*
- (66) *Sale of any adulterated or mislabeled product using electronic documents;*
- (67) *Adulteration or misbranding of any consumer product;*
- (68) *Forging, counterfeiting or simulating any mark, stamp, tag, label or other identification device;*
- (69) *Revealing trade secrets;*
- (70) *Alteration or removal of the labeling of any drug or device held for sale;*
- (71) *Sale of any drug or device not registered in accordance with the provisions of the E-Commerce Act;*
- (72) *Sale of any drug or device by any person not licensed in accordance with the provisions of the E-Commerce Act;*
- (73) *Sale of any drug or device beyond its expiration date;*
- (74) *Introduction into commerce of any mislabeled or banned hazardous substance;*
- (75) *Alteration or removal of the labeling of hazardous substance;*

- (76) *Deceptive sales acts and practices;*
- (77) *Unfair or unconscionable sales acts and practices;*
- (78) *Fraudulent practices relative to weights and measures;*
- (79) *False representations in advertisements as the existence of a warranty or guarantee;*
- (80) *Violation of price tag requirements;*
- (81) *Mislabeled consumer products;*
- (82) *False, deceptive or misleading advertisements;*
- (83) *Violation of required disclosures on consumer loans;*
- (84) *Other violations of the provisions of the E-Commerce Act;*
- (85) *Hijacking;*
- (86) *Destructive arson;*
- (87) *Murder;*
- (88) *Hijacking, destructive arson or murder perpetrated by terrorists against non-combatant persons and similar targets;*
- (89) *Sale, offer or distribution of securities within the Philippines without a registration statement duly filed with and approved by the SEC;*
- (90) *Sale or offer to the public of any pre-need plan not in accordance with the rules and regulations which the SEC shall prescribe;*
- (91) *Violation of reportorial requirements imposed upon issuers of securities;*
- (92) *Manipulation of security prices by creating a false or misleading appearance of active trading in any listed security traded in an Exchange or any other trading market;*
- (93) *Manipulation of security prices by effecting, alone or with others, a series of transactions in securities that raises their prices to induce the purchase of a security, whether of the same or different class, of the same issuer or of a controlling, controlled or commonly controlled company by others;*
- (94) *Manipulation of security prices by effecting, alone or with others, a series of transactions in securities that depresses their price to induce the sale of a security, whether of the same or different class, of the same issuer or of a controlling, controlled or commonly controlled company by others;*
- (95) *Manipulation of security prices by effecting, alone or with others, a series of transactions in securities that creates active trading to induce such a purchase or sale through manipulative devices such as marking the close, painting the tape, squeezing the float, hype and dump, boiler room operations and such other similar devices;*
- (96) *Manipulation of security prices by circulating or disseminating information that the price of any security listed in an Exchange will or is likely to rise or fall because of manipulative market operations of any one or more persons conducted for the purpose of raising or depressing the price of the security for the purpose of inducing the purchase or sale of such security;*

- (97) Manipulation of security prices by making false or misleading statements with respect to any material fact, which he knew or had reasonable ground to believe was so false and misleading, for the purpose of inducing the purchase or sale of any security listed or traded in an Exchange;
- (98) Manipulation of security prices by effecting, alone or with others, any series of transactions for the purchase and/or sale of any security traded in an Exchange for the purpose of pegging, fixing or stabilizing the price of such security, unless otherwise allowed by the securities Regulation Code or by the rules of the SEC;
- (99) Sale or purchase of any security using any manipulative deceptive device or contrivance;
- (100) Execution of short sales or stop-loss order in connection with the purchase or sale of any security not in accordance with such rules and regulations as the SEC may prescribe as necessary and appropriate in the public interest or the protection of the investors;
- (101) Employment of any device, scheme or artifice to defraud in connection with the purchase and sale of any securities;
- (102) Obtaining money or property in connection with the purchase and sale of any security by means of any untrue statement of a material fact or any omission to state a material fact necessary in order to make the statements made, in the light of the circumstances under which they were made, not misleading;
- (103) Engaging in any act, transaction, practice or course of action in the sale and purchase of any security which operates or would operate as a fraud or deceit upon any person;
- (104) Insider trading;
- (105) Engaging in the business of buying and selling securities in the Philippines as a broker or dealer, or acting as a salesman, or an associated person of any broker or dealer without any registration from the Commission;
- (106) Employment by a broker or dealer of any salesman or associated person or by an issuer of any salesman, not registered with the SEC;
- (107) Effecting any transaction in any security, or reporting such transaction, in an Exchange or using the facility of an Exchange which is not registered with the SEC;
- (108) Making use of the facility of a clearing agency which is not registered with the SEC;
- (109) Violations of margin requirements;
- (110) Violations on the restrictions on borrowings by members, brokers and dealers;
- (111) Aiding and abetting in any violations of the Securities Regulation Code;

- (112) *Hindering, obstructing or delaying the filing of any document required under the Securities Regulation Code or the rules and regulations of the SEC;*
- (113) *Violations of any of the provisions of the implementing rules and regulations of the SEC;*
- (114) *Any other violations of any of the provisions of the Securities Regulation Code.*

d. UU TPPU Malaysia (Undang - Undang No. 613 "Anti-Money Laundering Act 2001" berlaku 5 July, 2001).

Dalam Pasal 3 aturan pendahuluan/umum (*part 1 "Preliminary"*) dinyatakan bahwa TPPU berasal dari "*unlawful activity*", yaitu "*any activity which is related, directly, to any serious offence or any foreign serious offence or any foreign serious offence*".<sup>38</sup>

Jenis-jenis "*serious offence*" disebutkan secara limitatif dalam "daftar lampiran kedua" (*the Second Schedule*) yang terdiri dari 119 tindak pidana sebagai berikut :

1. Subsection 4 (1) of this Act : *Offence of money laundering*).
2. Section 10 : *Offence of accepting gratification*
3. section 11 : *Offence in giving or accepting gratification by agent*
4. section 12 : *Acceptor or giver of gratification to be guilty notwithstanding that purpose was not carried out or matter not in relation to principal's affairs or business*
5. section 13 : *Corruptly procuring withdrawal of tender*
6. section 14 : *Bribery of officer of public body*
7. section 15 : *Misuse of position*
8. section 18 : *Dealing with, using, holding, receiving or concealing gratification or advantage in relation to any offence*
9. section 20 : *Attempts, preparations, abetments and criminal conspiracies punishable as offences*
10. section 25 : *Receiving, taking or acceptance of deposits prohibited except under and in accordance with a valid licence granted under subsection 6 (4)*

---

<sup>38</sup> Malaysia, "Anti-Money Laundering Act 2001", Act 613, 5 Juli, 2001.

11. section 4 : Common betting-houses and betting information centres
  12. subsection 6 (3) : Betting in a common betting-house, and book-making
  13. section 4 : Common gaming houses
  14. section 4 A : Assisting in carrying on a public lottery, etc.
  15. section 27 : Invitation to public by private companies
  16. section 38 : invitation to public to lend or deposit money with a corporation
  17. section 366 : inducting persons to invest money
  18. section 41 : Infringement of copyright
  19. section 3 : Possession of corrosive or explosive substance for the purpose of causing hurt
  20. section 135 : Smuggling offences
  21. section 4 : Restriction on importation of raw opium, coca leaves, poppy-straw and cannabis
  22. section 5 : Restriction on exportation of raw opium, coca leaves, poppy-straw and cannabis
  23. section 12 : Restriction on import and export of certain dangerous drugs
  24. subsection 19 (4) : Export of dangerous drugs
  25. subsection 20 (5) : Import of dangerous drugs
  26. subsection 39 B : Trafficking in dangerous drugs
- Dangerous Drugs (Forfeiture of Property) Act 1988 [Act 340]*
27. section 3 : Use of property for activity constituting certain offences
  28. section 4 : Dealing with, or using, holding, receiving or concealing illegal property
  29. section 56 : Attempts, abetments and criminal conspiracies punishable as offences
- Explosives Act 1957 [Act 207]*
30. subsection 4 (2) : Power to prohibit the manufacture, possession or importation of specially dangerous explosives
  31. section 5 : Acts causing explosions or fire
  32. section 6 : Causing explosion likely to endanger life or property
  33. section 7 : Attempt to cause explosion, or making or keeping explosive with intent to endanger life or property
  34. section 8 : Making or possessing explosives under suspicious circumstances
- Futures Industry Act 1993 [Act 499]*
35. section 3 : Establishment of futures markets
  36. section 16 : Futures brokers to be licensed
  37. section 16A: Futures fund managers to be licensed
  38. section 79 : False trading
  39. section 80 : Bucketing
  40. section 82 : Manipulation of price of futures contract and cornering

- 41. section 83 : Employment of devices, etc., to defraud
- 42. section 86 : Prohibition or abuse of information obtained in official capacity

*Kidnapping Act 1961 [Act 365]*

- 43. section 3 : Abduction, wrongful restraint or wrongful confinement for ransom
- 44. section 5 : Knowingly receiving ransom
- 45. section 6 : Knowingly negotiating to obtain, or for payment of, ransom

*Optical Discs Act 2000 [Act 606]*

- 46. section 4 : Manufacturing without a valid licence
- 47. section 21 : Applying false manufacturer's code

*Penal Code [Act 574]*

- 48. section 161: Public servant taking a gratification, other than legal remuneration, in respect of an official act
- 49. section 162: Taking a gratification in order, by corrupt or illegal means, to influence a public servant
- 50. section 163: Taking a gratification, for the exercise of personal influence with a public servant
- 51. section 164 : Abetment by public servant of the offences under section 163
- 52. section 165: Public servant obtaining any valuable thing, without consideration, from person concerned in any proceeding or business transacted by such public servant
- 53. section 207: Fraudulent claim to property to prevent its seizure as a forfeiture or in execution of a decree
- 54. section 213 : Taking gifts, etc., to screen an offender from punishment
- 55. section 214 : Offering gift or restoration of property in consideration of screening offender
- 56. section 215 : Taking gift to help to recover stolen property, etc.
- 57. section 216A: Harboursing robbers or gang-robbers, etc.
- 58. section 217 : Public servant disobeying a direction of law with intent to save person from punishment, or property from forfeiture
- 59. section 218 : Public servant framing an incorrect record or writing with intent to save person from punishment, or property from forfeiture
- 60. section 327 : Voluntarily causing hurt to extort property or to constrain to an illegal act
- 61. section 329 : Voluntarily causing grievous hurt to extort property, or to constrain to an illegal act
- 62. section 330 : Voluntarily causing hurt to extort confession or to compel restoration of property

63. section 331 : Voluntarily causing grievous hurt to extort confession or to compel restoration of property
64. section 347 : Wrongful confinement for the purpose of extorting property or constraining to an illegal act
65. section 348 : Wrongful confinement for the purpose of extorting confession or of compelling restoration of property
66. section 363 : Kidnapping
67. section 364 : Kidnapping or abducting in order to murder
68. section 365 : Kidnapping or abducting with intent to secretly and wrongfully to confine a person
69. section 366 : Kidnapping or abducting a woman to compel her marriage, etc.
70. section 367 : Kidnapping or abducting in order to subject a person to grievous hurt, slavery, etc.
71. section 368 : Wrongfully concealing or keeping in confinement a kidnapped person
72. section 369 : Kidnapping or abducting child under 10 years with intent to steal movable property from the person of such child
73. section 370 : Buying or disposing of any person as a slave
74. section 371 : Habitual dealing in slaves
75. section 372 : Selling minor for purposes of prostitution, etc.
76. section 373 : Buying minor for purposes of prostitution, etc.
77. section 373A: Importing for purpose of prostitution
78. section 379 : Theft
79. section 379A: Theft in dwelling house, etc.
80. section 380: Theft in dwelling house, etc.
81. section 381: Theft by clerk or servant of property in possession of master
82. section 382: Theft after preparation made for causing death or hurt in order to commit theft
83. section 384 : Extortion
84. section 385: Putting person in fear of injury in order to commit extortion
85. section 386: Extortion by putting a person in fear of death or grievous hurt
86. section 387 : Putting person in fear of grievous hurt in order to commit extortion
87. section 389 : Putting person in fear of accusation of offence, in order to commit extortion
88. section 392 : Robbery
89. section 394 : Voluntary causing hurt in committing robbery
90. section 395 : Gang-robbery
91. section 396 : Gang- robbery with murder
92. section 399 : making preparation to commit gang-robbery
93. section 400 : Belonging to gang of robbers
94. section 402 : Assembling for purpose of committing gang-robbery



95. *section 403 : Dishonest misappropriation of property*
96. *section 404 : Dishonest misappropriation of property possessed by a deceased person at the time of his death*
97. *section 406 : Criminal breach of trust*
98. *section 407 : Criminal breach of trust by carrier, etc.*
99. *section 408 : Criminal breach of trust by clerk or servant*
100. *section 409 : criminal breach of trust by public servant, or by banker, merchant or agent*
101. *section 411 : Dishonestly receiving stolen property*
102. *section 412: Dishonestly receiving stolen property stolen in the commission of gang-robbery*
103. *section 413: Habitually dealing in stolen property*
104. *section 414: Assisting in concealment of stolen property*
105. *section 420: Cheating and dishonestly inducing delivery of property*
106. *section 421: Dishonest or fraudulent removal or concealment of property to prevent distribution among creditors*
107. *section 422: Dishonest or fraudulently preventing from being made available for his creditors a debt or demand due to the offender*
108. *section 424: Dishonest or fraudulent removal or concealment of consideration*
109. *section 465: Forgery*
110. *section 468: Forgery for the purpose of cheating*
111. *section 489A: Forging or counterfeiting currency notes or bank notes*
112. *section 489C: Possession of forged or counterfeit currency notes or bank notes*
- Securities Industry Act 1983 [Act 280]*
113. *section 7: Establishment of stock markets*
114. *section 12: Dealer's licence*
115. *section 15A : Fund manager's licence*
116. *section 84 : Market rigging*
117. *section 85 : Market manipulation*
118. *section 87A: Use of manipulative and deceptive devices*
119. *section 89E: Insider trading*

Berdasarkan uraian tentang asal-usul harta kekayaan (*predicate offence*) dalam UU TPPU Indonesia, Myanmar, Filipina dan Malaysia di atas, yang cukup menarik dari formulasi di atas adalah perumusan limitatif yang fleksibel di Myanmar seperti terlihat dari perumusan Pasal 5 sub (a) ke-10 di atas. Dengan adanya ketentuan seperti itu, pemerintah dapat membuat

pengumuman dari waktu untuk menetapkan atau menambah jenis-jenis "*predicate offence*" untuk TPPU.

Dilihat dari kerja sama Asean dalam menghadapi TPPU, menurut Barda Nawawi Arief, perumusan "*predicate offence*" di berbagai negara Asean yang limitatif tetapi "berbeda jenis tindak pidananya" itu dapat menimbulkan masalah. Misal menurut Indonesia, tidak dapat dikatakan TPPU apabila uang/kekayaan yang dicuci itu berasal dari "pemerasan" (*extortion*), "perjudian gelap" (*illegal gambling*), "pembajakan di laut" (*piracy*), "pembajakan pesawat udara" (*hijacking*), "pemalsuan uang" (*counter-feiting money*), "perampasan barang/penjarahan" (*plunder*), pelanggaran *E-commerce* atau "*cyber crime*", atau perbuatan-perbuatan lain yang merupakan tindak pidana menurut hukum negara Asean lainnya (seperti di Filipina, Myanmar, dan Malaysia), delik-delik itu ada yang dimasukkan dalam daftar "*money laundering predicate offence*".<sup>40</sup>

Jumlah dan jenis "*predicate offence*" di Filipina, Myanmar, dan Malaysia juga tidak sama. Seperti telah dikemukakan di atas, di Indonesia ada 25 jenis tindak pidana (dalam garis besar; karena belum dirinci); di Filipina ada 14 kelompok tindak pidana yang dirinci menjadi 114 tindak pidana; di Myanmar ada 10 kelompok tindak pidana (belum dirinci), dan di Malaysia ada 119 tindak pidana. Dengan demikian bisa terjadi, menurut salah satu negara Asean (misal Indonesia) suatu perbuatan merupakan

---

<sup>40</sup> Barda Nawawi Arief, *Implementasi UU Pencucian Uang Republik Indonesia Dalam Menunjang Rencana Aksi Asean Menghadapi Kejahatan Transnasional*, Op. Cit., halaman 8.

TPPU, tetapi menurut negara Asean lainnya tidak merupakan TPPU, dan begitu pula sebaliknya.

## 2. Batas/jumlah uang atau kekayaan yang dicuci

Telah dikemukakan di atas, bahwa Indonesia sebelum UU TPPU diamandemen membatasi jumlah harta kekayaan yang dicuci, yaitu 500 juta rupiah atau lebih atau yang setara (Pasal 2). Setelah UU TPPU diamandemen khususnya Pasal 2 yaitu menghapus jumlah harta kekayaan yang dicuci. Sama halnya dengan di Filipina dan Malaysia serta di beberapa negara lain pada umumnya tidak ditentukan batasnya, sedangkan di Myanmar (Pasal 5 sub c *"The Control of Money Laundering Law"* No. 6 Tahun 2002) dinyatakan bahwa jumlah/nilainya akan ditentukan tersendiri oleh *"the Central Control Board"* (CCB).

Dengan adanya penghapusan batas/jumlah harta kekayaan yang dicuci untuk UU TPPU Indonesia itu, tentunya akan mendukung kerjasama dalam memberantas TPPU, baik secara regional maupun internasional.

## 3. Subjek TPPU

Berdasarkan perumusan tindak pidana dalam undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang di beberapa negara Asean, korporasi diakui sebagai subjek tindak pidana. untuk Undang - Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Indonesia, subjeknya tidak hanya "orang perseorangan" tetapi juga "korporasi" (Pasal 1 ke-2 UU TPPU Amandemen).

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan memperluas subjek tindak pidana pada korporasi sudah sesuai dengan perkembangan/dimensi

kejahatan masa kini, terlebih dalam menghadapi TPPU yang mengandung ciri sebagai “*transnational and organized crime*”. Dalam Kongres PBB mengenai “*Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*”, dan berbagai dokumen internasional lainnya yang berkaitan dengan *Money Laundering* dan *Transnational Crime* juga ditegaskan demikian.<sup>41</sup>

Hanya di Myanmar, dalam Undang - Undang Pengawasan Pencucian Uang (“*The Control of Money Laundering Law*”) No. 6 Tahun 2002, terlihat kejangalan. Terkesan kuat bahwa TPPU di Myanmar lebih ditujukan pada subjek berupa “orang”, tidak pada “korporasi”. Hal ini terlihat dari kebijakan formulasi dalam Undang - Undang No. 6 Tahun 2000 tersebut sebagai berikut :

- a. Dalam Pasal 2 yang mengatur yurisdiksi ditegaskan, bahwa yurisdiksi Undang - Undang ini ditujukan pada “*any person*” dengan tidak memberi penjelasan apa yang dimaksud dengan “*person*”.
- b. Perumusan TPPU dalam Pasal 22 hanya diancam dengan pidana penjara (minimal 10 tahun dan maksimalnya tidak terbatas). Ancaman pidana penjara secara tunggal jelas tertuju pada “orang”.
- c. Perumusan TPPU dalam Pasal 23 diancam secara kumulasi dengan pidana penjara (maksimal 10 tahun) dan pidana denda (yang tidak ditetapkan jumlahnya; menganut “*indeterminate sentence*”). Perumusan kumulasi inipun jelas tertuju pada “orang”.

---

<sup>41</sup> Ibid, halaman 11.

TPPU di Myanmar hanya dirumuskan dalam dua Pasal di atas (Pasal 22 dan 23), walaupun perumusan delik diatur dalam Bab X mulai Pasal 22 s/d 32. perumusan delik dalam Pasal 24 s/d 32 lebih merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan TPPU.<sup>42</sup>

Walaupun menurut Undang - Undang TPPU Indonesia, korporasi menjadi subjek TPPU, namun sangat disayangkan kebijakan pertanggungjawaban pidana untuk korporasi di dalam Undang - Undang No. 15 Tahun 2002 juga dalam UU TPPU Amandemen (mengenai hal ini tidak ada perubahan atau tambahan ) masih mengandung beberapa kelemahan sebagaimana telah dibahas dalam Sub Bab A di muka.

#### **4. Tindak Pidana Lain yang terkait dengan TPPU**

Dalam Undang - Undang TPPU Indonesia (Undang - Undang : 15 Tahun 2002 dan UU TPPU Amandemen) ada 3 (tiga) tindak pidana lain yang berkaitan dengan TPPU, yaitu :

- a. Pasal 8 : UU TPPU mengancam dengan pidana denda dua ratus lima puluh juta sampai satu milyar bagi Penyedia Jasa Keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 (1).

Dalam UU TPPU Amandemen, Pasal 13 ayat (1) bahwa Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Bab V, untuk hal-hal :

---

<sup>42</sup> Ibid, halaman 12.

- a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- b. Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.

Dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa pada dasarnya Transaksi Keuangan Mencurigakan tidak memiliki ciri-ciri yang baku, karena hal tersebut dipengaruhi oleh variasi dan perkembangan jasa dan instrumen keuangan yang ada. Meskipun demikian, terdapat ciri-ciri umum dari Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dapat dijadikan acuan antara lain sebagai berikut :

- 1) tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas;
- 2) menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran ;
- 3) aktivitas transaksi nasabah di luar kebiasaan dan kewajaran.

Yang dimaksud dengan “Transaksi Keuangan Mencurigakan” adalah : transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan; dan transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini atau transaksi keuangan yang dilakukan atau batal

dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana (Pasal 1 butir 7 UU TPPU Amandemen).

- b. Pasal 9 UUTPPU merumuskan mengancam dengan pidana denda minimal 100 juta rupiah dan maksimal 300 juta rupiah tiap orang yang tidak melapor membawa uang rupiah tunai 100 juta atau lebih ke dalam/luar wilayah RI. Dalam UU TPPU Amandemen, Pasal 9 dirubah sehingga berbunyi “setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu yang dibawa ke dalam atau wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Menurut Pasal 16 (1) UU TPPU Amandemen, setiap orang yang membawa uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar wilayah negara Republik Indonesia, harus melaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Menurut Pasal 16 (2), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib menyampaikan laporan tentang informasi yang diterimanya selama jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada PPATK.

Pasal 16 (3), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib memberitahukan kepada PPATK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah mengetahui

adanya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pelanggaran Pasal 16 ayat (2) dan (3) di atas oleh Dirjen Bea dan Cukai, tidak ada ancaman pidananya.

Pasal 16 ayat (5) UU TPPU Amandemen, bahwa apabila diperlukan PPATK dapat meminta informasi tambahan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu yang dibawa setiap orang dari atau kedalam wilayah Negara Republik Indonesia.

- c. Pasal 10 UU TPPU merumuskan mengancam dengan pidana penjara minimal satu tahun dan maksimal tiga tahun kepada PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim, atau orang lain yang bersangkutan dengan TPPU yang melanggar Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 Ayat (1) (membuka identitas pelapor). Pasal ini tidak ada perubahan dalam UU TPPU Amandemen.

Pasal 10 A ayat (1) menyatakan bahwa pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim dan siapapun juga yang memperoleh dokumen dan/atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-undang ini, wajib merahasiakan dokumen dan/atau keterangan tersebut kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.

Ketentuan ini termasuk sebagai ketentuan mengenai rahasia jabatan.



Pasal 10 A Ayat (2) menyatakan bahwa sumber keterangan dan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan wajib dirahasiakan dalam persidangan pengadilan.

Pasal 10 A ayat (3) UU TPPU Amandemen mengemukakan bahwa pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan siapapun juga yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan pada Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 3 (tiga) Tahun .

Pasal 10 A ayat (4), bahwa jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dilakukan dengan sengaja, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun “

Dalam praktik internasional di bidang pencucian uang lembaga semacam dengan PPATK disebut dengan nama generik *Financial Intelligence Unit* (FIU). Keberadaan FIU ini pertama kali diatur secara implisit dalam Empat Puluh Rekomendasi (*Forty Recommendations*)<sup>43</sup> dari *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF).<sup>44</sup> Dalam rekomendasi keenambelas disebutkan, bahwa *if Financial Institutions suspect that funds stem from a criminal activity, they should be permitted or required to report promptly their suspicion to the competent authorities.*

---

<sup>43</sup> Rekomendasi ini merupakan standard yang dikeluarkan oleh FATF dan diharapkan dipakai oleh masing-masing negara dan diterapkan secara internasional dengan konsisten. Rekomendasi dikeluarkan pertama kali pada tahun 1990, kemudian direvisi tahun 1996 dan sekarang sedang dalam proses direvisi kembali.

<sup>44</sup> FATF didirikan tahun 1989 dengan sponsor utama negara-negara industri besar (*Group of Seven* atau *G 7* dan *European Union*). FATF beranggotakan 29 negara dan dua organisasi internasional, yaitu *the European Commission* dan *the Gulf Cooperation Council*.

Kebanyakan negara membentuk atau menugaskan badan tertentu untuk menerima laporan tersebut yang secara umum sekarang dikenal dengan nama *Financial Intelligence Unit* (FIU).

FIU adalah lembaga permanen yang khusus menangani masalah pencucian uang. Lembaga ini merupakan salah satu infrastruktur terpenting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang di setiap negara. Keberadaan lembaga khusus ini mutlak ada dan memainkan peranan sangat strategis karena masalah pencucian uang merupakan persoalan yang cukup rumit, melibatkan *organized crime* yang memahami berbagai teknik dan modus kejahatan yang canggih. Penganganan *issue* pencucian uang menjadi bertambah berat terlebih karena karakteristik kejahatan ini pada umumnya dilakukan melewati batas-batas negara (*cross border*).

Oleh karena itu, pembentukan lembaga khusus yang menangani masalah pencucian uang telah dilakukan cukup lama di beberapa negara. Australia, misalnya memiliki AUSTRAC (*Australian Transaction Reports and Analysis Centre*) yang didirikan pada tahun 1989. FINCEN (*Financial Crime Intelligence Network*) kita kenal sebagai *financial intelligence unit* di Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1990. Sementara itu, kehadiran lembaga sejenis di wilayah Asia Tenggara relatif baru dikenal beberapa tahun belakangan ini. Kita mengenal beberapa lembaga semacam AMLO (*Anti Money Laundering Office*) di Thailand yang didirikan pada tahun 1999, Unit Perisikan Kewenangan di Malaysia yang berdiri pada tahun 2001,

*Suspicious Transaction Reports Office* (STRO) Singapura pada tahun 2000, serta *The Office of Anti Money Laundering* di Filipina sejak tahun 2001. Di Indonesia sendiri dalam rangka menjalankan misi di atas telah didirikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejak 17 April 2002.

Tugas pokok financial intelligence unit secara garis besar menurut identifikasi yang dilakukan oleh EGMONT Group<sup>45</sup> adalah sebagai berikut :

- a. menerima laporan *suspicious transaction report* dan *currency transaction reports* dari pihak pelapor;
- b. melakukan analisis atas laporan yang diterima dari pihak pelapor. Dalam kaitan tugas ini *financial intelligence unit* mengeluarkan pedoman untuk mengidentifikasi transaksi yang wajib dilaporkan; dan
- c. meneruskan hasil analisis laporan kepada pihak yang berwenang.

Sementara itu, untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsinya *financial intelligence unit* setidaknya memiliki kewenangan<sup>46</sup> :

- a. memperoleh dokumen dan informasi tambahan untuk mendukung analisis yang dilakukan;
- b. memiliki akses yang memadai terhadap setiap orang atau lembaga yang menyediakan informasi keuangan, penyelenggara administrasi yang terkait dengan transaksi keuangan dan aparat penegak hukum;

---

<sup>45</sup> EGMONT Group adalah suatu forum yang keanggotaannya terdiri atas *Financial Intelligence Unit* (FIU) diseluruh dunia yang bertujuan antara lain mendorong kerjasama antara FIU, meningkatkan keahlian dan keterampilan personalia FIU. EGMONT Group saat ini terdiri atas 69 FIU. Indonesia dalam waktu dekat akan mengajukan diri sebagai anggota EGMONT Group. Informasi lebih lengkap lihat [www.egmont.org](http://www.egmont.org) atau *Asian Development Bank, Manual on Countering Money Laundering and the Financing of Terrorism*, Maret 2003, hal. 485-498.

<sup>46</sup> [www.egmont.org](http://www.egmont.org)

- c. memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi terhadap pihak pelapor yang tidak mematuhi kewajiban pelaporan;
- d. memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi keuangan dan informasi intelijen kepada lembaga yang berwenang di dalam negeri untuk kepentingan penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang;
- e. melakukan pertukaran informasi mengenai informasi keuangan dan intelijen dengan lembaga sejenis di luar negeri; serta
- f. menjamin bahwa pertukaran informasi sejalan dengan hukum nasional dan prinsip-prinsip internasional mengenai *data privacy* dan *data protection*.

Sebagai lembaga yang mengelola informasi yang berkaitan dengan *financial intelligence*, pengelolaan data statistik dan penggunaan sistem informasi yang efisien mutlak perlu dilakukan. Dalam kaitan ini, *financial intelligence* wajib memiliki sistem informasi yang mengelola data statistik yang mencakup:<sup>47</sup>

- a. *suspicious transaction reports (STR)* yang telah diterima, dianalisis, dan diserahkan kepada pihak yang berwenang
- b. *suspicious transaction reports (STR)* yang dihasilkan dari penyelidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan;
- c. permintaan yang diterima dari lembaga terkait di dalam dan luar negeri serta jumlah permintaan yang diberikan;

---

<sup>47</sup> Rick McDonell, Establishment of the FUI, Workshop diselenggarakan oleh JICA Jakarta, tanggal 16 Desember 2002, hal 17.

- d. keterangan yang dibuat oleh, *financial intelligence unit* atau pihak berwenang lainnya kepada pihak berwenang di dalam maupun luar negeri; dan
- e. transaksi dalam jumlah besar.

Di Indonesia memiliki PPATK yang merupakan *administrative model* yang merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden<sup>48</sup>. Model administratif ini lebih banyak berfungsi sebagai perantara antara masyarakat atau industri jasa keuangan dengan institusi penegak hukum. Laporan yang masuk dianalisis dahulu oleh lembaga ini kemudian dilaporkan institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.

PPATK melakukan analisis, (mendeteksi tindak pidana pencucian uang), kemudian menyerahkan laporannya kepada pihak Penyidik dan Penuntut (Pasal 27). Untuk memperoleh laporan dan hasil deteksi atau analisis yang baik PPATK harus menjalin kerja sama yang baik dengan penyedia jasa keuangan dan instansi terkait lainnya atau dengan FIU dari negara lain. Selanjutnya dalam proses penegakan hukum, PPATK dapat melakukan kerja sama dan membantu pihak penyidik dan penuntut umum dengan informasi yang dimiliki dan kemampuan analisisnya. Informasi tersebut dapat berasal dari *dutation* dengan FIU dari negara lain. Dalam hal ini dapat diinformasikan, bahwa PPATK berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) UU TPPU telah menandatangani *Memorandum of Understanding*

---

<sup>48</sup> Pasal 18 UU No. 15 Tahun 2002 jo. UU No. 25 Tahun 2003.

(MOU) dengan *Anti Money Laundering Office (AMLO)* Thailand pada tanggal 24 Maret 2003 dalam rangka pertukaran informasi intelijen di bidang keuangan guna memberantas tindak pidana pencucian uang. Selain itu untuk keberhasilan tugas PPATK dan penegakan hukum akan diadakan kerja sama atas dasar *Memorandum of Understanding* atau dokumen lainnya dengan regulator dan instansi penegak hukum seperti Kepolisian. Sekarang ini baru satu MOU yang ditandatangani antara PPATK dan Gubernur Bank Indonesia pada 5 Februari 2003.

Walaupun secara yuridis PPATK telah ada sejak diundangkannya Undang-undang No. 15 Tahun 2002<sup>49</sup>. PPATK baru akan melaksanakan fungsinya pada akhir juni tahun ini atau bertepatan dengan tenggang waktu enam bulan sejak ditetapkannya Kepala dan Wakil Ketua PPATK.<sup>50</sup> Sementara itu, kewajiban pelaporan transaksi yang mencurigakan dan laporan transaksi tunai baru akan sepenuhnya dilakukan oleh seluruh penyedia jasa keuangan pada bulan Oktober 2003, delapan belas bulan sejak berlakunya Undang-undang No. 15 Tahun 2002). Untuk industri perbankan, laporan transaksi yang mencurigakan tetap berjalan seperti biasa dengan melaporkannya kepada bank Indonesia telah menerima 156 (seratus lima puluh enam) STR dari 23 bank. Atas STR yang diterima, UKIP melakukan analisis mendalam dan klarifikasi atas dokumen yang

---

<sup>49</sup> Pasal 18 ayat (1) diatur bahwa dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dengan Undang-undang ini dibentuk PPATK.

<sup>50</sup> Pasal 45 ayat (2) menyatakan bahwa PPATK harus sudah melaksanakan fungsinya paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala dan wakil Kepala PPATK ditetapkan, yang dihitung sejak pengucapan sumpah dihadapan Ketua Mahkamah agung Republik Indonesia pada tanggal 24 Desember 2002

disampaikan oleh bank. Sampai saat ini UKIP telah menyerahkan 11 STR kepada penyidik Polri dan terhadap sisanya UKIP masih melakukan analisis.

Dalam "*Anti Money Laundering Act of 2001*", No. 9160, Filipina, ada ketentuan sebagai berikut :<sup>51</sup>

a. Pasal 9 (b) mengatur tentang "*record keeping*", yaitu semua catatan/data transaksi yang dilakukan oleh "*covered institutions*" harus dipelihara dan disimpan selama 5 tahun sejak tanggal transaksi. Yang dimaksud "*covered institution*" dijelaskan dalam Pasal 3 (a), meliputi :

- (1) *banks, non banks, quasi banks, trust entities, and all other institutions and their subsidiaries and affiliates supervised or regulated by the Bangko Sentraling Pilipinas (BSP);*
- (2) *insurance companies and all other institutions supervised or regulated by the Insurance Commission; and*
- (3) *(i) securities dealers, brokers, salesmen, investment houses and other similar entities managing securities or rendering services as investment agent, advisor, or consultant, (ii) and other similar entities, (iii) foreign exchange corporations, money changers, money payment, remittance, and transfer companies and other similar entities, and (iv) other entities administering or otherwise dealing in currency, commodities or financial derivatives based thereon, valuable objects, cash substitutes and other similar monetary instruments or property supervised or regulated by securities and Exchange Commission.*

Pelanggaran terhadap Pasal 9 (b) ini diancam pidana dalam Pasal 14 (b) tentang "*Failure to Keep Records*" dengan pidana penjara minimal 6 bulan sampai maksimal 1 tahun atau/dan denda minimal 100.000 Php. (sistem alternatif kumulatif).

b. Pasal 9 (c) mengatur tentang "*reporting of covered transactions*" yaitu "*covered institutions*" harus melapor kepada AMLC (Anti-Money

---

<sup>51</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 2003, halaman

Laundering Council) dalam waktu 5 hari kerja sejak terjadinya transaksi. Yang dimaksud dengan "covered transaction" dijelaskan dalam Pasal 3 (a) yaitu transaksi tunggal atau gabungan yang meliputi jumlah total melebihi 4 juta Php atau jumlah yang secara dalam bentuk uang asing ; atau transaksi yang kompleks dan mencurigakan (tidak biasa) melebihi 4 juta Php, khususnya berupa penyimpangan tunai yang tidak jelas tujuan dan asal usulnya. Lembaga yang bersangkutan, para pejabat, pegawai, agen, penasehat, konsultan, dan rekan sejawat/kolega dari lembaga itu dilarang mengkomunikasikan laporan yang dibuat itu kepada setiap orang. Atau media masa. Pelanggaran terhadap Pasal 9 (b) ini diancam pidana dalam Pasal 14 (d) tentang "Breach of Confidentiality" dengan pidana penjara antara 3-8 tahun dan denda antara 500.000 – 1.000.000 Php. (sistem kumulasi).

- c. Pasal 14 (c) mengatur tentang "*Malicious Reporting*", yaitu tiap orang yang melaporkan atau menyimpan/mengajukan informasi palsu atau tidak beralasan mengenai transaksi pencucian uang diancam dengan pidana penjara minimal 6 bulan s/d maksimal 4 tahun dan denda minimal 100.000 Php tetapi tidak lebih dari 500.000 Php. Apabila terdakwa adalah korporasi, pidana dikenakan kepada pejabat yang bertanggungjawab, yang turut serta melakukan tindak pidana, atau mereka yang sengaja mengizinkan atau gagal mencegah terjadinya tindak pidana itu. Apabila terdakwa adalah orang asing, dikenakan pidana tambahan berupa deportasi. Apabila terdakwa adalah pejabat



publik atau pegawai, akan dikenakan pidana tambahan berupa diskualifikasi (pencabutan/pemecatan) dari jabatannya.

Di Myanmar *The Control of Money Laundering Law* No. 6 Tahun 2002 ada ketentuan sebagai berikut :<sup>52</sup>

a. Pasal 24 : Dipidana dengan pidana penjara minimal 3 tahun sampai maksimal 7 tahun dan dapat juga dikenakan pidana denda (tidak ditentukan jumlahnya), setiap orang yang bertanggungjawab di bank atau lembaga keuangan lainnya, yang melakukan perbuatan sebagai berikut :

(a) menolak memberi izin kepada Badan penyidik untuk melakukan kewajibannya dalam Pasal 18 (c) ;

(b) melanggar larangan dalam Pasal 18 (d) dan menyalurkan/mentransfer uang dan kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum tanpa izin CCB (*the Central Control Board*);

(c) melanggar larangan dalam Pasal 18 (e) dan menghapus, mengubah, atau mentransfer catatan-catatan keuangan tanpa izin CCB.

Pasal 18 menyatakan, bahwa orang yang bertanggungjawab di bank dan lembaga-lembaga keuangan :

(a) harus memelihara, meneliti, dan mencatat nama-nama, alamat, nomer paspor dari orang-orang yang membuka rekening, menyimpan (uang) tunai, dan mengambil tunai;

---

<sup>52</sup> Ibid, halaman 196.

- (b) setelah melakukan pembukaan rekening dan transaksi sesuai dengan ketentuan, dokumen-dokumen pendukung, rekening dan semua catatan/data harus disimpan sekurang-kurangnya selama 5 tahun;
  - (c) harus mengizinkan Badan Investigasi memeriksa catatan-catatan keuangan, membuat copy, menyita uang dan kekayaan yang diperoleh dengan sarana-sarana illegal;
  - (d) tanpa izin CCB (Badan Pengawas Pusat), tidak akan menyalurkan/menstransfer uang dan kekayaan yang diperoleh dengan sarana illegal selama masa penyidikan dan selama tindakan hukum sedang dilakukan;
  - (e) tanpa izin CCB, tidak akan menghapus atau mengubah catatan keuangan yang berkaitan dengan investigasi itu;
- b. Pasal 25 : Diancam dengan penjara minimal 3 tahun sampai maksimal 7 tahun dan juga dapat dijatuhi pidana denda, bagi anggota Badan Investigasi yang melakukan hal-hal sebagai berikut :
- (a) meminta atau menerima uang atau kekayaan sebagai suatu penyuapan, baik untuk diri sendiri atau orang lain;
  - (b) mengganti si pelaku dengan orang lain sehingga tindakan tidak dapat diambil terhadapnya atau melakukan tindakan salah/lalai (menganggap enteng) terhadap si pelaku tanpa mengambil tindakan terhadapnya.

- (c) Menyembunyikan, melenyapkan, mengganti, memindah atau mengaburkan uang/kekayaan yang diperoleh dengan sarana illegal sehingga tindakan tidak dapat diambil.
- c. Pasal 26 : mengatur tindak pidana mengenai orang yang melanggar perintah CCB untuk tidak mengkonvensi, mentransfer, menyembunyikan, melenyapkan atau menyamarkan uang/kekayaan yang diperoleh dengan sarana-sarana illegal selama periode investigasi. Ancaman pidananya penjara maksimal 7 tahun dan dapat juga dijatuhi pidana denda.
- d. Pasal 27 : mengatur tindak pidana mengenai orang yang menghancurkan/merusak harta kekayaan selama investigasi berjalan. Ancaman pidananya sama dengan Pasal 26 di atas.
- e. Pasal 28 : mengatur tindak pidana oleh pejabat bank/lembaga keuangan yang gagal atau tidak melakukan pelaporan kepada CCB menurut Pasal 18 dan 19. Ancaman pidananya 3 tahun penjara maksimal dan/atau denda.
- f. Pasal 29 : Departemen "*Settlements and Land Records*" yang gagal memberi laporan kepada CCB sesuai Pasal 20. Ancaman pidana sama dengan Pasal 28 di atas.
- g. Pasal 30 : Tindak pidana oleh departemen terkait dan organisasi yang tidak lapor kepada CCB berdasarkan Pasal 21. Ancaman pidana sama dengan Pasal 28.

- h. Pasal 31 : Tindak pidana mengenai orang yang membuka rekening dengan nama palsu, menyimpan, mengambil, mentransfer uang atau mendelegasikan wewenang kepada orang lain untuk berbuat demikian. Ancaman pidananya seperti Pasal 28.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa ancaman tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan serius yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan dan sistem perekonomian serta dapat berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bangsa, maka upaya pencegahan dan pemberantasan harus dilakukan melalui langkah-langkah terencana dan menyeluruh (*komprehensif*). Mengingat bahwa kejahatan pencucian uang kebanyakan dilakukan oleh *transnational organized crime* yang melintasi batas-batas negara, kerja sama internasional dan regional melalui implementasi dan pengefektifan UU TPPU khususnya di kawasan Asean khususnya perlu ada harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan formulasi TPPU di Indonesia dengan berbagai negara Asean, khususnya yang berkaitan dengan masalah batas/jumlah uang atau harta kekayaan yang dicuci dan masalah *predicate offence* atau tindak pidana yang menjadi asal-usul dari uang/harta kekayaan yang dicuci tersebut. Dengan adanya sinkronisasi formulasi hukum pidana dalam UU TPPU di kawasan Asean maka terdapat kesamaan persepsi dalam melakukan penindakan/penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap tindak pidana pencucian uang.

Dari pembahasan mengenai batas/jumlah uang atau harta kekayaan yang dicuci dan masalah *predicate offence* atau tindak pidana yang menjadi asal-usul dari uang/harta kekayaan yang dicuci terhadap UU TPPU di Indonesia,

Malaysia, Filipina dan Myanmar diketahui bahwa UU TPPU Indonesia ditentukan secara limitatif yaitu sebesar Rp. 500 juta namun kemudian ketentuan tersebut dihapus dengan UU TPPU Amandemen Tahun 2003, sementara itu di Filipina dan Malaysia serta di beberapa negara lain pada umumnya tidak ditentukan batasnya, sedangkan di Myanmar (Pasal 5 sub c "*The Control of Money Laundering Law*" No. 6 Tahun 2002) dinyatakan bahwa jumlah/nilainya akan ditentukan tersendiri oleh "*the Central Control Board*" (CCB).

Mengenai subjek TPPU untuk Indonesia, Malaysia dan Filipina, tidak hanya "orang perseorangan" tetapi juga "korporasi". Hanya di Myanmar, dalam Undang - Undang Pengawasan Pencucian Uang ("*The Control of Money Laundering Law*") No. 6 Tahun 2002, terlihat kejanggalan. Terkesan kuat bahwa TPPU di Myanmar lebih ditujukan pada subjek berupa "orang", tidak pada "korporasi".

Kemudian yang lebih penting adalah *predicate offence* dari hasil penelitian diketahui bahwa jumlah dan jenis "*predicate offence*" di Negara Asean tidak terdapat kesamaan. Misalnya di Indonesia ada 25 jenis tindak pidana (dalam garis besar; karena belum dirinci); di Filipina ada 14 kelompok tindak pidana yang dirinci menjadi 114 tindak pidana ; di Myanmar ada 10 kelompok tindak pidana (belum dirinci), dan di Malaysia ada 119 tindak pidana. Dengan demikian bisa terjadi, menurut salah satu negara Asean (misal Indonesia) suatu perbuatan merupakan TPPU, tetapi menurut negara Asean lainnya tidak merupakan TPPU, dan begitu pula sebaliknya.

Untuk mensinkronkan formulasi Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya di Asean diperlukan ketegasan mengenai norma/aturan yang lebih rinci mengenai kerja sama regional/international dalam menanggulangi TPPU antara lain mengenai ruang lingkup kerja sama, prosedur kerja sama, bentuk atau persyaratan kerja sama dan sebagainya.

## BAB IV

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian mengenai kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana dalam UU TPPU dan sinkronisasi kebijakan formulasi hukum pidana dalam UU TPPU Indonesia dengan UU TPPU di negara Asean dalam upaya menanggulangi kejahatan transnasional, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

##### 1. Kesimpulan Umum

- a. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan, dewasa ini bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang atau *money laundering*. Kejahatan "*money laundering*" bertujuan untuk melindungi atau menutupi suatu aktivitas kriminal yang menjadi sumber dari dana atau uang yang akan "dibersihkan". Aktivitas kriminal yang dimaksud adalah 25 tindak pidana yang biasa disebut *predicate offence* sehingga dapat dikatakan bahwa pemicu dari kejahatan pencucian uang adalah suatu tindak pidana atau aktivitas kriminal.
- b. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Indonesia telah memiliki Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003, karena dipandang Undang-undang No.15 Tahun 2002 belum

memenuhi standar internasional serta perkembangan proses peradilan tindak pidana pencucian uang. Perubahan dan penyempurnaan Undang-undang No. 15 Tahun 2002 juga dimaksudkan agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan secara efektif.

Di samping itu, karena kejahatan *money laundering* merupakan kejahatan lintas negara/transnasional yang terorganisasi (*transnasional organized crime*) dan sudah lama menjadi perhatian dunia internasional, maka diperlukan kerja sama timbal balik dan kerja sama internasional terutama dalam sinkronisasi kebijakan formulasi hukum pidana dalam UU TPPU Indonesia dengan UU TPPU di negara Asean dalam menghadapi kejahatan transnasional.

#### **Kesimpulan Khusus**

Dari pembahasan terhadap permasalahan pokok pertama, penulis mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

a. Kelemahan-kelemahan dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2002 (sebelum amandemen) meliputi :

- 1) Mengenai asal-usul harta kekayaan yang dicuci (*predicate offence*) dirumuskan secara limitatif hanya dalam 15 tindak pidana. Dengan dibatasinya "*predicate offence*" tersebut dapat timbul masalah jika terjadi tindak pidana lainnya selain 15 tindak pidana tersebut.
- 2) Mengenai pertanggungjawaban pidana dalam UU TPPU masih sangat terbatas dan tidak konsisten dengan perumusan yang ada



dalam Undang – Undang Korupsi dan Undang – Undang Tindak Pidana Ekonomi.

- 3) Mengenai dan sanksi pidana khususnya mengenai sistem dan strategi pemidanaan mengandung kelemahan antara lain perumusan jenis pidana pokok yang bersifat kaku dan imperatif, yaitu menggunakan sistem tunggal (hanya pidana denda) untuk korporasi dan sistem kumulatif (penjara dan denda ) untuk orang. Di samping itu tidak ada aturan/pedoman penerapan pidana minimal khusus dan tidak ada aturan khusus untuk korporasi yang tidak membayar denda.
  - 4) Masalah batas jumlah harta kekayaan (uang) yang dicuci dibatasi dengan jumlah 500 juta rupiah. Adanya pembatasan yang demikian, merupakan kelemahan karena dapat digunakan sebagai celah-celah untuk lolos dari jerat hukum, dengan jalan memecah-mecah uang yang dicuci itu di bawah nilai 500 juta rupiah dengan menggunakan beberapa nama.
- b. Kelemahan-kelemahan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2003 (sesudah amandemen) meliputi :
- 1) Mengenai asal-usul harta kekayaan yang dicuci (*predicate effence*), meskipun sudah diperluas yang semula 15 tindak pidana dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2002, menjadi 25 tindak pidana, tetap menimbulkan masalah jika terdapat tindak pidana selain dari 25 tindak pidana tersebut.

2) Demikian juga mengenai pertanggungjawaban korporasi masih tetap seperti Undang-undang No. 15 Tahun 2002, yaitu masih sangat terbatas dan tidak konsisten dengan perumusan yang ada dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi dan Undang-undang Korupsi. Sistem dan strategi pemidanaan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2003 kurang diorientasikan sebagai *transnational organized crime*, yaitu masih bersifat *individual* dan kurang bersifat *institutional* (kurang terfokus pada korporasi sebagai institusi/organisasi).

3) Mengenai sanksi pidana masih tetap seperti Undang-undang No. 15 Tahun 2002 yaitu khususnya mengenai sistem dan strategi pemidanaan mengandung kelemahan antara lain perumusan jenis pidana pokok yang bersifat kaku dan imperatif, yaitu menggunakan sistem tunggal (hanya pidana denda) untuk korporasi dan sistem kumulatif (penjara dan denda) untuk orang. Di samping itu tidak ada aturan/pedoman penerapan pidana minimal khusus dan tidak ada aturan khusus untuk korporasi yang tidak membayar denda.

Dari pembahasan terhadap permasalahan pokok kedua, yaitu inkronisasi kebijakan formulasi hukum pidana dalam UU TPPU Indonesia engan UU TPPU di negara Asean dalam upaya menanggulangi kejahatan ansnasional, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Mengenai asal-usul harta kekayaan yang dicuci (*predicate offence*) dalam UU TPPU Indonesia, Myanmar, Filipina dan Malaysia,

kesemuanya memberikan perumusan limitatif. Dilihat dari kerja sama Asean dalam menghadapi TPPU, maka perumusan "*predicate offence*" di berbagai negara Asean yang limitatif tetapi "berbeda jenis tindak pidananya" itu dapat menimbulkan masalah. Dengan demikian belum ada sinkronisasi kebijakan formulasi khususnya masalah *predicate offence* di negara-negara Asean. Oleh karena itu adanya keseragaman terhadap *predicate offence* akan sangat membantu penyelesaian masalah ini.

- b. Mengenai jumlah harta kekayaan yang dicuci Indonesia sebelum UU TPPU diamandemen membatasi jumlah harta kekayaan yang dicuci, yaitu 500 juta rupiah atau lebih atau yang setara. Setelah UU TPPU diamandemen ketentuan ini dihapus sehingga sama halnya dengan di Filipina dan Malaysia serta di beberapa negara lain yang tidak menentukan batasnya, kecuali di Myanmar bahwa jumlah/nilainya akan ditentukan tersendiri oleh "*the Central Control Board*" (CCB). Dengan adanya penghapusan batas/jumlah harta kekayaan yang dicuci untuk UU TPPU Indonesia itu, tentunya akan mendukung kerjasama dalam memberantas TPPU, baik secara regional maupun internasional.
- c. Menurut Undang - Undang TPPU Indonesia, subjek TPPU tidak hanya "orang perseorangan" tetapi juga "korporasi". Kebijakan memperluas subjek tindak pidana pada korporasi sudah sesuai dengan perkembangan/dimensi kejahatan masa kini, terlebih dalam menghadapi TPPU yang mengandung ciri sebagai "*transnational and organized*

*crime*". Di beberapa negara Asean juga korporasi diakui sebagai subjek tindak pidana. Hanya di Myanmar, dalam Undang - Undang Pengawasan Pencucian Uang lebih ditujukan pada subjek berupa "orang", tidak pada "korporasi".

n

Dengan ketentuan dalam UU TPPU Amandemen Tahun 2003, bahwa harta kekayaan hasil tindak pidana sebanyak 25 tindak pidana dan ditambah ketentuan tentang harta kekayaan yang dipergunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme dipersamakan sebagai hasil tindak pidana terorisme, hendaknya ditindaklanjuti dengan ketentuan lebih rinci (spesifik) seperti halnya di negara-negara Asean lainnya.

Dalam hal pertanggungjawaban korporasi dalam UU TPPU Amandemen masih sangat terbatas dan tidak konsisten dengan perumusan yang ada dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi dan Undang-undang Korupsi. Sistem dan strategi pemidanaan dalam UU TPPU kurang diorientasikan dalam UU TPPU sebagai *transnational organized crime*, yaitu masih bersifat *individual* dan kurang bersifat *institutional* (kurang terfokus pada korporasi sebagai institusi/organisasi), hendaknya juga dibuat suatu ketentuan dalam peraturan pelaksanaan mengenai hal tersebut.

Dengan tidak ada aturan/pedoman penerapan pidana minimal khusus dan tidak ada aturan khusus untuk korporasi yang tidak membayar denda dalam

UU TPPU dan UU TPPU Amandemen, oleh karena itu hendaknya perlu dibuat suatu ketentuan dalam peraturan pelaksanaan mengenai hal tersebut.

Dalam rangka kerja sama antar negara terutama kawasan Asean, hendaknya dibuat nota kesepahaman mengenai pencegahan tindak pidana pencucian uang, baik dalam bentuk penegakan hukumnya maupun bentuk preventif lainnya, mengingat tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan transnasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- AIPPI, 1997, *"Japanese Laws Relating to Industrial Property"*, Tokyo, Japan.
- Abidin, Zainal, 1981, *"Pertanggungjawaban Terhadap Delik-delik Ekonom"*i, Puslitbang Kejahung Republik Indonesia dan FH. Unhas, Makassar.
- , 1983, *"Bunga Rampai Hukum Pidana"*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- , 1995, *"Hukum Pidana I"*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Algra, N. E. dkk, 1983, *"Kamus Istilah Hukum Plockema Andrea Belanda-Indonesia"*, Binacipta, Bandung.
- Ancel, Marc, 1965, *Social Defence, A Modern Approach To Criminal Problem*, Rout Ledge & Kegan paul, London.
- Arief, Barda Nawawi, 2002, *"Implementasi UUL Pencucian Uang RI Dalam menunjang Rencana Aksi Asean Menghadapi Kejahatan Transnasional"*, makalah Lokakarya, Dirjen Kerjasama Asean Deparlu, Yogyakarta.
- , 1998, *"Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana"*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1996, *"Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara"*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- , 2002, *"Beberapa Catatan Terhadap Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money laundering)"*, Makalah Seminar Nasional, Jakarta.
- , 2003, *"Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana"*, PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2003, *"Kapita Selekta Hukum Pidana"*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1998, *"Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana"*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2000, *"Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan"*, Semarang : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Bachtiar, Agus Salim, 1980, *"Masalah Pertanggungjawaban Pidana"*, Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Bina Cipta, Bandung.
- , 2002, *"Beberapa Catatan Terhadap Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)"*, Makalah Seminar Nasional, Jakarta.

- Black, Henry Campbell, 1990, "*Black's Law Dictionary (Sixth Editions)*", West Publishing 10, St. Pamb, Minnesota, USA.
- Booth, Anne, and Peter Mc. Cawley, 1990, "*Ekonomi Orde Baru*", Fifth Edition, Jakarta.
- Brannen, Julia, 1994, alih bahasa : Nuktah Arfawie et. al., "*Remadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*", Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari, Samarinda bekerja sama dengan Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- , 1992, "*Mixing Methods : Qualitative and Quantitative Research*", Avebury, Brookfield, USA.
- Campbell, Eric, 1998, "*Legal Research*", The Law Book Co. Melbourne, Australia.
- David K. Linnan, "*FATF dan Pencucian Uang dari Sudut Pandang Internasional*", makalah disampaikan dalam seminar mengenai money laundering diselenggarakan oleh Law and Finance Institutional Partnership, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1999, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta.
- Echols, M. John dan Hassa Shadily, 1995, "*Kamus Inggris Indonesia*", Gramedia, Jakarta.
- Faisal, Sanafiah, 1990, "*Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi*", Yayasan Asah, Asih, Asuh, Malang.
- Hamdan, 2000, "*Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*", Mandar Maju, Bandung.
- Hamzah, A., 1994, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Rineka Cipta, Jakarta.
- , 1986, "*Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*", Pradnya Paramita, Jakarta.
- Harkrisnowo, Harkristuti 2001, "*Pemutihan Uang/Money Laundering Sebagai Bagian dari White Collar Crime*", makalah disampaikan dalam seminar mengenai money laundering diselenggarakan oleh Law and Finance Institutional Partnership, Jakarta.
- Hartono CFG Sunaryati, 1994, "*Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*", Alumni, Bandung.
- Hoeve, W. van, 1992, "*Kamus Belanda - Indonesia*", Ikhtiar Baru, Jakarta.
- Husein, Yunus, 2001, "*Penerapan Prinsip Mengenai Nasabah oleh Bank dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Money Laundering*", makalah disampaikan dalam seminar mengenai money laundering diselenggarakan oleh Law and Finance Institutional Partnership, Jakarta.
- Insan Budi, Maulana dan Nico Kansil, 1997, "*Indonesia I.P Laws Amended*", EIPR.

- Keraf, Garys, 1994, *"Diksi dan Gaya Bahasa dari Retorika"*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- , 1995, *"Eksposisi, Komposisi"*, Gramedia Widiaswara Indonesia, Jakarta.
- , 1993, *"Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa"*, Nusa Indah, Flores.
- , 1982, *"Ekposisi dan Deskripsi"*, Nusa Indah, Flores.
- Keijzer Nico, 2002, *"Fraud By Corporations"*, terjemahan Barda Nawawi Arief : *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, OT. Raja Grafindo Perdsada, Cetakan Keempat.
- Lamintang, P.A.F dan Djisman Samnosir, 1983, *"Hukum Pidana Indonesia"*, Sinar Baru Bandung.
- , 1984, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.
- Moeljanto, 1987, *"Azas-Azas Hukum Pidana"*, Bina Aksara, Jakarta.
- McDonell Rick, Establishment of the FUI, 2002, Workshop diselenggarakan oleh JICA Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 1994, *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhajir, Noeng, 1996, *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*, Raka Saraswati, Yogyakarta.
- Muladi, 1994, *"Tindak Pidana. Money Laundering dan Permasalahannya"*, Makalah Seminar Nasional Pemutihan Uang Hasil Kejahatan, Fakultas Hukum. Universitas Trisakti, Jakarta.
- , 1989, *"Stelsel Pidana dan Tindakan Dalam Konsep KUHP Baru"*, Makalah Diskusi Panel mengenai Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- dan Barda Nawawi Arief, 1998; *"Teori-teori dan Kebijakan Pidana"*, Alumni, Bandung.
- dan Barda Nawawi Arief, 1992, *"Bunga Rampai Hukum Pidana"*, Bandung.
- Nasution, Anwar, 1997, *"Peranan Sistem Keuangan Dalam Pemberantasan Money Laundering"*, Makalah Seminar tentang Money Laundering diselenggarakan oleh BPHN-Departemen Kehakiman.
- Packer, Herbert L, 1968, *"The Limits of the Criminal Sunction"*, Stanford University Press, California.
- Paripurna P. Sugarda, 2001, *"Kompilasi Kerahasiaan Perbankan untuk Tindakan Anti Pencucian Uang"*, makalah disampaikan dalam seminar mengenai



money laundering diselenggarakan oleh Law and Finance Institutional Partnership, Jakarta.

- Poerwadarminta, W.J.S., 1985, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*", PN. Balai Pustaka, Jakarta.
- Prasetyo, Rudi, 1989, "*Perkembangan Korporasi Dalam Proses Modernisasi Dan Penyimpangan – penyimpangannya*", FH. Undip, Semarang.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1997, "*Memahami Dasar Hukum Pidana Indonesia*", Pradnya Paramita, Jakarta.
- Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2001, "*Pedoman Penulisan Tesis*", Semarang.
- Radja Silalahi, Pande, 1997, "*Money Laundering dan Sistem Keuangan Internasional*", Makalah Seminar diselenggarakan BPHN-Departemen Kehakiman.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, "*Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan Karangan Buku Kesatu*", Lembaga Kriminologi, UI, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, "*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*", Ghalia Indonesia.
- Saherapy, J.E, 1982, "*Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*", Rajawali, Jakarta.
- , 1994, "*Kejahatan Korporasi*", Eresco, Bandung.
- , 1995, "*Hukum Pidana Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Indonesia -- Belanda*", Liberty, Yogyakarta.
- Saleh, K. Wantijk, 1979, "*Tindak Pidana Korupsi*", Penerbit Ghalia Indonesia.
- Saleh, Roeslan, 1982, "*Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*", Lokakarya Masalah Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, BPHN-Depkeh.
- , 1987, "*Stelsel Pidana Indonesia*", Bina Aksara, Jakarta.
- , 1983, "*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*", Aksara Baru, Jakarta.
- Sastrawidjaja Sofjan, 1995, "*Hukum Pidana*", Armico, Bandung.
- Schaffmeister, D. et al, 1995, "*Hukum Pidana*", Liberty, Yogyakarta.
- Setiyono, H, 2002, "*Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*", Averroes Press, Malang.
- Shadily, Hassan, 1980, "*Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*", PT. Pembangunan, Jakarta.

- Shofie, Yusuf, 2002, "*Pelaku Usaha, Konsumen Dan Tindak Pidana Korporasi*", Ghalia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri mamuji, 1985, "*Penelitian hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*", Rajawali, Jakarta.
- , 1986, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Cetakan ke Tiga, Penerbit UI Jakarta.
- , 1990, "*Sosiologi : Suatu Pengantar*", CV. Rajawali, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanintidjo, 1990, "*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*", Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1993, "*Grounded Research*", Dalam *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum UNDIP No. 9 tahun 1993.
- , 1991, "*Fungsi Teori Dalam Penelitian Empiris*", dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum UNDIP No. 7 tahun 1991.
- , 1990, "*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*", Ghalia Indonesia.
- , 1988, "*Penelitian Hukum Normatif*", dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum UNDIP No. 5 tahun 1988.
- , 1992, "*Peran Metodologi Penelitian Hukum Dalam Pengembangan Ilmu Hukum*", dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum UNDIP No. 5 tahun 1992.
- , 2002, "*Suplemen Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum Untuk Bidang Kajian Sistem Peradilan Pidana*", Program Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Semarang.
- , 1989, "*Teori-teori Dalam Ilmu Hukum*", dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum UNDIP No. 1 tahun 1989.
- , 1991, "*Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif Dengan Penelitian Hukum Empiris*", dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum UNDIP No. 9 tahun 1991.
- Sudarto, 1986, "*Hukum dan Hukum Pidana*", Bandung.
- , 1983, "*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*", Sinar Baru, Bandung.
- , 1981, "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", Alumni, Bandung.
- Suharsini, Arikunto 1996, *Prosedur Penelitian, "Suatu Pendekatan Praktek"*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Sumantri, 1990, "*Aspek-aspek Pidana Di Bidang Ekonomi*", Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Susanto, I.S, 1995, "*Kejahatan Korporasi*", Balai Penerbit Undip, Semarang.
- Tim Penyusun Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, 1996, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*", Balai Pustaka, Jakarta.
- Tim Redaksi Tatanusa, 2001, "*Penunjuk Peraturan Perundang-undangan RI 1945 – 2000*", Tatanusa, Jakarta.
- Utrecht, E, 1958, "*Hukum Pidana I*", Universitas Jakarta, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 1990, "*Narapidana dan Proses Pemasyarakatan*", Sinar Grafika, Jakarta.